

KAJIAN EKONOMI

REGIONAL

TRIWULAN IV

2009

VISI BANK INDONESIA :

“Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”

MISI BANK INDONESIA :

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan”

NILAI-NILAI STRATEGIS ORGANISASI BANK INDONESIA :

“Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan Kebersamaan”

KATA PENGANTAR

BUKU Kajian Ekonomi Regional (KER) Provinsi Riau ini merupakan terbitan rutin triwulanan yang berisi analisis perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau. Terbitan kali ini memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV– 2009 dengan penekanan kajian pada kondisi ekonomi makro regional (PDRB dan Keuangan Daerah), Inflasi, Moneter dan Perbankan, Sistem Pembayaran, Kependudukan dan Kesejahteraan serta Perkiraan Perkembangan Ekonomi Daerah pada triwulan I-2010. Analisis dilakukan berdasarkan data laporan bulanan bank umum dan BPR, data ekspor-impor yang diolah oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, data PDRB dan inflasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, serta data dari instansi/lembaga terkait lainnya.

Tujuan dari penyusunan buku KER ini adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Provinsi Riau, dengan harapan kajian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan buku ini. Oleh karena itu kritik, saran, dukungan penyediaan data dan informasi sangat diharapkan.

Pekanbaru, 3 Februari 2010
BANK INDONESIA PEKANBARU

ttd

Wiyoto
Pemimpin

DAFTAR	ISI
--------	-----

	HALAMAN
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	xii
Tabel Indikator Ekonomi Terpilih.....	xv
 RINGKASAN EKSEKUTIF	 1
 BAB 1. KONDISI EKONOMI MAKRO REGIONAL	 6
1. Kondisi Umum.....	6
2. PDRB Sisi Permintaan.....	7
2.1. Konsumsi	9
2.2. Investasi	11
2.2.1. Migas	13
2.2.2. Non Migas	13
2.3. Ekspor dan Impor.....	14
2.3.1. Migas	15
2.3.2. Non Migas	16
3. PDRB Sisi Penawaran.....	17
3.1. Sektor Pertanian.....	18
3.2. Pertambangan dan Penggalan.....	20
3.2.1. Migas	20
3.2.2. Non Migas	21

3.3.	Industri Pengolahan.....	21
3.3.1.	Migas	21
3.3.2.	Non Migas	22
3.4.	Listrik, Gas dan Air Bersih.....	22
3.5.	Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	23
3.6.	Pengangkutan dan Komunikasi.....	24
3.7.	Keuangan, Persewaan bangunan & Jasa Keuangan.....	25
3.8.	Jasa-jasa.....	25
BOKS1.	PEMBANGUNAN KLASSTER INDUSTRI HILIR BERBASIS PERTANIAN <i>OLEOCHEMICAL</i> DI DUMAI DAN KUALA ENOK PROVINSI RIAU	
BAB 2.	PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	27
1.	Kondisi Umum.....	27
2.	Perkembangan Indeks Harga Konsumen.....	28
2.1.	Kota Pekanbaru.....	28
2.2.	Kota Dumai.....	34
BAB 3.	PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH.....	38
1.	Kondisi Umum.....	38
2.	Perkembangan Moneter	39
3.	Perkembangan Perbankan	40
3.1.	Bank Umum	40
3.1.1.	Jaringan Kantor.....	40
3.1.2.	Perkembangan Aset	41
3.1.3.	Kredit	42
3.1.3.1.	Perkembangan Penyaluran Kredit.....	42
3.1.3.2.	Konsentrasi Kredit	44
3.1.3.3.	<i>Undisbursed Loan</i> dan Persetujuan Kredit Baru.....	47
3.1.3.4.	Risiko Kredit	49
3.1.4.	Kondisi Likuiditas	50

	3.1.4.1. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	51
	3.1.4.2. Rasio Alat Liquid	52
	3.1.5. Intermediasi Perbankan	56
	3.1.5.1. Perkembangan LDR	56
	3.1.5.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM.....	57
	3.1.6. Profitabilitas	60
	3.1.6.1. Spread Bunga	60
	3.1.6.2. Pendapatan Bunga dan Beban Bunga	61
	3.1.6.3. Perkembangan Laba Rugi	62
	3.1.7. Bank Syariah	63
	3.3. Bank Perkreditan Rakyat.....	65
BAB 4	KONDISI KEUANGAN DAERAH.....	67
	1. Kondisi Umum	67
	2. Realisasi APBD Riau Tahun 2009.....	68
	2.1. Realisasi Belanja Langsung	71
	2.2. Realisasi Belanja Tidak Langsung	73
	3. Rencana APBD Riau Tahun 2010.....	75
	3.1. Rencana Anggaran Pendapatan	76
	3.2. Rencana Anggaran Belanja	78
	3.3. Pembiayaan Daerah	79
BAB 5	PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	81
	1. Kondisi Umum	81
	2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai	82
	2.1. Aliran uang masuk dan keluar (<i>inflow – outflow</i>).....	82
	2.2. Penyediaan uang kartal layak edar	83
	2.3. Uang Palsu	84
	3. Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai	85
	3.1. Transaksi Kliring	85
	3.2. <i>Real Time Gross Settlement</i>	87

BOKS 2. TRANSAKSI PENGGUNAAN UANG LOGAM DI KOTA PEKANBARU

Bab 6	PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN DAERAH	88
1.	Kondisi Umum	88
2.	Ketenagakerjaan Daerah	89
2.1.	Penduduk Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota	94
2.2.	Penduduk Bekerja di Kabupaten/Kota	95
2.3.	Pengangguran dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota ..	96
3.	Kesejahteraan Daerah	98
3.1.	Penghasilan Masyarakat	99
3.2.	NTP	101
Bab 7	PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	104
1.	Pertumbuhan Ekonomi	104
2.	Inflasi	107
3.	Perbankan	108
Daftar Istilah	xvi

DAFTAR	TABEL
--------	-------

HALAMAN

Tabel 1.1.	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Riau Dengan Migas (% <i>,y-o-y</i>)	8
Tabel 1.2.	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Riau Tanpa Migas (% <i>,y-o-y</i>)..	9
Tabel 1.3.	Perkembangan Konsumsi Listrik.....	11
Tabel 1.4.	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Riau Tanpa Migas (% <i>,y-o-y</i>)..	17
Tabel 1.5.	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Riau Dengan Migas (% <i>,y-o-y</i>)	17
Tabel 2.1.	Inflasi (qtq) Menurut Kelompok Barang & Jasa di Kota Pekanbaru TriwulanIV-2009.....	29
Tabel 2.2.	Perkembangan Sub Kelompok IHK yang Mengalami Inflasi dan Deflasi pada Triwulan IV-2009 di Kota Pekanbaru.....	30
Tabel 2.3.	Lima (5) Komoditas yang Memberikan Sumbangan Tertinggi Terhadap Perubahan IHK di Kota Pekanbaru Dalam Triwulan IV-2009.....	31
Tabel 2.4.	Distribusi Raskin Riau di Pekanbaru.....	32
Tabel 2.5.	Inflasi (qtq) Kota Dumai Menurut Kelompok.....	36
Tabel 2.6.	Perkembangan Sub Kelompok yang Mengalami Perubahan Harga Tertinggi dan Terendah Dalam Triwulan IV-2009 di Kota Dumai.....	37
Tabel 3.1.	Perkembangan Bank di Provinsi Riau.....	41
Tabel 3.2.	Jaringan Kantor Bank Umum di Provinsi Riau Per Desember 2009.....	41
Tabel 3.3.	Posisi Kredit Di Provinsi Riau (Rp juta).....	43
Tabel 3.4.	Kredit Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (Rp juta).....	46

Tabel 3.5.	Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II di Provinsi Riau (Rp juta).....	47
Tabel 3.6.	Persetujuan Kredit Baru di Provinsi Riau (Rp Juta).....	49
Tabel 3.7.	NPLs Per Sektor Ekonomi Di Provinsi Riau (Rp Juta).....	50
Tabel 3.8.	NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau.....	50
Tabel 3.9.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Riau (Rp Miliar).....	51
Tabel 3.10.	Sebaran DPK menurut Kepemilikan di Provinsi Riau (Rp Juta).....	52
Tabel 3.11.	Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal di Provinsi Riau.....	53
Tabel 3.12.	Penghimpunan DPK Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau.....	54
Tabel 3.13.	Perkembangan Alat Likuid dan <i>Non Core Deposit</i>	55
Tabel 3.14.	Perkembangan Kredit UMKM di Provinsi Riau (Rp Juta).....	57
Tabel 3.15.	Sebaran Kredit UMKM menurut Jenis Penggunaan.....	57
Tabel 3.16.	Sebaran Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi (Rp juta).....	58
Tabel 3.17.	Sebaran NPLs UMKM menurut Sektor Ekonomi (Rp juta).....	59
Tabel 3.18.	Sebaran NPLs UMKM menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Riau).....	59
Tabel 3.19.	Indikator Kinerja Utama Perbankan Syariah di Provinsi Riau (Rp Juta).....	65
Tabel 3.20.	Perkembangan Usaha BPR/BPRS di Provinsi Riau (Rp Juta).....	65
Tabel 4.1.	Realisasi Belanja SKPD Provinsi Riau (Rp Juta).....	69
Tabel 4.2.	Rincian Belanja SKPD Provinsi Riau (Rp Juta).....	70
Tabel 4.3.	Realisasi Belanja SKPD Provinsi Riau (Rp Juta).....	71
Tabel 4.4.	Realisasi Belanja Langsung SKPD Provinsi Riau (Rp Juta).....	72
Tabel 4.5.	Realisasi Belanja Tidak Langsung SKPD Provinsi Riau (Rp Juta).....	74
Tabel 4.6.	Rincian APBD Provinsi Riau Tahun 2010 (Rp Juta).....	75
Tabel 4.7.	Rincian Anggaran Pendapatan Provinsi Riau (Rp Juta).....	77
Tabel 4.8.	Rencana Anggaran Belanja Provinsi Riau (Rp Juta).....	79
Tabel 4.9.	Rencana Anggaran Belanja Provinsi Riau (Rp Juta).....	79
Tabel 5.1.	Perkembangan Transaksi BI-RTGS di Provinsi Riau Tahun 2009.....	87

Tabel 6.1.	Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama (Jiwa).....	90
Tabel 6.2.	Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama	92
Tabel 6.3.	Penduduk Usia Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama	93
Tabel 6.4.	Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota (Jiwa).....	97
Tabel 6.5.	Perkembangan Upah se Provinsi Riau (Rp).....	101
Tabel 7.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Riau (yoy,%).....	105

DAFTAR	GRAFIK
--------	--------

HALAMAN

Grafik 1.1.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Riau (y-o-y,%)	7
Grafik 1.2.	Perkembangan Komponen Konsumsi (%)	10
Grafik 1.3.	Pendaftaran Kendaraan Baru dan Konsumsi Bahan Bakar)	10
Grafik 1.4.	Perkembangan Komponen PMTB	12
Grafik 1.5.	Perkembangan Kredit Investasi di Provinsi Riau	12
Grafik 1.6.	Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen Provinsi Riau	14
Grafik 1.7.	Pertumbuhan Ekspor Riau secara Triwulanan (qtq)	15
Grafik 1.8.	Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkembangan NTP Riau	18
Grafik 1.9.	Perkembangan Harga Komoditas Bahan Olahan Karet dan kepala Sawit	19
Grafik 1.10.	Perkembangan Lifting Migas Riau Tahun 2009	20
Grafik 1.11.	Tingkat Hunian Hotel di Riau	24
Grafik 1.12.	Pertumbuhan Kinerja Perbankan di Provinsi Riau (Aset, Dana, Kredit)	25
Grafik 2.1.	Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Kota Pekanbaru dan Nasional)	29
Grafik 2.2.	Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) Kota Pekanbaru dan Nasional	29
Grafik 2.3.	Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditas Cabe di Pekanbaru	32
Grafik 2.4.	Pergerakan Harga Emas Dunia Tahun 2004-2009	33
Grafik 2.5.	Pergerakan Ekspektasi Harga dan Inflasi (qtq) Aktual	34
Grafik 2.6.	Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	35
Grafik 2.7.	Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) Kota Pekanbaru dan Kota Dumai	35

Grafik 3.1.	Perkembangan Uang Kuasi, Giral dan SBI di Provinsi Riau (Rp triliun).....	40
Grafik 3.2.	Perkembangan Aset Perbankan di Provinsi Riau (Rp triliun).....	42
Grafik 3.3.	Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq) Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Riau Tahun 2007-2009.....	44
Grafik 3.4.	Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Riau	45
Grafik 3.5.	Jumlah <i>Undisbursed Loan</i> Perbankan Provinsi Riau (Rp triliun)....	48
Grafik 3.6.	Perkembangan NPLs <i>Gross</i> di Provinsi Riau.....	49
Grafik 3.7.	Perkembangan Rasio Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i>	55
Grafik 3.8.	Perkembangan LDR Di Provinsi Riau.....	56
Grafik 3.9.	Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito (%).....	60
Grafik 3.10.	Komposisi Pendapatan Bunga	61
Grafik 3.11.	Komposisi Beban Bunga.....	62
Grafik 3.12.	Perkembangan Laba Rugi (Triwulanan, Rp Juta).....	63
Grafik 3.13.	Pembiayaan Syariah Menurut Sektor Ekonomi.....	64
Grafik 5.1.	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	82
Grafik 5.2.	Perkembangan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) di Bank Indonesia Pekanbaru (Rp Miliar).....	84
Grafik 5.3.	Perkembangan Peredaran Uang Palsu di Riau.....	85
Grafik 5.4.	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Riau Tahun 2007 – 2009.....	86
Grafik 5.5.	Perkembangan Penolakan di Provinsi Riau Tahun 2007 – 2009.....	86
Grafik 6.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran (%).....	91
Grafik 6.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran (%).....	91
Grafik 6.3.	Angkatan Kerja masing-masing Kabupaten/Kota (Jiwa).....	94

Grafik 6.4.	Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja masing-masing Kabupaten/Kota (Jiwa).....	96
Grafik 6.5.	Ekspektasi Masyarakat terhadap Pengangguran (Indeks).....	98
Grafik 6.6.	Perkembangan Upah di Provinsi Riau.....	100
Grafik 6.7.	Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Riau.....	102
Grafik 6.8.	Perkembangan NTP menurut Subsektor Provinsi Riau.....	103

TABEL INDIKATOR

EKONOMI TERPILIH

A. INFLASI DAN PDRB

INDIKATOR	2008	2009			
	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
MAKRO					
Indek Harga Konsumen :	112.85	113.39	112.78	114.70	115.04
Laju Inflasi Tahunan (yoy, %) :	9.02	6.99	3.68	2.20	1.94
PDRB - harga konstan (Rp miliar)					
- Pertanian	3,887.95	3,869.00	3,987.84	4,077.03	4,124.05
- Pertambangan & Penganlian	11,803.92	11,540.81	11,981.51	11,946.51	11,928.93
- Industri Pengolahan	2,610.92	2,502.43	2,534.87	2,620.35	2,742.08
- Listrik, gas dan Air Besih	50.85	50.65	50.81	50.00	52.28
- Bangunan	794.05	760.79	786.37	818.77	863.34
- Perdagangan, Hotel, dan restoran	1,896.82	1,961.39	2,016.44	2,104.76	2,076.99
- Pengangkutan dan Komunikasi	679.62	675.03	682.51	701.67	725.08
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa	312.89	301.98	304.75	319.53	338.65
- Jasa	1,154.16	1,142.69	1,150.34	1,208.78	1,247.71
Pertumbuhan PDRB (yoy %, dengan migas)	5.37	4.42	3.07	2.52	3.91
Pertumbuhan PDRB (yoy %, tanpa migas)	7.38	6.55	6.43	5.57	7.25

B. PERBANKAN

INDIKATOR	2008	2009			
	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bank Umum					
Total Aset (Rp triliun)	37.71	37.90	41.58	39.68	39.22
DPK (Rp triliun)	31.89	31.82	33.71	31.63	30.88
- Giro (Rp triliun)	10.39	9.98	10.93	8.80	7.08
- Tabungan (Rp triliun)	13.26	12.57	13.17	13.66	15.42
- Deposito (Rp triliun)	8.25	9.27	9.62	9.17	8.38
Kredit (Rp triliun) - berdasarkan lokasi proyek	32.01	31,244	32.32	33.58	34.78
LDR (%)	100.36	98,198.61	95.89	106.16	112.64
Kredit (Rp triliun) - berdasarkan lokasi kantor cab.	20.35	20.73	22.26	23.15	24.08
- Modal Kerja	7.05	7.32	7.89	8.45	8.80
- Investasi	6.19	5.84	6.21	6.42	6.67
- Konsumsi	7.10	7.54	8.16	8.28	8.60
- LDR (%)	63.80	65.17	66.03	73.20	77.98
Kredit UMKM (Rp triliun)	14.81	15.29	16.59	17.37	18.11
- Kredit Modal Kerja	5.12	5.17	5.68	6.07	6.34
- Kredit Investasi	2.60	2.59	2.77	3.02	3.19
- Kredit Konsumsi	7.08	7.53	8.14	8.27	8.58
NPL MKM (%)	1.93	2.68	2.51	2.61	2.36
BPR					
Total Aset (Rp miliar)	515.38	542.76	559.13	594.37	620.76
DPK (Rp Miliar)	366.16	382.02	390.02	438.41	432.48
Kredit (Rp miliar) - berdasarkan lokasi proyek	335.12	353.33	375.33	382.77	397.10
Kredit UMKM (Rp miliar)	335.12	353.33	375.33	382.77	397.10
Rasio NPL (%)	5.53	7.75	7.25	8.86	7.05
LDR	91.52	92.49	96.23	87.31	91.82

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. GAMBARAN UMUM

Kenaikan harga komoditas dunia menjadi pemicu pertumbuhan triwulan IV-2009

- Pemulihan ekonomi global menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau triwulan IV-2009 yang dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas unggulan di Provinsi Riau seperti CPO, karet dan batubara. Kondisi tersebut telah ikut mendorong pertumbuhan ekspor non migas pada triwulan laporan.
- Kinerja perbankan Riau dalam triwulan IV-2009 relatif lebih baik meskipun penurunan DPK masih berlanjut yang dipicu oleh penurunan dana milik pemda. Pertumbuhan kredit tahunan (yoy) dalam triwulan IV-2009 lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2009, sedangkan risiko kredit yang tercermin dari NPLs mengalami penurunan cukup signifikan.

Kinerja dunia perbankan membaik

II. ASSES MEN MAKROEKONOMI REGIONAL

Pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy) menunjukkan peningkatan baik dengan unsur migas maupun tanpa unsur migas

- Kinerja perekonomian dalam triwulan IV-2009 secara umum telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (yoy). Pertumbuhan ekonomi dengan migas mencapai 3,91% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,52% (yoy). Sementara, pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami peningkatan dari 5,57% (triwulan III-2009) menjadi 7,25% (triwulan IV-2009)..

PMTB Migas mencatat pertumbuhan tertinggi secara tahunan

- Pada sisi permintaan, pertumbuhan tahunan tertinggi dialami oleh PMTB migas dengan angka mencapai 11,81% (yoy) sedangkan di sisi penawaran sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,82% (yoy) diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 9,50%. Kondisi ini dipengaruhi oleh agenda akbar berupa Musyawarah Nasional salah satu partai besar yang dilakukan di Pekanbaru pada bulan Oktober yang 2009. Kegiatan ini telah memberikan *multiplier effect* yang besar pada tingkat pemesanan hotel berbintang 3,4, dan 5 di Pekanbaru.

Impor non migas mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor non migas

- Dalam triwulan laporan pertumbuhan ekspor tanpa migas Riau secara tahunan (yoy) mencapai 5,49%, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh peningkatan ekspor komoditas minyak & lemak nabati dan bubur kertas yang merupakan komoditi unggulan Riau. Sementara itu, pertumbuhan impor non migas Riau pada triwulan laporan mencapai 6,23%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,97%. Kontribusi terbesar dari peningkatan komponen impor berasal dari impor antar daerah yang pertumbuhannya mencapai 6,35%, dengan pangsa impor antar daerah sebesar 58,03% dari total impor non migas Riau.

III. ASSES MEN INFLASI

Inflasi tahunan (yoy) pada tahun 2009 mencapai titik terendahnya

- Inflasi tahunan (yoy) di kota Pekanbaru dan Dumai dalam triwulan laporan mengalami disinflasi bahkan berada pada titik terendahnya selama tahun 2009. Inflasi (yoy) di Kota Pekanbaru dan Dumai dalam triwulan laporan masing-masing mencapai 1,94% dan 0,8%. Secara triwulanan, inflasi hanya terjadi di Kota Pekanbaru yaitu sebesar 0,30% sedangkan Kota Dumai mengalami deflasi (qtq) sebesar 1,14%

Sumber tekanan inflasi berasal dari kelompok bahan makanan

- Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok bahan makanan mengalami deflasi secara triwulanan (qtq) yang utamanya didorong oleh penurunan pada harga cabe merah selama triwulan laporan. Meskipun demikian, harga beras tercatat mengalami inflasi yang diindikasikan terkait adanya spekulasi mengenai kenaikan HPP beras dan efek badai el-nino.

Pergerakan kelompok IHK *administered price* relatif stabil

- Dalam triwulan laporan, tidak ditemukan gejala kenaikan pada harga barang yang diatur oleh pemerintah (*administered price*). Sebaliknya, pada bulan November 2009, harga bensin jenis pertamax tercatat menurun 0,56% (m-t-m).

IV. ASSES MEN KEUANGAN

Perbankan Riau

Kredit mengalami peningkatan sedangkan risiko kredit menurun

- Kredit yang disalurkan oleh perbankan Riau dalam triwulan IV-2009 mengalami kenaikan sebesar 4,00% secara triwulanan (qtq), relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya namun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,46%. Pengelolaan risiko kredit yang tercermin pada rasio *Non Performing Loans* (NPLs) menurun menjadi 2,41%. Meskipun demikian, terjadi peningkatan kredit non lancar pada perbankan syariah terutama pada sub sektor perkebunan.

Kredit modal kerja masih terkonsentrasi pada sub sektor perdagangan eceran

- Menurut jenis penggunaan, komposisi kredit modal kerja menurut sektor ekonomi di Provinsi Riau dalam triwulan laporan relatif tidak berubah, dimana konsentrasi kredit modal kerja sebagian besar masih disalurkan kepada subsektor perdagangan eceran yaitu sebesar Rp2,98 triliun atau sekitar 33,85% dari kredit modal kerja.

Penghimpunan dana mengalami penurunan

- Dana Pihak Ketiga (DPK) di Provinsi Riau dalam triwulan laporan mencapai Rp30,87 triliun atau turun sebesar 2,38% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Berdasarkan kepemilikan, penurunan dana didominasi oleh penurunan Dana milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang menurun sebesar 48,60% (qtq). Meskipun demikian, dana milik perusahaan swasta tercatat mengalami kenaikan triwulanan sebesar 8,27% (qtq) setelah dalam dua triwulan sebelumnya mengalami penurunan.

Kepemilikan SBI perbankan Riau menurun 75,27% (qtq)

- Jumlah alat likuid perbankan Riau yang terdiri dari Kas dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam triwulan laporan menurun 48,91% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini terjadi akibat penurunan komponen SBI secara triwulanan, yaitu dari Rp1,41 triliun menjadi Rp348,74 miliar atau turun sekitar 75,27% (qtq).

Profitabilitas perbankan mengalami kenaikan sebesar 65% (qtq)

- Profitabilitas perbankan dalam triwulan IV-2009 mengalami kenaikan baik secara triwulanan maupun tahunan. Dengan memperhitungkan transfer dan pajak, jumlah perolehan laba bersih perbankan Riau mencapai Rp273 miliar atau mengalami kenaikan dibandingkan triwulan III-2009 maupun periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp107,50 miliar dan Rp175,94 miliar.

V. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan akan mengalami peningkatan

- Pertumbuhan ekonomi Riau tanpa unsur migas dalam triwulan I-2010 diperkirakan akan mampu melaju pada kisaran 7,83%-8,35% (yoy). Sementara, dengan memasukkan faktor migas pertumbuhan ekonomi Riau akan berada pada kisaran 4,75%-5,22%.

Investasi diperkirakan akan menjadi motor baru perekonomian Riau pada tahun 2010

- Ekspor non migas dan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan menjadi salah satu pilar utama pemicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2010 sejalan dengan membaiknya perekonomian negara mitra dagang utama Provinsi Riau terutama Cina dan India. Disamping itu, kegiatan investasi juga diperkirakan akan mengalami peningkatan terkait rencana pembangunan klaster industri sawit, PLTU 2X100 MW dan berbagai infrastruktur menjelang perhelatan PON 2012. Perdagangan bebas ACFTA diperkirakan juga akan meningkatkan permintaan ekspor komoditi perkebunan

Laju Inflasi pada triwulan I-2010 akan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2009

- Laju inflasi dalam triwulan I-2010 (qtq) diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV-2009 seiring dengan adanya kenaikan pada HPP beras serta spekulasi badai el-nino yang akan mengakibatkan harga komoditas bahan makanan di pasar internasional melonjak. Keleluasaan tarif pasca disepakatinya ACFTA juga diperkirakan akan mendorong peningkatan barang impor dari Cina (*imported inflation*).

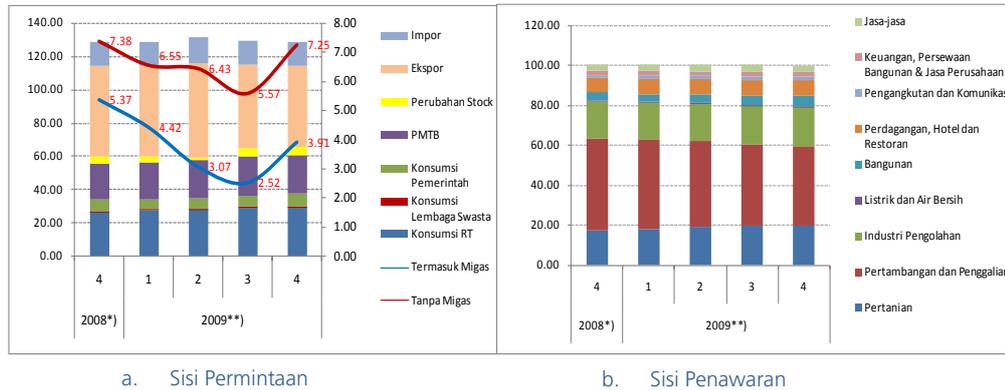
Kinerja perbankan Riau pada triwulan I-2010 akan mengalami peningkatan

- Dari sisi perbankan, penghimpunan dana pada triwulan I-2010 diperkirakan akan mulai mengalami kenaikan yang dipicu dari meningkatnya pendapatan dunia usaha serta penempatan dana dari Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD. Sedangkan penyaluran kredit diperkirakan masih akan tumbuh positif seiring dengan membaiknya kualitas kredit. Kondisi ini tidak terlepas dari mulai membaiknya harga komoditas unggulan seperti CPO dan karet di pasar internasional.

*Bab 1***KONDISI EKONOMI****MAKRO REGIONAL****1. Kondisi Umum**

Kondisi perekonomian Riau sampai dengan triwulan IV-2009 secara umum telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (yoy). Dengan mengeluarkan komponen migas, pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 7,25%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,57%. Namun dengan memasukkan komponen migas, pertumbuhan ekonomi Riau tercatat sebesar 3,91%, juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,52%. Kontribusi unsur migas yang relatif besar menyebabkan pertumbuhan ekonomi dengan migas menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tanpa migas.

Grafik 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Riau (y-o-y, %)



Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia
Keterangan : **) angka sementara, *) angka perbaikan

Fase pemulihan ekonomi global memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Provinsi Riau yang antara lain ditunjukkan oleh peningkatan volume ekspor non migas seperti CPO. Disamping itu, mulai membaiknya daya beli masyarakat juga memberikan dorongan cukup berarti terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Riau. Secara struktural sektor pertambangan migas dan sektor Industri Pengolahan masih mendominasi komponen PDRB dibandingkan dengan sektor lainnya.

2. PDRB Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada komponen PMTB dengan migas yaitu mencapai 10,05%, namun mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 11,81%. Namun dengan memasukkan unsur migas pertumbuhan komponen ini justru meningkat dari 4,23% menjadi 5,68%. Selanjutnya, pertumbuhan komponen konsumsi Pemerintah mencapai 8,82%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,88%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 8,31%, namun mengalami penurunan dari 9,49% pada triwulan sebelumnya. Sementara, komponen konsumsi swasta mengalami perlambatan yang signifikan dari 19,35% pada triwulan III-2009 menjadi 8,01% pada triwulan laporan.

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Riau Dengan Migas (% ,y-o-y)

No.	Komponen	Tw IV 08***)		Tw I 09***)		Tw II 09***)		Tw III 09***)		Tw IV 09***)	
		Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share
1	Konsumsi Rumah Tangga	10.92	26.87	11.59	27.91	7.85	28.11	9.49	29.31	8.31	29.55
	a. Makanan	9.34	11.27	11.16	11.28	10.48	11.32	11.78	11.78	9.25	12.15
	b. Non Makanan	11.76	15.60	11.82	16.63	6.51	16.79	8.31	17.53	7.83	17.41
2	Konsumsi Lembaga Swasta	8.61	0.23	23.86	0.28	25.08	0.28	19.35	0.28	8.01	0.26
3	Konsumsi Pemerintah	7.25	6.96	0.65	6.30	7.65	6.61	7.88	7.00	8.82	7.67
4	PMTB	9.67	21.48	9.80	21.96	12.71	23.00	11.81	23.56	10.05	23.27
5	Perubahan Stock		4.65		3.22		1.20		4.56		4.67
6	Ekspor	4.48	54.07	-1.57	54.71	-2.47	56.63	-5.85	50.03	-4.10	48.68
	la. Antar Negara	4.25	49.18	-2.29	49.59	-3.34	51.15	-6.75	43.71	-4.67	43.66
	lb. Antar Daerah	8.54	4.90	10.78	5.12	12.89	5.48	9.19	6.32	5.52	5.02
7	Impor	7.59	14.27	2.42	14.38	4.81	15.83	4.12	14.75	0.43	14.10
	ja. Antar Negara	5.82	7.01	-6.71	6.58	-3.13	7.29	-5.90	5.63	-5.27	6.03
	jb. Antar Daerah	8.81	7.26	8.57	7.80	10.15	8.54	10.96	9.12	4.28	8.07
	Total	5.37	100	4.42	100	3.07	100	2.52	100	3.91	100

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia

Keterangan : **) angka sementara, *) angka perbaikan

Dilihat dari pangsa, komponen ekspor memiliki pangsa terbesar yaitu mencapai 48,68% dari total PDRB, namun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya yang mencapai 50,03%. Selanjutnya, komponen konsumsi rumah tangga juga mempunyai pangsa yang cukup berarti yaitu mencapai 29,55%, sedikit meningkat dibandingkan dengan 29,31% pada triwulan sebelumnya.

Namun demikian, dengan mengeluarkan unsur migas, maka pangsa terbesar dari struktur PDRB Riau adalah komponen konsumsi rumah tangga yang mencapai 50,56%, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya yang mencapai 51,35%. Selanjutnya diikuti oleh pangsa komponen ekspor yang mencapai 38,34%, meningkat dari 35,68% pada triwulan sebelumnya. Sementara, pangsa komponen impor tercatat sebesar 23,64%, belum mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Riau Tanpa Migas (%y-o-y)

No.	Komponen	Tw IV 08*)		Tw I 09**)		Tw II 09**)		Tw III 09**)		Tw IV 09**)	
		Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share
1	Konsumsi Rumah Tangga	10.92	51.47	6.24	52.55	7.85	50.79	9.49	51.35	8.31	50.56
	a. Makanan	9.34	21.58	6.28	21.24	10.48	20.45	11.78	20.63	9.25	20.78
	b. Non Makanan	11.76	29.89	6.23	31.32	6.51	30.34	8.31	30.72	7.83	29.78
2	Konsumsi Lembaga Swasta	8.61	0.45	23.86	0.52	25.08	0.51	19.35	0.50	8.01	0.44
3	Konsumsi Pemerintah	7.25	13.34	7.90	11.87	7.65	11.94	7.88	12.26	8.82	13.12
4	PMTB	7.54	19.64	7.40	20.07	4.55	20.11	4.23	20.23	5.68	19.86
5	Perubahan Stock	-212.48	4.31	237.46	2.19	26.38	3.18	-4.50	3.68	-11.03	1.32
6	Ekspor	3.44	46.33	5.94	38.24	5.36	39.50	-1.76	35.68	5.49	38.34
	a. Antar Negara	3.59	43.50	6.71	35.60	6.62	36.84	-1.90	32.82	4.95	35.40
	b. Antar Daerah	2.31	2.82	0.26	2.64	-3.64	2.66	-0.74	2.86	9.67	2.94
7	Impor	14.42	35.53	10.68	25.44	7.29	26.02	3.97	23.71	6.23	23.64
	a. Antar Negara	15.79	19.86	17.28	11.43	8.52	11.87	-0.23	9.16	6.07	9.24
	b. Antar Daerah	13.52	15.67	6.33	14.02	6.47	14.15	6.79	14.55	6.35	14.41
	Total	7.38	100	6.55	100	6.43	100	5.57	100	7.25	100

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia

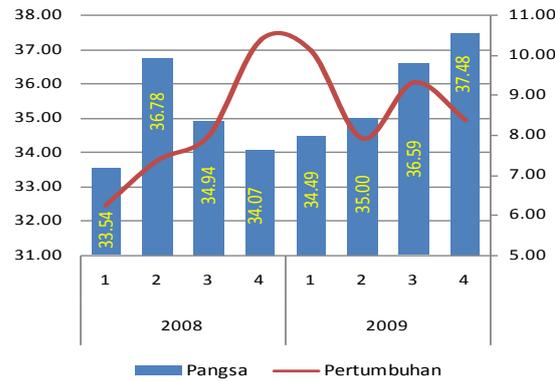
Keterangan : **) angka sementara, *) angka perbaikan

2.1. Konsumsi

Secara umum, dalam struktur PDRB dengan migas komponen konsumsi yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta, dan konsumsi pemerintah di Provinsi Riau masih memiliki porsi yang cukup besar dan memiliki pangsa 35,43% selama 3 tahun terakhir. Pada triwulan IV-2009, pangsa komponen konsumsi mencapai 37,48%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pangsa konsumsi pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan komponen konsumsi ini mengalami perlambatan yaitu dari 9,33% pada triwulan II-2009 menjadi 8,38% pada triwulan IV-2009.

Pangsa terbesar dari komponen konsumsi adalah konsumsi rumah tangga, yaitu mencapai 78,85% dari total konsumsi. Selanjutnya komponen konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga swasta masing-masing sebesar 20,46% dan 0,69% dari total konsumsi. Besarnya pangsa konsumsi rumah tangga memberikan pengaruh yang besar terhadap pergerakan pertumbuhan komponen konsumsi.

Grafik 1.2. Perkembangan Komponen Konsumsi (%)

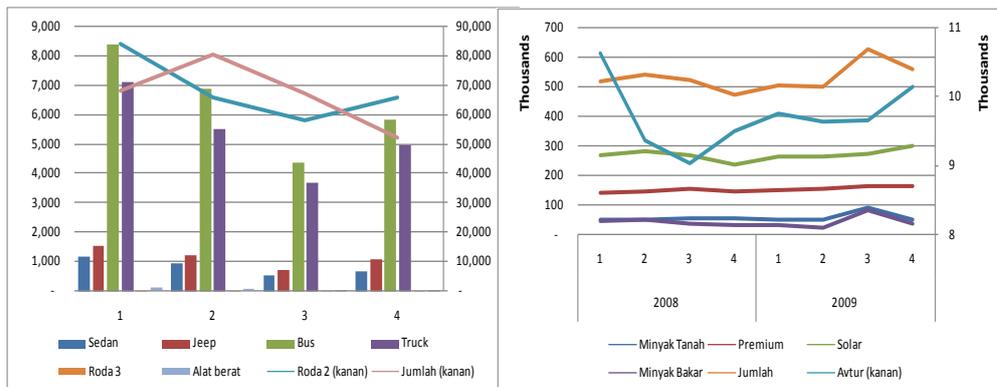


Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia

Secara tahunan (yoy), laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu dari 9,49% menjadi 8,31%. Perlambatan ini diperkirakan terjadi karena adanya pergeseran perayaan hari besar keagamaan yaitu Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, yang pada tahun 2008 terjadi pada triwulan IV, sementara pada tahun 2009 terjadi pada triwulan III-2009.

Perlambatan ini juga ditunjukkan oleh menurunnya beberapa indikator konsumsi masyarakat seperti pendaftaran kendaraan baru, terutama untuk mobil jenis sedan. Namun pendaftaran kendaraan roda dua justru mengalami peningkatan. Indikator lainnya adalah konsumsi bahan bakar dan konsumsi listrik yang menunjukkan penurunan, seiring dengan defisit listrik yang terjadi selama tahun 2009.

Grafik 1.3. Pendaftaran Kendaraan Baru dan Konsumsi Bahan Bakar



Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Riau (PKB) dan PERTAMINA (Konsumsi BBM), diolah

Tabel 1.3. Perkembangan Konsumsi Listrik

Periode	(Juta kWh)	Sosial	Rumah Tangga	Bisnis	Industri	Publik	Total
2008	1,910	54.83	873.58	399.39	122.19	122.13	1,572.13
1	166.84	4.92	82.38	36.74	9.59	11.71	145.34
2	159.17	4.92	81.25	36.48	8.78	11.76	143.19
3	171.21	5.00	78.56	36.11	9.73	11.78	141.17
4	175.29	5.17	80.69	37.84	10.16	12.08	145.95
2009 5	184.64	5.35	84.71	39.33	10.50	12.33	152.23
6	173.80	5.61	87.34	41.19	11.71	12.64	158.48
7	171.86	5.50	86.56	39.86	9.85	13.05	154.81
8	160.11	5.02	80.62	36.96	8.92	12.59	144.12
9	162.08	5.19	79.02	35.86	8.77	12.53	141.37
Jumlah	1,525	46.68	741.15	340.37	87.99	110.47	1,326.65

Sumber : PLN Provinsi Riau, diolah

Pertumbuhan tertinggi dari komponen konsumsi rumah tangga berasal dari makanan yaitu sebesar 9,25%, sementara pertumbuhan konsumsi non makanan tercatat sebesar 7,83%. Pertumbuhan kedua komponen konsumsi rumah tangga ini tercatat mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Selanjutnya, komponen konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan 8,82%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,88%. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena realisasi dari belanja barang dan jasa dilingkungan pemerintahan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah mulai terserap dengan optimal. Hal ini juga sejalan dengan akhir tahun anggaran pada triwulan IV-2009.

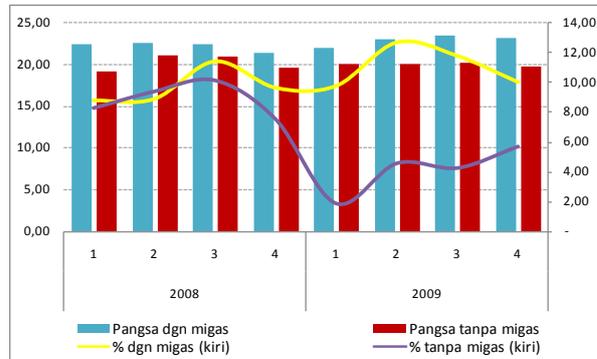
Sementara itu, konsumsi lembaga swasta mengalami pertumbuhan sebesar 8,01%, mengalami perlambatan yang signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 19,35%. Berkurangnya *event-event* besar pada triwulan IV-2009 diperkirakan menjadi faktor pendorong melambatnya pertumbuhan komponen ini pada triwulan IV-2009. Pada triwulan IV-2009 hanya terdapat 1 (satu) *event* yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan komponen konsumsi swasta di Provinsi Riau yaitu Musyawarah Nasional salah satu partai besar di Indonesia yang diadakan di Pekanbaru.

2.2. Investasi

Perkembangan investasi yang diukur melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan IV-2009, baik tanpa migas maupun dengan migas. Pertumbuhan PMTB dengan migas masih

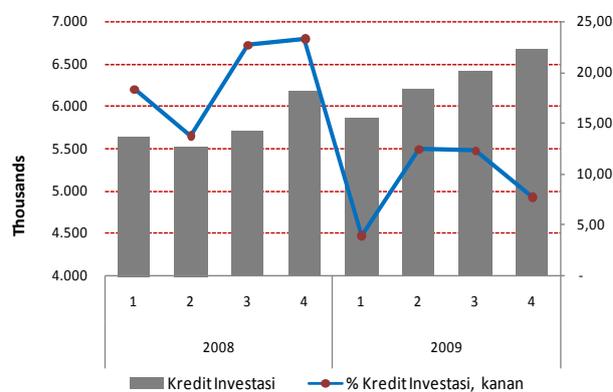
menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PMTB tanpa migas. Secara keseluruhan peranan PMTB tanpa migas memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Riau, karena pangsa yang cukup besar.

Grafik 1.4. Perkembangan Komponen PMTB



Indikator yang juga menunjukkan perkembangan komponen investasi di Provinsi Riau adalah perkembangan posisi kredit investasi dan realisasi baru kredit investasi yang masih terus tumbuh positif. Pertumbuhan realisasi baru kredit investasi menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan III-2009 (qtq) maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Grafik 1.5. Perkembangan Kredit Investasi di Provinsi Riau



2.2.1. Migas

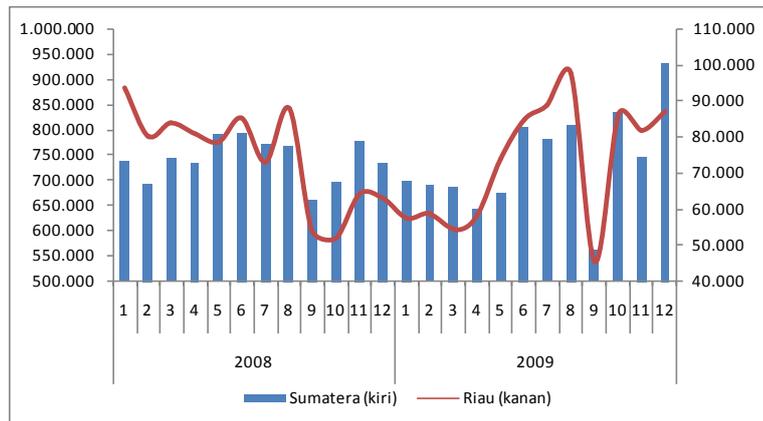
Secara tahunan (yoy), pertumbuhan PMTB dengan memasukkan unsur migas diperkirakan tumbuh sebesar 10,05%, mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 11,81%. Kondisi ini terjadi diperkirakan karena penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing maupun investor dalam negeri di bidang migas belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, angka ini masih berada pada tingkat yang cukup menggembirakan dalam kondisi perekonomian global yang belum pulih seutuhnya.

Relatif stabilnya harga minyak mentah dunia, diperkirakan telah mendorong para investor untuk tetap berupaya menstabilkan bahkan melakukan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan konsumen baik global maupun domestik antara lain dengan melakukan investasi pada peralatan dan infrastruktur baik dengan memperbaiki maupun membeli peralatan baru. Selain itu, upaya-upaya untuk pencarian sumur-sumur produksi baru diberbagai daerah juga turut mempengaruhi pertumbuhan PMTB pada triwulan laporan.

2.2.2. Non Migas

Perkembangan investasi non migas Riau yang diukur dengan Pembentukan PMTB pada triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, yang tercermin dari peningkatan pertumbuhan komponen PMTB dari 4,23% pada triwulan III-2009 menjadi 5,68% pada triwulan IV-2009. Peningkatan investasi dibidang non migas ditunjukkan dengan peningkatan realisasi pengadaan semen di Provinsi Riau pada triwulan IV-2009 dibandingkan dengan realisasi pengadaan semen pada triwulan III-2009 yang lalu. Pada triwulan laporan realisasi pengadaan semen mencapai 255,92 ribu ton, meningkat 10,26% dibandingkan dengan realisasi pengadaan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 232,11 ribu ton.

Grafik 1.6. Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen Provinsi Riau



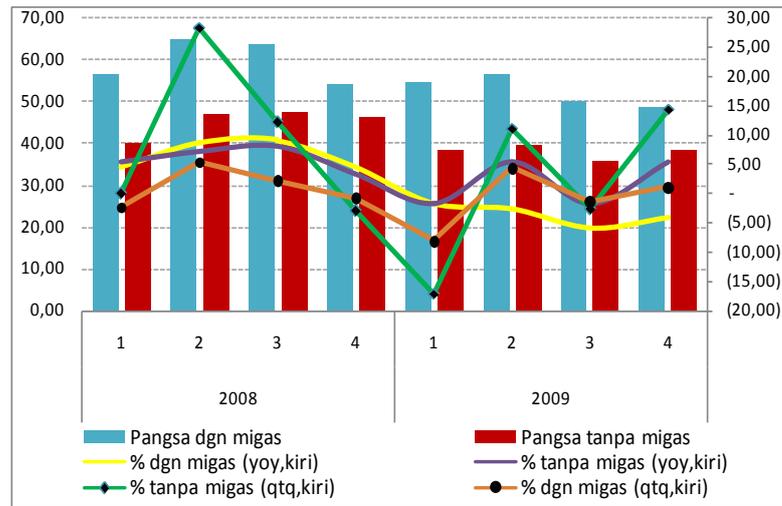
Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Secara umum, realisasi pengadaan semen di Sumatera juga mengalami peningkatan dari 2,15 juta ton menjadi 2,51 juta ton. Peningkatan realisasi pengadaan semen ini tidak terlepas dari perbaikan maupun pembangunan berbagai sarana infrastruktur yang mengalami kerusakan pasca gempa yang berpusat di Padang yang lalu. Selain itu, akhir tahun anggaran juga turut mendorong peningkatan realisasi pengadaan semen pada triwulan laporan, yang antara lain digunakan untuk penyelesaian proyek-proyek pembangunan gedung olahraga dan berbagai infrastruktur menyambut PON yang akan diadakan di Riau.

2.3. Ekspor dan Impor

Secara tahunan (yoy), pertumbuhan ekspor Riau masih mengalami pertumbuhan negatif yang mulai terjadi sejak triwulan I-2009 yang lalu, didorong oleh menurunnya pertumbuhan ekspor migas Riau, sebaliknya ekspor non migas sudah mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun demikian secara triwulanan (qtq), pertumbuhan ekspor Riau triwulan IV-2009 sudah mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan III-2009, baik dengan migas maupun tanpa migas. Ekspor tanpa migas secara triwulanan menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan, setelah mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan sebelumnya.

Grafik 1.7. Pertumbuhan Ekspor Riau secara Triwulanan (qtq)



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Di sisi lain secara tahunan (yoy), pertumbuhan impor masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun cenderung mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan komponen impor Riau utamanya didorong oleh peningkatan impor antar daerah, baik impor dengan migas maupun impor tanpa migas.

2.3.1. Migas

Secara tahunan (yoy), pertumbuhan ekspor migas Riau masih terus mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu -4,10% pada triwulan laporan, dan sudah mulai terjadi sejak triwulan I-2009 yang lalu. Penurunan komponen ekspor ini utamanya terjadi pada ekspor antar negara yang mengalami penurunan sebesar 4,67%. Besarnya pangsa ekspor antar negara (89,69%) memberikan pengaruh yang besar terhadap pergerakan ekspor Riau secara keseluruhan. Sementara itu, ekspor antar daerah mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 5,52%.

Masih belum membaiknya kondisi *lifting* migas Riau dibandingkan dengan tahun 2008 yang lalu telah mendorong menurunnya ekspor migas Riau. Disamping karena belum pulihnya perekonomian global, sehingga pasar global dan pasar domestik belum melakukan aktivitas perekonomian seperti sediakala. Namun demikian, jika dilihat secara triwulanan (qtq), maka pertumbuhan ekspor Riau sudah mulai mengalami peningkatan yaitu dari -1,29% pada triwulan III-2009

menjadi 1,18% pada triwulan IV-2009. Kondisi ini mencerminkan bahwa kondisi ekspor migas Riau sudah mulai mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya secara triwulanan.

Di sisi lain, pertumbuhan impor secara tahunan pada triwulan IV-2009 mengalami perlambatan menjadi sebesar 0,43%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,12%. Kontribusi pertumbuhan impor utamanya berasal dari impor antar daerah yang tercatat sebesar 4,28%, mengalami perlambatan yang signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 10,96%, sementara impor antar negara masih mengalami penurunan yaitu tercatat sebesar -5,27% pada triwulan laporan. Masih relatif baiknya angka pertumbuhan impor antara daerah diperkirakan karena masih relatif baiknya permintaan migas domestik yang digunakan untuk bahan bakar industri, listrik, transportasi maupun rumah tangga.

2.3.2. Non Migas

Dalam triwulan laporan pertumbuhan ekspor tanpa migas Riau secara tahunan (yoy) mencapai 5,49%, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar 1,76%. Peningkatan pertumbuhan ekspor non migas ini didorong oleh peningkatan ekspor komoditas minyak & lemak nabati dan bubur kertas yang merupakan komoditi unggulan Riau. Ekspor antar daerah memiliki kontribusi yang sangat besar sehingga peningkatan ekspor kedua komoditi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekspor non migas Riau dengan cukup berarti.

Sementara itu, pertumbuhan impor non migas Riau pada triwulan laporan mencapai 6,23% juga, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,97%. Kontribusi terbesar dari peningkatan komponen impor berasal dari impor antar daerah yang pertumbuhannya mencapai 6,35%, dengan pangsa impor antar daerah sebesar 58,03% dari total impor non migas Riau. Sementara itu, impor antar negara juga mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari -0,23% pada triwulan III-2009 menjadi 6,07% pada triwulan IV-2009.

3. PDRB Sisi Penawaran

Mulai membaiknya kondisi perekonomian global telah memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian regional khususnya dari sisi penawaran. Dalam triwulan laporan, secara tahunan (yoy) pertumbuhan ekonomi Riau dari sisi penawaran juga menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, baik migas maupun non migas. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas (9,82%), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel & restoran (9,50%), sektor bangunan (8,73%) dan sektor keuangan (8,23%)

Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Riau Tanpa Migas (%y-o-y)

No	Sektor	Tw IV 08*)		Tw I 09**)		Tw II 09**)		Tw III 09**)		Tw IV 09**)	
		Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share
1	Pertanian	2,09	32,74	3,10	33,38	3,14	34,64	2,25	34,16	6,07	33,26
2	Pertambangan dan Penggalian	16,18	2,29	15,84	2,38	15,51	2,30	11,71	2,29	9,82	2,31
3	Industri Pengolahan	11,04	30,61	6,78	29,11	7,37	28,28	4,92	28,44	6,23	29,32
4	Listrik dan Air Bersih	7,25	0,31	5,60	0,32	4,87	0,30	(0,93)	0,28	2,80	0,28
5	Bangunan	14,61	8,09	9,31	7,81	8,21	8,10	8,29	8,39	8,73	8,50
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,50	13,39	7,95	14,36	8,02	13,95	9,37	13,74	9,50	13,48
7	Pengangkutan dan Komunikasi	12,03	3,27	9,93	3,32	8,64	3,23	7,38	3,19	6,69	3,12
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	13,87	3,84	12,20	3,76	11,76	3,60	8,21	3,65	8,23	3,79
9	Jasa-jasa	9,34	5,45	9,26	5,57	8,63	5,60	7,63	5,85	8,11	5,95
PDRB Tanpa Migas		7,38	100,00	6,55	100,00	6,43	100,00	2,25	100,00	3,91	100,00

Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia
Keterangan : **) angka sementara, *) angka Perbaikan

Namun, dilihat dari pangasanya maka sektor pertambangan dan penggalian dengan migas memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 39,61%. Selanjutnya, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 33,26%, sektor industri pengolahan tanpa migas sebesar 29,32% dan sektor perdagangan yaitu sebesar 13,48%. Sementara itu, sektor listrik & air bersih dan sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas mempunyai porsi paling kecil yaitu masing-masing hanya sebesar 0,28% dan 2,31%.

Tabel 1.5. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Riau Dengan Migas (%y-o-y)

No	Sektor	Tw IV 08*)		Tw I 09**)		Tw II 09**)		Tw III 09**)		Tw IV 09**)	
		Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share	Pertumbuhan	Share
1	Pertanian	2,09	17,10	3,10	17,73	3,14	19,18	2,25	19,50	6,07	19,45
2	Pertambangan dan Penggalian	4,00	46,36	2,85	45,22	0,42	42,74	0,05	40,96	1,06	39,61
3	Industri Pengolahan	8,37	18,61	5,35	18,39	5,82	18,84	3,60	19,52	5,02	20,42
4	Listrik dan Air Bersih	7,25	0,16	5,60	0,17	4,87	0,17	-0,93	0,16	2,80	0,16
5	Bangunan	14,61	4,22	9,31	4,15	8,21	4,48	8,29	4,79	8,73	4,97
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,50	6,99	7,95	7,63	8,02	7,72	9,37	7,84	9,50	7,88
7	Pengangkutan dan Komunikasi	12,03	1,71	9,93	1,77	8,64	1,79	7,38	1,82	6,69	1,82
8	Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	13,87	2,01	12,20	1,99	11,76	1,99	8,21	2,08	8,23	2,22
9	Jasa-jasa	9,34	2,84	9,26	2,96	8,63	3,10	7,63	3,34	8,11	3,48
PDRB dengan Migas		5,37	100,00	4,42	100,00	3,07	100,00	2,52	100,00	3,91	100,00

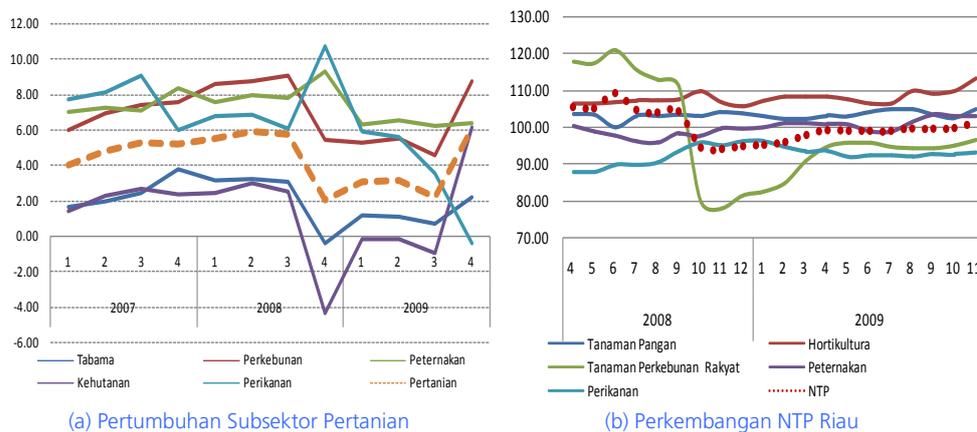
Sumber : Diolah oleh Bank Indonesia
Keterangan : **) angka sementara, *) angka perbaikan

3.1. Sektor Pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan IV-2009 (yoy) mencapai 6,07%, mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,25%. Sektor pertanian mempunyai pangsa yang cukup besar yaitu mencapai 33,26% dari total PDRB tanpa migas, namun mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 34,16%.

Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan laporan utamanya didorong oleh pertumbuhan subsektor perkebunan dan subsektor kehutanan. Kedua subsektor tersebut juga mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing sebesar 8,81% dan 6,18%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 4,57% dan -0,91%. Subsektor perkebunan dan kehutanan juga mempunyai pangsa terbesar yaitu masing-masing sebesar 49% dan 33,65% dari PDRB sektor pertanian. Peningkatan pada sektor pertanian juga ditunjukkan dengan meningkatnya NTP Riau pada semua subsektornya menjelang akhir tahun 2009.

Grafik 1.8. Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dan Perkembangan NTP Riau

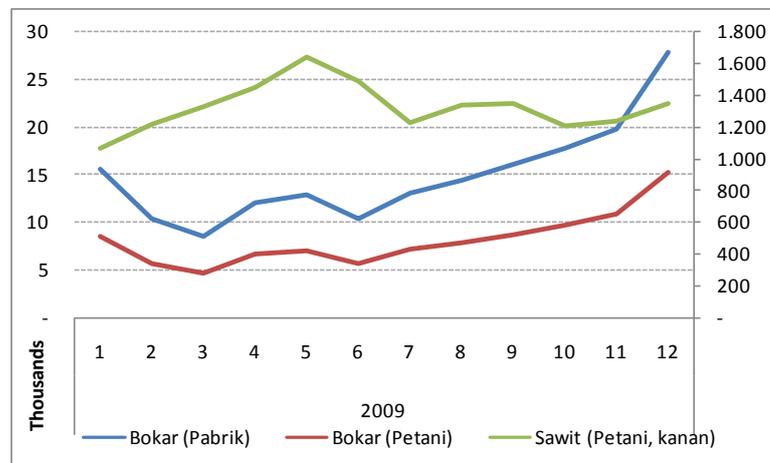


Membaiiknya harga komoditas sawit dan CPO sejak triwulan III-2009 yang lalu telah mendorong peningkatan produksi komoditas ini. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap komoditas sawit dan CPO. Masa puncak panen (*peak crop*) kelapa sawit yang jatuh pada triwulan ke IV-2009

juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi Riau, karena terjadi peningkatan produksi hasil pertanian.

Selain itu, peningkatan harga bahan olahan karet (bokar) akibat meningkatnya permintaan terhadap komoditas ini juga telah mendorong peningkatan produksi karet yang didorong mulai pulihnya kondisi pasar otomotif dunia. Sekitar 90% produksi karet Riau ditujukan untuk pasar ekspor¹, terutama untuk bahan baku ban kendaraan, dengan negara tujuan utama ekspor karet adalah Cina, Amerika, dan Jepang.

Grafik 1.9. Perkembangan Harga Komoditas Bahan Olahan Karet dan kepala Sawit



Sumber : Bappebti, diolah

Namun demikian, subsektor perikanan masih mengalami pertumbuhan yang negatif, yaitu turun hingga 0,33% dari sebelumnya 3,59%. Kondisi cuaca yang kurang baik selama triwulan IV-2009, telah menyebabkan menurunnya frekuensi nelayan turun ke laut, yang menyebabkan menurunnya hasil produksi subsektor perikanan.

¹ Berdasarkan hasil Survey *Liaison* yang dilakukan oleh Bank Indonesia

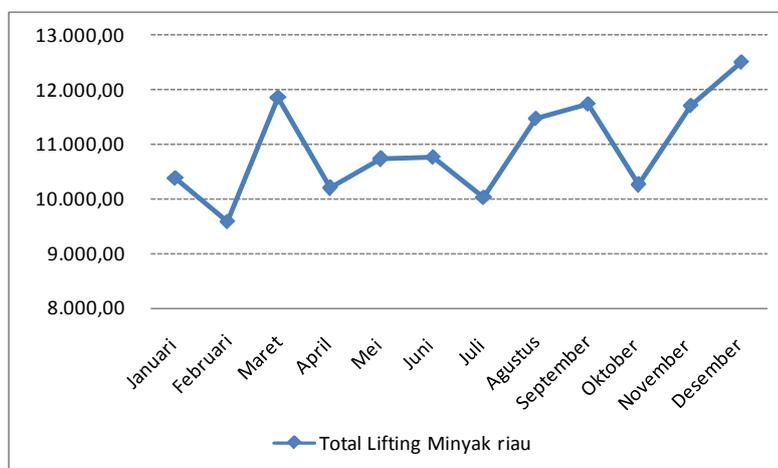
3.2. Pertambangan dan Penggalian

3.2.1. Migas

Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian dengan migas pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan sebesar 1,06% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 0,05%. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya *lifting* migas Riau memasuki akhir tahun 2009 yang didorong oleh mulai membaiknya harga minyak mentah dunia memasuki semester II-2009 yang lalu. Selain itu, penemuan sumur minyak baru oleh PERTAMINA di ladang minyak Blok Sago Lirik Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan juga memberikan dorongan terhadap peningkatan Produksi minyak bumi Riau.

Sektor pertambangan memiliki peranan yang besar terhadap pembentukan angka PDRB Riau, karena pangsa yang cukup besar. Pada triwulan laporan, pangsa sektor ini tercatat mencapai 39,61%, dengan porsi migas mencapai 96,59% dari total PDRB sektor pertambangan dan penggalian. Khusus pertumbuhan migasnya tercatat sebesar 0,90%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu 0,15%.

Grafik 1.10. Perkembangan *Lifting* Migas Riau Tahun 2009



Sumber : www.esdm.go.id, diolah

3.2.2. Non Migas

Dengan mengeluarkan unsur migas, maka pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mengalami perubahan yang cukup besar yaitu menjadi 9,82%, namun mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 11,71%. Pertumbuhan sektor ini berasal dari subsektor pertambangan tanpa migas dan subsektor penggalian yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 11,65% dan 7,55%. Pertumbuhan sektor pertambangan tanpa migas utamanya karena eksplorasi dan eksploitasi komoditas batubara yang mengalami peningkatan. Namun, karena pangsa yang kecil sehingga belum dapat mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian dengan berarti.

3.3. Industri Pengolahan

Industri pengolahan juga memiliki peranan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Riau karena pangsa yang besar yaitu mencapai 20,42% dari total PDRB Riau. Pertumbuhan sektor ini utamanya didorong oleh subsektor industri pengolahan tanpa migas yang mempunyai peranan yang sangat besar. Secara total pertumbuhan sektor ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari 3,60% pada triwulan III-2009 menjadi 5,02% pada triwulan IV-2009.

3.3.1. Migas

Pertumbuhan sektor industri pengolahan migas mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu dari -0,67% menjadi 0,87% dan tercatat mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Industri pengolahan migas mempunyai pangsa sebesar 16,08% dari total PDRB sektor industri pengolahan atau 3,28% dari total PDRB Riau. Peningkatan industri pengolahan migas ini diperkirakan juga terkait dengan penemuan sumur minyak baru di Blok Sago Lirik oleh PERTAMINA, sehingga mendorong peningkatan kinerja subsektor ini.

3.3.2. Non Migas

Industri pengolahan tanpa migas memiliki peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Riau. Dengan mengeluarkan unsur migas, pertumbuhan sektor industri pengolahan tercatat lebih tinggi yaitu mencapai 6,23%, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 4,92%. Pangsa sektor ini juga tercatat cukup besar yaitu mencapai 29,32%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 28,44%.

Peran terbesar sektor ini utamanya didukung oleh peran industri kertas dan barang dari kertas, industri makanan dan minuman. Kontribusi beberapa industri kertas di Riau yang sudah berskala internasional menjadi penopang utama industri pengolahan di Riau. Selanjutnya, komoditas dari industri makan dan minuman, khususnya komoditas dodol, dan beberapa makanan khas Riau lainnya.

Peningkatan kinerja industri pengolahan CPO yang disebabkan tercukupinya bahan baku telah memberikan dorongan yang cukup berarti bagi perkembangan sektor industri pengolahan. Survey *Liaison* yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa saat ini tidak terdapat *mismatch* antara permintaan dan pasokan baik komoditas CPO maupun karet olahan. Sedangkan persediaan dan produksi kedua komoditi dimaksud masih relatif stabil bahkan saat ini sedang dalam kondisi *full capacity*. Mulai berkembangnya beberapa industri garmen dan mebel di Riau juga mulai memberikan kontribusi yang berarti, meskipun masih berskala kecil.

3.4. Listrik, Gas dan Air Bersih

Perkembangan sektor listrik, gas dan air bersih dalam triwulan laporan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari -0,93% menjadi 2,80%, namun pangasanya masih tetap pada kisaran 0,28%. Beberapa usaha yang dilakukan oleh PLN untuk dalam rangka mengatasi permasalahan defisit listrik di Riau diperkirakan telah memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor ini selama triwulan laporan. Namun demikian, tingkat pertumbuhan maupun kontribusi sektor ini masih tergolong kecil

dibandingkan dengan sektor lainnya. Kondisi ini diperkirakan karena belum dikelolanya sektor listrik dan air bersih secara baik, hal ini terutama karena masih terkendalanya permasalahan dana dan investasi untuk sektor ini.

3.5. Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

Perkembangan sektor PHR pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan sebesar 9,50%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,37%. Pertumbuhan sektor PHR ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan pada ketiga subsektornya yaitu subsektor perdagangan besar dan eceran sebesar 9,53%, subsektor hotel sebesar 9,27%, dan subsektor restoran sebesar 8,21%.

Salah satu pendorong peningkatan sektor PHR ini adalah terselenggaranya kegiatan yang bersifat nasional yaitu adanya agenda akbar berupa Musyawarah Nasional salah satu partai besar yang telah dilakukan di Pekanbaru pada bulan Oktober yang lalu. Kegiatan ini telah memberikan *multiplier effect* yang besar pada tingkat pemesanan hotel berbintang 3,4, dan 5 di Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang diterima², agenda tersebut telah menyebabkan peningkatan yang signifikan pada tingkat hunian hotel berbintang 3,4, dan 5 (*occupancy rate*) pada bulan Oktober 2009 hingga mencapai 95% yang biasanya hanya 60%.

Subsektor perdagangan eceran memberikan kontribusi terbesar dalam mendorong peningkatan pertumbuhan sektor PHR. Pesatnya transaksi jual beli yang juga didukung oleh daya beli masyarakat Riau yang relatif tinggi, meskipun belum pulih benar pasca krisis keuangan global, telah menjadikan subsektor ini mengalami perkembangan yang cukup pesat.

² Berdasarkan informasi dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Wilayah Riau

Grafik 1.11. Tingkat Hunian Hotel di Riau



Sumber : Survey pada beberapa hotel di Pekanbaru

3.6. Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi masih mengalami pertumbuhan yang positif, namun mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari 7,38% menjadi 6,69% pada triwulan laporan. Perlambatan pada sektor ini utamanya didorong oleh perlambatan pada subsektor pengangkutan terutama angkutan darat yang mempunyai pangsa terbesar pada subsektor pengangkutan.

Peningkatan mobilisasi jumlah penumpang terutama pada perayaan hari besar keagamaan yaitu Hari Natal dan Tahun Baru menjadi faktor pendorong pertumbuhan subsektor ini. Namun demikian, berkurangnya jumlah armada angkutan udara diperkirakan telah berdampak pada perlambatan subsektor ini pada triwulan laporan.

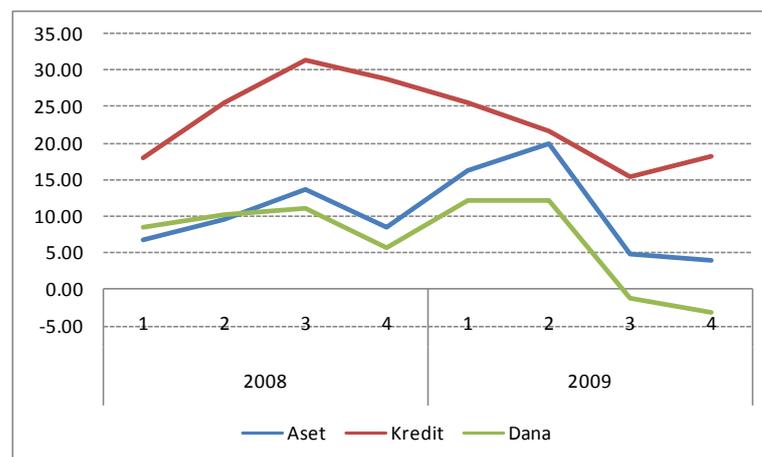
Sementara itu, subsektor pos dan komunikasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari 17,10% pada triwulan III-2009 menjadi 17,84% pada triwulan laporan. Peningkatan pada subsektor pos dan komunikasi didorong oleh meningkatnya penggunaan pulsa dan telepon selular seiring dengan persaingan berbagai *provider* telekomunikasi dalam menawarkan penggunaan pulsa murah. Semakin luas jangkauan jaringan serta kemudahan-kemudahan, serta diskon yang diberikan telah mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan jasa komunikasi.

3.7. Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan

Sektor persewaan & jasa keuangan tercatat masih tumbuh positif yaitu mencapai 8,23%, walau hanya sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,21%. Pertumbuhan sektor ini utamanya didukung oleh pertumbuhan subsektor bank dan subsektor sewa bangunan. Sementara, subsektor lembaga keuangan non bank dan subsektor jasa keuangan hanya memiliki pangsa yang relatif kecil.

Subsektor bank tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,37%, sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 12,32%. Perlambatan ini seiring dengan perlambatan kinerja perbankan Riau pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008, yang masih merupakan dampak dari belum pulihnya kondisi perekonomian Riau, namun sudah mulai menunjukkan kondisi yang mulai membaik dibandingkan triwulan I-2009 yang lalu.

Grafik 1.12. Pertumbuhan Kinerja Perbankan di Provinsi Riau (Aset, Dana, Kredit)



Sumber : Bank Indonesia

3.8. Jasa-jasa

Sektor jasa-jasa pada triwulan IV-2009 tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu dari 7,63% menjadi 8,11%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada pertumbuhan subsektor jasa pemerintahan umum yang tumbuh mencapai 8,25%, namun mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

mencapai 8,51%. Sementara subsektor jasa swasta tumbuh hingga 7,66% dan mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,83%.

Bab 2

PERKEMBANGAN

INFLASI DAERAH

1. Kondisi Umum

Dinamika perekonomian global yang mulai memasuki masa pemulihan sejak triwulan III-2009 telah memberikan atmosfer tersendiri bagi perkembangan ekonomi Riau. Memasuki periode triwulan IV-2009, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang tercermin dari angka PDRB mulai menunjukkan *trend* positif, sebaliknya *trend* pergerakan tingkat harga di Provinsi Riau justru menunjukkan *trend* menurun.

Pergerakan tingkat inflasi tahunan (yoy) di kota Pekanbaru dan Dumai menunjukkan *trend* menurun bahkan berada pada titik terendahnya selama tahun 2009. Inflasi (yoy) di Kota Pekanbaru dan Dumai dalam triwulan laporan masing-masing mencapai 1,94% dan 0,8%, atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi (yoy) nasional yang berada pada angka 2,78%.

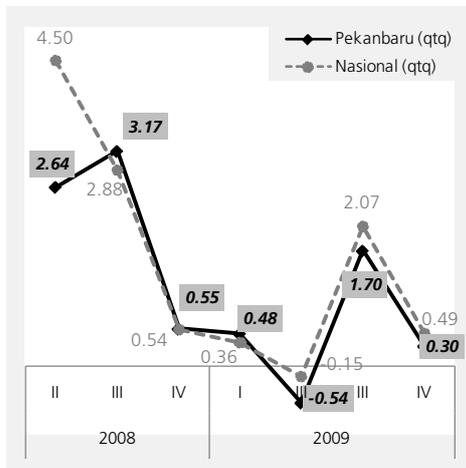
Sementara itu, secara triwulanan (qtq) terjadi inflasi di Kota Pekanbaru yaitu sebesar 0,30% sedangkan di Dumai terjadi deflasi (qtq) sebesar 1,14%. Kondisi ini utamanya dipicu oleh penurunan harga kebutuhan pokok utama, seperti cabe merah dan minyak goreng curah walaupun harga beras mengalami kenaikan. Beberapa faktor lain yang turut berpengaruh adalah tidak adanya tekanan yang cukup kuat dari komoditas barang yang harganya diatur pemerintah (*administered price*). Meskipun demikian, kenaikan harga emas dunia cukup memberikan tekanan inflasi. Di sisi lain, perilaku masyarakat Dumai pada musim libur sekolah yang cenderung berlibur ke luar kota diindikasikan turut menyumbang terjadinya deflasi pada sub kelompok transpor.

2. Perkembangan Indeks Harga Konsumen

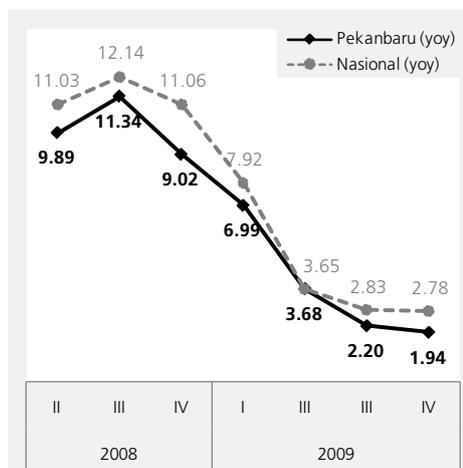
2.1. Kota Pekanbaru

Temuan empiris menunjukkan bahwa tingkat inflasi tahunan (yoy) yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) kota Pekanbaru menunjukkan *trend* menurun bahkan berada pada titik terendah selama tahun 2009 yaitu sebesar 1,94%, lebih kecil dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,78% (Grafik 2.2). Faktor utama penyebab rendahnya inflasi (yoy) dalam triwulan laporan adalah deflasi yang terjadi pada sub kelompok bumbu-bumbuan hingga mencapai 7,8%. Selain itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh lebih baiknya kinerja perekonomian Riau tahun 2008 selaras dengan *booming* harga CPO dunia yang turut mendongkrak pertumbuhan konsumsi masyarakat secara signifikan selama tahun 2008 dibandingkan tahun 2007, sehingga IHK yang terbentuk pada triwulan IV-2008 menjadi relatif tinggi.

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Kota Pekanbaru dan Nasional



Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) Kota Pekanbaru dan Nasional



sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Inflasi triwulanan (qtq) kota Pekanbaru dalam triwulan IV-2009 mencapai 0,30%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III-2009 yang tercatat sebesar 1,70% maupun periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,55%.

Dalam triwulan IV-2009, kelompok IHK bahan makanan mengalami deflasi (qtq) sebesar 0,47% dengan andil mencapai -0,12%. Kelompok IHK lain yang juga tercatat mengalami deflasi (qtq) dalam triwulan laporan adalah kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yaitu sebesar 0,6% dengan andil mencapai -0,09%. Hal ini terlihat kontras dengan kondisi triwulan III-2009 dimana semua kelompok IHK mengalami inflasi (qtq) yang cukup tinggi.

Tabel 2.1. Inflasi (qtq) Menurut Kelompok Barang & Jasa di Kota Pekanbaru Triwulan IV-2009

No	Kelompok	IV-08		I-09		II-09		III-09		IV-09	
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi
1.	Bahan Makanan	0,45	1,84	0,30	1,22	-0,86	-3,47	0,98	4,06	-0,12	-0,47
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,46	2,40	0,44	2,33	0,13	0,69	0,26	1,24	0,25	1,16
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	0,09	0,38	0,00	0,01	0,17	0,79	0,10	0,50	0,09	0,45
4.	Sandang	0,16	2,14	0,27	3,36	-0,12	-1,50	0,14	1,94	0,14	2,02
5.	Kesehatan	0,02	0,46	0,09	1,70	0,11	2,23	0,04	0,73	0,00	0,08
6.	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,01	0,23	0,03	0,68	0,01	0,23	0,10	2,08	0,02	0,18
7.	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	-0,63	-3,70	-0,66	-3,86	0,01	0,07	0,07	0,48	-0,09	-0,60
Umum		0,55		0,48		-0,54		1,70		0,30	

Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Meskipun demikian, sebagian besar kelompok IHK lain tercatat mengalami inflasi (qtq) cukup tinggi terutama kelompok IHK sandang jika dibandingkan dengan triwulan III-2009. Sementara itu, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau juga mengalami inflasi (qtq) yang cukup tinggi pada triwulan IV-2009 yaitu mencapai 1,16%.

Perkembangan sub kelompok IHK yang mengalami inflasi maupun deflasi dalam triwulan IV-2009 ditampilkan pada Tabel 2.4. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sub kelompok IHK yang tercatat mengalami inflasi (qtq) tertinggi dalam triwulan laporan adalah sub kelompok padi, umbi dan hasil-hasilnya dengan angka mencapai 5,53%. Sedangkan deflasi (qtq) tertinggi terjadi pada sub kelompok bumbu-bumbuan yaitu sebesar 6,98%, diikuti oleh sub kelompok lemak dan minyak sebesar 5,03%.

Sementara, sub kelompok lain yang tercatat mengalami inflasi (qtq) cukup tinggi adalah sub kelompok barang pribadi & sandang lainnya serta sarana penunjang transpor yaitu masing-masing sebesar 4,71% dan 2,94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber tekanan inflasi (qtq) dalam triwulan IV-2009 lebih disebabkan oleh komoditas makanan dibandingkan komoditas non makanan.

Tabel 2.2. Perkembangan Sub Kelompok IHK yang Mengalami Inflasi dan Deflasi pada Triwulan IV-2009 di Kota Pekanbaru

Inflasi/ Deflasi	Kisaran Perubahan (Q-t-Q)				
	0,51% - 1%	1,01%-2%	2,01-3%	3,01% - 5%	≥ 5,01%
Inflasi	-Biaya Tempat Tinggal -Kacang-kacangan -Sandang laki-laki	-Ikan Diawetkan -Sandang Anak-anak -Minuman tak beralkohol	-Sarana Penunjang Transpor (2,94%)	- Brg pribadi & Sandang lainnya (4,71%) - Tembakau & M. Beralkohol	- Padi, Umbi dan Hasilnya (5,53%)
Deflasi	- Ikan Segar	- Bhn Makanan Lain	- Daging dan Hasilnya - Buah-buahan	- Komunikasi & Pengiriman	- Bumbu-bumbuan (6,98%) - Lemak & Minyak (5,03%)

sumber : BPS Provinsi, diolah

Beberapa komoditas yang memberikan sumbangan cukup tinggi terhadap perubahan harga (inflasi/deflasi) dalam triwulan laporan terlihat pada Tabel 2.5. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa komoditas cabe merah memberikan kontribusi cukup besar baik terhadap inflasi maupun deflasi. Kontribusi inflasi komoditas cabe merah pada bulan Oktober 2009 mencapai 0,28%. Sedangkan selama bulan November-Desember 2009, komoditas tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,13% dan 0,40%.

Tabel 2.3. Lima (5) Komoditas yang Memberikan Sumbangan Tertinggi Terhadap Perubahan IHK di Kota Pekanbaru Dalam Triwulan IV-2009

No.	Perubahan Harga	Oktober		November		Desember	
		Komoditas	Kontribusi (%)	Komoditas	Kontribusi (%)	Komoditas	Kontribusi (%)
1	INFLASI	Cabe Merah	0,28	Rokok Kretek Filter	0,11	Beras	0,13
2		Beras	0,10	Emas Perhiasan	0,07	Serai	0,1
3		Semen	0,04	Tarif Parkir	0,04	Emas Perhiasan	0,05
4		Pisang	0,02	Bawang Merah	0,04	Sewa Rumah	0,04
5		Cabe Rawit	0,02	Rokok Kretek	0,04	Gula Pasir	0,03
1	DEFLASI	Serai	0,03	Cabe Merah	0,13	Cabe Merah	0,40
2		Angkutan Antar Kota	0,02	Serai	0,11	Telepon Seluler	0,15
3		Minyak Goreng	0,02	Minyak Goreng	0,04	Minyak Goreng	0,04
4		Daging Sapi	0,02	Semen	0,03	Jeruk	0,03
5		Daging Ayam Ras	0,02	Daging Ayam Ras	0,02	Apel	0,02

sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Meskipun terdapat tekanan kenaikan harga pada beberapa kebutuhan pokok utama masyarakat lainnya seperti beras, bawang merah dan gula namun dapat diredam oleh deflasi pada komoditas cabe merah. Artinya pengaruh tekanan penurunan harga atau deflasi pada komoditas cabe merah dalam triwulan laporan lebih dominan dibandingkan kenaikan harga yang terjadi pada komoditas lainnya.

Harga beras dalam triwulan laporan mengalami kenaikan¹ yang dipengaruhi oleh adanya spekulasi mengenai kenaikan HPP beras pada awal Januari 2010 serta efek badai *el-nino*. Meskipun demikian, pasokan beras di Provinsi Riau masih terjaga. Hal ini disebabkan oleh lancarnya distribusi raskin yang disalurkan oleh Bulog dalam triwulan laporan. Rata-rata penyaluran raskin di Provinsi Riau mencapai 6.112 ton/bulan. Sementara itu persediaan beras sampai dengan akhir Desember 2009 mencapai 14.430 ton atau diperkirakan akan cukup sampai dengan 5 (lima) bulan ke depan. Realisasi penyaluran raskin di Provinsi Riau sampai dengan awal September 2009 telah mencapai 97,31% (Tabel 2.4).

¹ Berdasarkan pemantauan BPS Provinsi Riau, rata-rata harga beras di Provinsi Riau pada minggu ke-3 Desember '09 mengalami kenaikan sekitar 7,35% dibandingkan dengan awal Oktober '09.

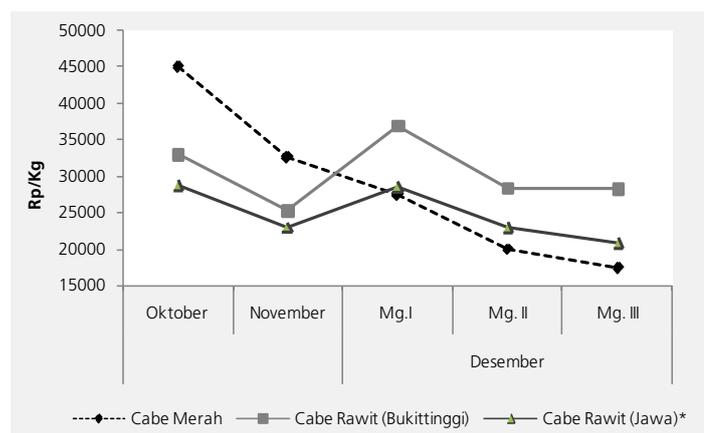
Tabel 2.4. Distribusi Raskin Riau di Pekanbaru

No.	Kabupaten/Kota	Pagu Raskin Tahun 2009		Realisasi s.d. 21-Dec-09	% Terhadap Tahun 2009
		12 Bulan (kg)	1 Bulan (kg)		
1	Kota Pekanbaru	3.159.900	263.325	3.159.900	100
2	Kab. Pelelawan	2.214.360	184.530	2.214.360	100
3	Kota Dumai	1.521.180	126.765	1.521.180	100
4	Kabu. Rokan Hilir	4.604.040	383.670	4.204.500	91,32
5	Kab. Bengkalis	7.191.900	599.325	7.191.900	100
6	Kab. Siak	2.527.740	210.645	2.527.740	100
7	Kab. Indragiri Hilir	9.803.880	816.990	9.181.275	93,65
8	Kab. Indragiri Hulu	5.455.620	454.635	5.202.975	95,37
9	Kab. Kauntan Singingi	2.794.320	232.860	2.760.900	98,80
10	Kab. Kampar	5.599.440	466.620	5.599.440	100
11	Kab. Rokan Hulu	3.743.460	311.955	3.743.460	100
Jumlah		48.615.840	4.051.320	47.307.630	97,31

sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Komoditas bahan makanan yang mengalami fluktuasi harga cukup tinggi dalam triwulan IV-2009 adalah komoditas cabe merah. Secara spesifik, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, **pertama**, terjadinya gempa di Sumatera Barat pada bulan Oktober 2009 yang merupakan salah satu daerah pemasok telah mengakibatkan suplai terganggu sehingga memicu kenaikan harga cabe merah dalam beberapa minggu pertama.² **Kedua**, adanya masa panen raya (*peak crop*) yang terjadi secara serempak di sejumlah sentra penghasil tanaman tersebut mengakibatkan pasokan cabe merah berlebih dan membuat harga rata-rata cabe merah menurun pada bulan November dan Desember 2009 hingga mencapai Rp17.000/Kg di Provinsi Riau.

Grafik 2.3. Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditas Cabe di Pekanbaru



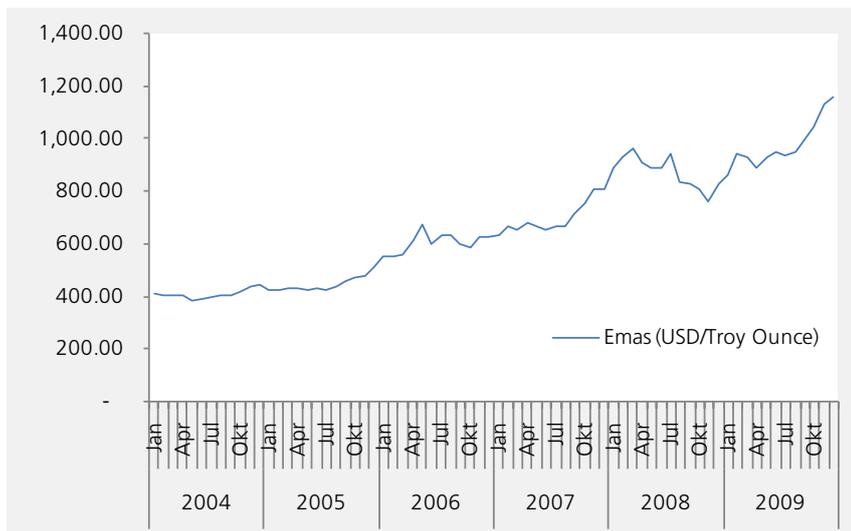
sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

² Hal ini tercermin dari harga rata-rata cabe merah pada bulan awal bulan Oktober 2009 yang sempat menyentuh sekitar Rp45.000/Kg atau naik ±55% dibandingkan akhir September 2009. Gempa yang terjadi di Sumatera Barat telah menimbulkan spekulasi terhadap distribusi pasokan sehingga menyebabkan harga cabe merah melambung tinggi.

Dalam triwulan laporan, harga komoditas bahan pokok lainnya seperti minyak goreng cenderung mengalami deflasi. Pada Tabel 2.5, diketahui bahwa komoditas minyak goreng tercatat memberikan andil deflasi sekitar 0,02% - 0,04%. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga jenis minyak goreng curah yang memiliki porsi lebih besar dalam konsumsi masyarakat dibandingkan dengan minyak goreng kemasan. Selain itu, juga tidak ditemukan adanya gejolak kenaikan pada harga komoditas barang yang diatur oleh pemerintah (*administered price*) seperti harga BBM, minyak tanah dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Sebaliknya, pada bulan November 2009, harga bensin jenis pertamax justru mengalami penurunan sebesar 0,56%.

Kenaikan harga emas dunia diindikasikan juga turut memberikan kontribusi terhadap inflasi triwulan IV-2009 di Kota Pekanbaru. Harga rata-rata emas di pasar dunia dalam triwulan laporan mencapai USD997.57/troy ounce atau mengalami kenaikan sebesar 3,81% (qtq) dan 25,14% (yoy). Sebagaimana kita ketahui, emas perhiasan memiliki kontribusi sekitar 0,05%-0,07% terhadap inflasi bulan November dan Desember di Kota Pekanbaru.

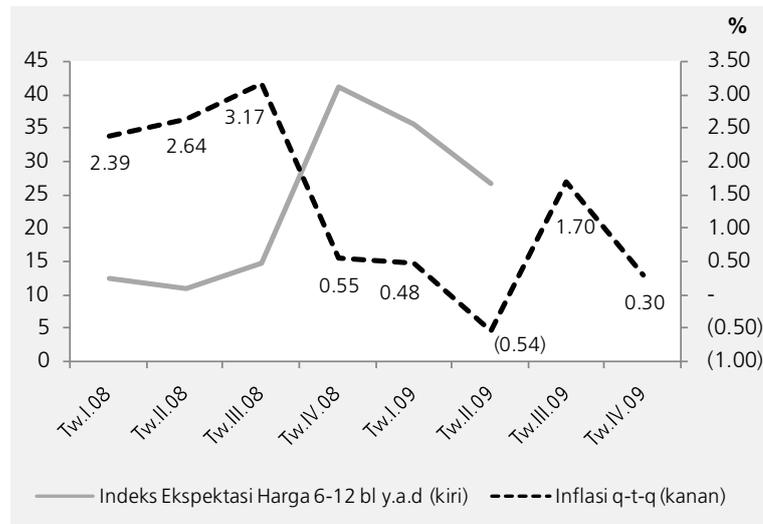
Grafik 2.4. Pergerakan Harga Emas Dunia Tahun 2004-2009



sumber : Bloomberg, diolah

Di sisi lain, peranan ekspektasi harga³ di masyarakat yang berfungsi sebagai indikator pendahulu (*leading indicators*) terhadap pergerakan inflasi (qtq) aktual triwulan IV-2009, menunjukkan hal yang relatif searah meskipun secara keseluruhan belum memiliki korelasi yang cukup baik. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa faktor ekspektasi belum berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan tingkat harga di kota Pekanbaru.

Grafik 2.5. Pergerakan Ekspektasi Harga dan Inflasi (qtq) Aktual



sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia Pekanbaru, diolah

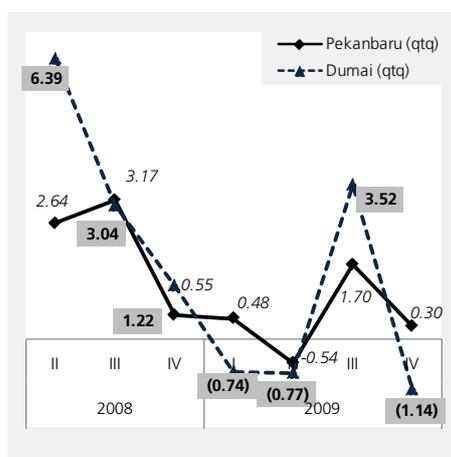
2.2. Inflasi Kota Dumai

Secara umum, perkembangan inflasi di Kota Dumai baik secara triwulanan (qtq) maupun tahunan (yoy) dalam triwulan laporan tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Kota Pekanbaru. Secara tahunan, inflasi (yoy) di Kota Dumai mencapai 0,80%, mengalami penurunan yang signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 14,30% maupun triwulan III-2009 yaitu sebesar 3,22%. Sejalan dengan fenomena inflasi yang terjadi di Kota Pekanbaru, inflasi di Kota Dumai dalam triwulan laporan juga berada pada titik terendah selama tahun 2009.

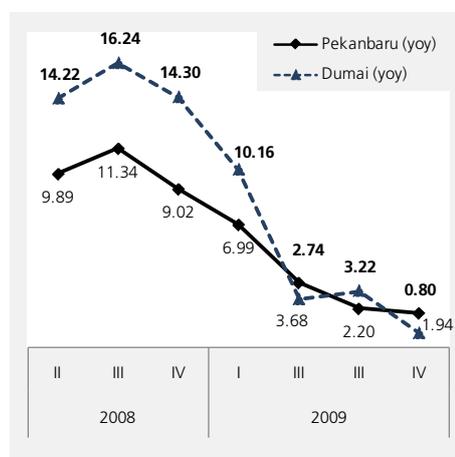
³ Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Pekanbaru.

Sementara itu, inflasi triwulanan (qtq) kota Dumai dalam triwulan IV-2009 tercatat mengalami deflasi sebesar 1,14% atau mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yang tercatat mengalami inflasi sebesar 3,52% maupun periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,22%.

Grafik 2.6 Perkembangan Inflasi Triwulanan (qtq) Kota Pekanbaru dan Kota Dumai



Grafik 2.7 Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) Kota Pekanbaru dan Kota Dumai



Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Menurut kelompoknya, sebagian besar kelompok IHK secara triwulanan mengalami deflasi. Deflasi tertinggi terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 6,82% dan terendah pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yaitu sebesar 0,06%. Sementara, kelompok bahan makanan yang pada triwulan sebelumnya mengalami inflasi cukup tinggi justru mengalami deflasi sebesar 0,43% dalam triwulan IV-2009. Adapun kelompok lain yang tercatat mengalami deflasi dalam triwulan laporan di Dumai adalah kesehatan (0,24) dan pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,14%).

Tabel 2.5. Inflasi (qtq) Kota Dumai Menurut Kelompok

No	Kelompok IHK	2008	2009			
		IV	I	II	III	IV
1.	Bahan Makanan	1,68	-3,23	-1,98	6,53	-0,43
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	3,96	0,38	0,55	1,32	0,91
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	-0,47	0,07	-0,47	-0,04	-0,06
4.	Sandang	2,24	2,92	-1,16	0,61	1,63
5.	Kesehatan	0,44	0,38	1,32	0,80	-0,24
6.	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	1,25	2,13	0,79	-0,04	-0,14
7.	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	-0,58	-1,33	-1,46	8,22	-6,82
Umum		1,22	-0,74	-0,77	3,52	-1,14

sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Inflasi (qtq) hanya terjadi pada kelompok sandang dan makanan, jadi, minuman, rokok dan tembakau masing-masing sebesar 1,63% dan 0,91%. Kondisi ini diperkirakan terjadi akibat adanya hari raya keagamaan natal, sehingga memicu konsumsi makanan jadi dan sandang, disamping didukung oleh adanya hari libur sekolah dan persiapan perayaan menjelang pergantian tahun.

Relatif tingginya deflasi yang terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan diindikasikan akibat beberapa hal seperti menurunnya harga bensin jenis Pertamina dan musim libur yang cukup panjang, sehingga banyak masyarakat Dumai yang berlibur keluar kota. Pada bulan Desember terjadi kenaikan jumlah penumpang sekitar 25% terutama di terminal penumpang Pelabuhan Dumai bila dibandingkan dengan hari biasa. Di sisi lain, sub kelompok bumbu-bumbuan dalam triwulan IV-2009 tercatat mengalami deflasi tertinggi di Kota Dumai yaitu sebesar 10,27%. Kondisi ini secara umum dipicu oleh penurunan harga cabe merah di tingkat nasional terkait dengan musim panen raya.

Tabel 2.6. Perkembangan Sub Kelompok yang Mengalami Perubahan Harga Tertinggi dan Terendah Dalam Triwulan IV-2009 di Kota Dumai

Inflasi/ Deflasi	Kisaran Perubahan (Q-t-Q)				
	0,51% - 1%	1,01%-2%	2,01-3%	3,01% - 5%	≥ 5,01%
Inflasi	-Ikan Diawetkan - Bahan makanan lain	-Sandang wanita -minuman tak beralkohol -Tembakau dan minuman beralkohol	-Padi, umbu dan hasilnya (2,99%)	- Brg pribadi & Sandang lainnya (4,08%)	-Sayur-sayuran (14,92%)
Deflasi	- Perlengkapan/peralatan Pendidikan - Telur, Susu & Hasilnya - Komunikasi & Pengiriman	- Obat-obatan	- Lemak dan minyak (2,37%)	- Ikan segar (3,5%)	- Bumbu-bumbuan (10,27%) - Transport (9,42%) - Daging dan hasilnya (5,49%)

sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Sementara itu, inflasi (qtq) sub kelompok tertinggi dalam triwulan laporan di Kota Dumai terjadi pada sub kelompok sayur-sayuran yaitu sebesar 14,92%. Hal ini erat kaitannya dengan curah hujan yang dirasakan cukup tinggi selama bulan Oktober hingga Desember 2009, dan juga utamanya akibat distribusi komoditas tersebut yang sebagian besar berasal dari Kota Pekanbaru, sehingga terjadi peningkatan biaya (transportasi).

Bab 3

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

1. Kondisi Umum¹

Perkembangan sektor moneter dan dunia perbankan di Provinsi Riau secara umum relatif lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya walaupun Dana Pihak Ketiga (DPK) masih menunjukkan penurunan sebagai akibat dari penurunan dana milik Pemda di perbankan dalam triwulan laporan, sehingga ikut mendorong penurunan aset perbankan di Provinsi Riau. Meskipun demikian dana milik perusahaan swasta mengalami kenaikan secara triwulanan setelah mengalami penurunan secara berturut-turut sejak akhir 2008. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemulihan ekonomi di Provinsi Riau masih berlanjut.

¹ Sumber data perbankan adalah LBU seluruh Bank di Wilayah Kerja KBI Pekanbaru dan diolah oleh Kantor Bank Indonesia Pekanbaru

Di sisi lain, kredit yang disalurkan oleh perbankan Riau dalam triwulan laporan mengalami kenaikan sebesar 4,00% secara triwulanan (qtq), sedangkan pengelolaan risiko kredit yang tercermin pada rasio *Non Performing Loans* (NPLs) menurun menjadi 2,41%. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan juga mengalami kenaikan sebesar 4,78% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 77,98% sejalan dengan tingginya pertumbuhan kredit yang diikuti oleh penurunan dana.

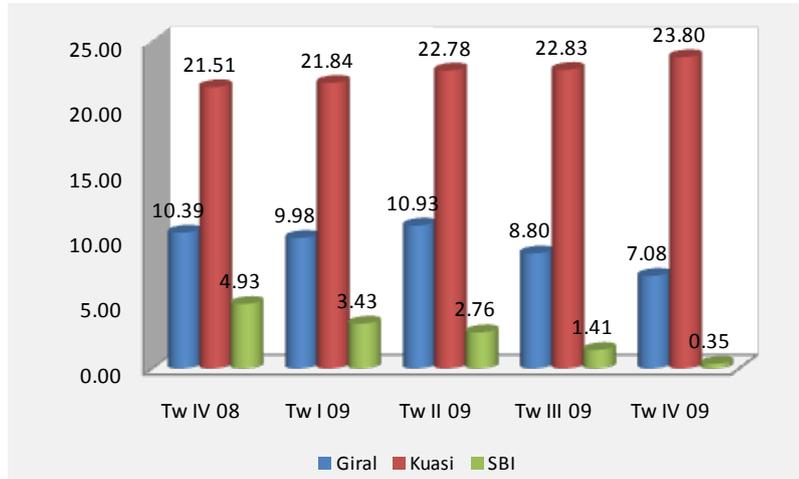
Selama triwulan laporan, Bank Indonesia telah memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate pada tingkat 6,50%. Hal ini didasari pada kecenderungan perekonomian global yang sudah memasuki masa pemulihan serta adanya ekspektasi positif pada pelaku pasar keuangan sehingga mendorong peningkatan arus modal masuk ke Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga memandang bahwa stabilitas tingkat harga masih berlanjut seiring dengan membaiknya harga komoditas internasional dan volatilitas nilai tukar Rupiah yang cukup baik.

2. Perkembangan Moneter

Sampai dengan akhir triwulan laporan, perkembangan indikator moneter di Provinsi Riau relatif menurun yang tercermin dari menurunnya indikator uang beredar seperti giro, deposito dan tabungan. Dalam triwulan laporan, uang giral mengalami penurunan, sementara uang kuasi (tabungan dan deposito) mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jumlah uang giral mengalami penurunan sebesar 19,58% yaitu dari Rp8,79 triliun menjadi Rp7,07 triliun. Penurunan ini seiring dengan menurunnya giro milik Pemda di perbankan Riau. Di sisi lain, uang kuasi mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,25% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp22,83 triliun menjadi Rp23,80 triliun yang utamanya didorong oleh peningkatan komponen tabungan.

Perkembangan tersebut secara umum telah mendorong menurunnya total DPK yang merupakan komponen dari uang beredar yaitu dari Rp31,63 triliun menjadi Rp30,87 triliun atau menurun sebesar 2,38% (qtq). Sementara itu, penempatan dana dalam bentuk SBI juga mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari Rp1,41 triliun (triwulan III-2009) menjadi Rp348,74 miliar (triwulan IV-2009) atau turun sebesar 75,27%.

Grafik 3.1. Perkembangan Uang Kuasi, Giral dan SBI di Provinsi Riau (Rp triliun)



3. Perkembangan Perbankan

Kondisi perbankan di Provinsi Riau dalam triwulan laporan relatif lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit yang diiringi dengan penurunan jumlah kredit non lancar (*Non Performing Loans*) meskipun jumlah aset menurun akibat menurunnya penghimpunan dana oleh perbankan di Riau. Di sisi lain, jumlah jaringan kantor perbankan di Provinsi Riau mengalami penambahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3.1. Bank Umum

3.1.1. Jaringan Kantor

Jumlah bank umum yang beroperasi di Provinsi Riau dalam triwulan laporan tercatat sebesar 39 bank. Penurunan ini terjadi akibat adanya akuisisi salah satu bank di tingkat nasional. Sementara itu, jumlah kantor bank mengalami kenaikan sebanyak 33 kantor yaitu dari 466 kantor menjadi 499 kantor. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah setiap kelompok Kantor Cabang bank, Kantor Cabang

Pembantu, Kantor Kas maupun kantor bank yang berperan sebagai *payment point*, kantor fungsional, kantor layanan syariah, gerai dan kas mobil.

Tabel 3.1. Perkembangan Bank di Propinsi Riau

Keterangan	Periode	
	Tw III 09	Tw IV 09
1. Jumlah Bank	40	39
- Pemerintah	6	6
- Swasta	24	24
- Asing	2	1
- Syariah	3	4
- Unit Usaha Syariah	5	4
2. Kantor Pusat	1	1
3. Kantor Cabang	71	75
- Pemerintah	39	40
- Swasta	30	33
- Asing*)	2	2
4. Kantor Cab.Pembantu	278	297
- Pemerintah	157	170
- Swasta	121	127
- Asing	-	-
5. Kantor Kas	37	41
- Pemerintah	25	27
- Swasta	12	14
6. Lainnya *)	79	85
	466	499

*) *Payment point*, Kantor Fungsional, Kantor Layanan Syariah, Gerai, Kas Mob

Penyebaran kantor bank sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2. masih terpusat di Kota Pekanbaru dengan penambahan jumlah kantor sebanyak 11 unit. Hal ini erat kaitannya dengan potensi dan perkembangan aktivitas ekonomi yang terpusat di ibukota provinsi. Meskipun demikian, jaringan kantor di beberapa kota/kabupaten lainnya dalam triwulan laporan juga mengalami kenaikan yang cukup besar terutama di Kabupaten Siak.

Tabel 3.2. Jaringan Kantor Bank Umum di Provinsi Riau Per Desember 2009

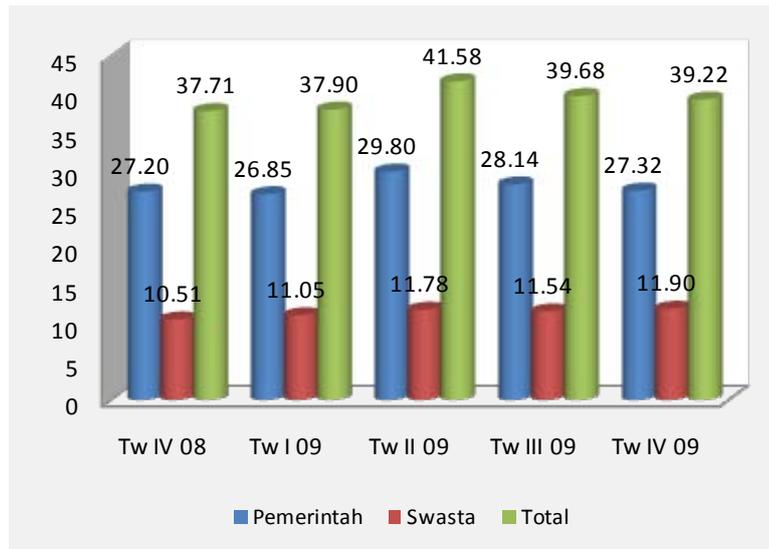
No.	Kab./Kota	Jumlah Kantor Bank Umum di Kabupaten/Kota					Jumlah	kenaikan
		KP	KC	KCP	KK	Lainnya		
1	Pekanbaru	1	43	96	17	38	195	11
2	Bengkalis	-	7	37	3	11	58	0
3	Dumai	-	7	14	3	6	30	3
4	Indragiri Hulu	-	5	16	7	5	33	2
5	Indragiri Hilir	-	4	16	1	4	25	0
6	Kampar	-	2	27	2	3	34	3
7	Kuantan Singingi	-	2	14	2	3	21	2
8	Pelalawan	-	1	20	1	3	25	3
9	Rokan Hulu	-	1	15	1	2	19	1
10	Rokan Hilir	-	2	15	1	2	20	3
11	Siak	-	1	27	3	8	39	5
	Total	1	75	297	41	85	499	33

3.1.2. Perkembangan Aset

Total aset bank umum di Provinsi Riau dalam triwulan laporan mencapai Rp39,22 triliun atau mengalami penurunan sebesar 1,16% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar terjadi pada kelompok bank

milik pemerintah yang tercatat menurun sebesar 0,81% dari Rp28,14 triliun menjadi Rp27,32 triliun. Sedangkan, total aset bank swasta mengalami kenaikan dari Rp11,54 triliun pada triwulan III-2009 menjadi Rp11,90 triliun pada triwulan IV-2009.

Grafik 3.2. Perkembangan Aset Perbankan di Provinsi Riau (Rp triliun)



3.1.3. Kredit

Jumlah kredit yang disalurkan pada triwulan laporan masih terus menunjukkan peningkatan termasuk penyaluran kredit kepada UMKM. Di sisi lain, pengelolaan risiko kredit total dan kredit UMKM di Provinsi Riau mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan angka masing-masing sebesar 2,41% dan 2,36%. Jumlah *undisbursed Loan* dalam triwulan IV-2009 mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh peningkatan pada *undisbursed loan* modal kerja.

3.1.3.1. Perkembangan Penyaluran Kredit

Kredit yang disalurkan oleh bank umum di Provinsi Riau dalam triwulan laporan mencapai Rp24,08 triliun atau tumbuh secara tahunan sebesar 18,34% (yoy). Sementara, penyaluran kredit secara triwulanan (Grafik 3.3) mencapai 4,00% (qtq)

atau relatif melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2009 yang mencapai 4,02% namun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,46%. Pertumbuhan kredit ini utamanya didorong oleh kenaikan penyaluran kredit oleh bank milik pemerintah yaitu dari Rp16,41 triliun menjadi Rp17,10 triliun atau naik 4,24% (qtq). Sedangkan penyakuran kredit oleh bank milik swasta mengalami peningkatan sebesar 3,42%, yaitu dari Rp6,74 triliun menjadi Rp6,97 triliun.

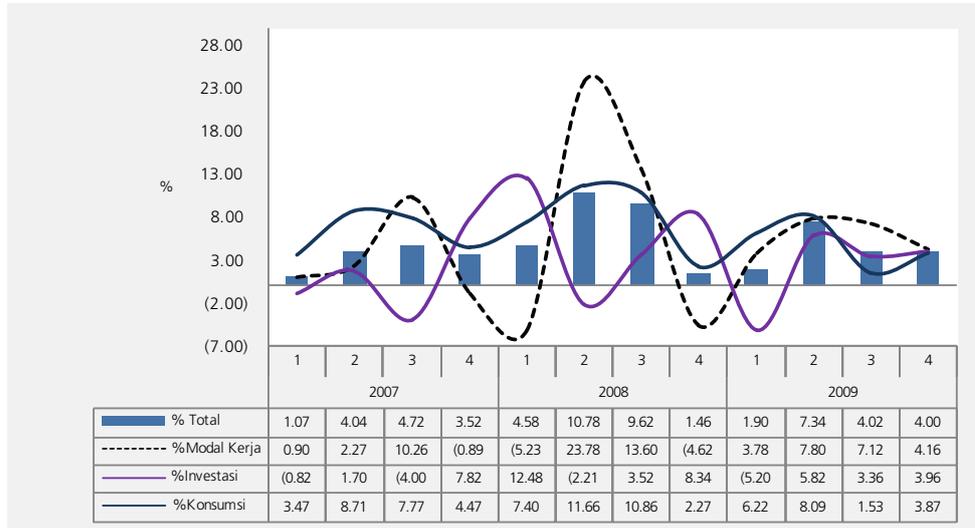
Tabel 3.3. Posisi Kredit Di Provinsi Riau (Rp juta)

Keterangan	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09	Pertumbuhan	
					qtq (%)	yoy (%)
A. Kelompok Bank						
1. Bank Pemerintah	14.597.112	15.760.241	16.410.454	17.106.464	4,24%	22,14%
2. Bank Swasta	6.137.804	6.497.498	6.742.996	6.973.699	3,42%	9,94%
B. Valuta						
1. Rupiah	19.061.239	20.838.352	21.831.824	22.966.045	5,20%	22,83%
2. Valas	1.673.677	1.419.387	1.321.626	1.114.118	-15,70%	-32,55%
C. Total	20.734.916	22.257.739	23.153.450	24.080.163	4,00%	18,34%

Berdasarkan jenis valutanya, penyaluran kredit masih didominasi dalam mata uang rupiah yang tercatat mengalami kenaikan dari Rp21,83 triliun (triwulan III-2009) menjadi Rp22,96 triliun (triwulan IV-2009) atau tumbuh sebesar 5,20% (qtq). Sebaliknya, penyaluran kredit dalam bentuk valas relatif menunjukkan tren menurun. Posisi kredit dalam valuta asing dalam triwulan laporan mengalami penurunan sebesar 15,70% (qtq), yaitu dari Rp1,32 triliun menjadi Rp1,14 triliun.

Sementara itu, kredit modal kerja dalam triwulan laporan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 4,16% (qtq) diikuti kredit investasi sebesar 3,96% (qtq). Pertumbuhan kredit konsumsi dalam triwulan laporan mencatat kenaikan sebesar 2,34% dibandingkan triwulan sebelumnya (1,53%). Pemulihan ekonomi global yang mulai berlangsung sejak akhir semester I-2009 diindikasikan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dan daya beli masyarakat di Riau sehingga ikut mendorong pertumbuhan kredit di Provinsi Riau.

Grafik 3.3. Pertumbuhan Kredit Triwulanan (qtq) Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Riau Tahun 2007-2009

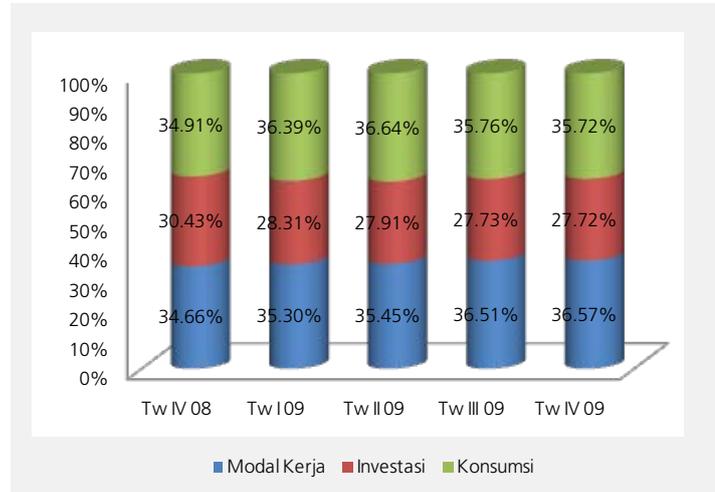


3.1.3.2. Konsentrasi Kredit

Penyaluran kredit menurut sisi penggunaan dalam triwulan laporan masih terkonsentrasi pada kredit modal kerja dengan angka mencapai Rp8,80 triliun atau sekitar 36,57% dari total kredit keseluruhan. Posisi penyaluran kredit modal kerja dalam triwulan IV-2009 lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yang mencapai Rp8,45 triliun.

Komposisi kredit modal kerja menurut sektor ekonomi di Provinsi Riau dalam triwulan laporan relatif tidak berubah, dimana pangsa terbesar kredit modal kerja masih disalurkan kepada subsektor perdagangan eceran yaitu sebesar Rp2,98 triliun atau sekitar 33,85% dari kredit modal kerja, diikuti oleh subsektor perkebunan yaitu Rp1,56 triliun atau 17,74%, dan subsektor jasa lainnya (seperti sewa beli barang/leasing, gedung kantor, dan lain-lain) yang mencapai Rp794,15 miliar atau 9,02% dari kredit Modal Kerja.

Grafik 3.4. Pangsa Kredit Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Riau



Kredit investasi mengalami kenaikan sebesar 3,96% dari Rp6,42 triliun menjadi Rp6,67 triliun. Sebagian kredit investasi disalurkan ke subsektor tanaman perkebunan dengan angka mencapai Rp2,33 triliun atau sekitar 35,03% dari total kredit investasi, diikuti oleh subsektor perdagangan eceran dan subsektor jasa lainnya (seperti sewa beli barang/leasing, gedung kantor, dan lain-lain) yaitu masing-masing sebesar Rp745,85 miliar dan Rp591,75 miliar atau dengan pangsa masing-masing sebesar 11,17% dan 8,87% dari total kredit. Meskipun demikian, nilai kredit investasi di sub sektor industri kertas yang umumnya menduduki posisi tiga terbesar dalam pangsa kredit investasi mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari Rp549,86 miliar menjadi Rp466,65 miliar. Hal ini diindikasikan akibat belum membaiknya kinerja industri kertas di Provinsi Riau terkait dengan pasokan bahan baku sejak adanya peraturan mengenai penebangan kayu ilegal.

Kredit konsumsi juga mengalami kenaikan dari Rp8,28 triliun menjadi Rp8,60 triliun, namun pangasanya mengalami penurunan dari 35,76% menjadi 35,72%. Sebagian besar kredit konsumsi disalurkan kepada sub sektor lainnya seperti kendaraan dan elektronik dengan angka mencapai Rp5,03 triliun. Sedangkan sisanya sekitar 41,31% atau Rp3,55 triliun merupakan kredit yang disalurkan untuk

perumahan. Tingginya pangsa kredit konsumsi untuk sub sektor perumahan mengindikasikan kebutuhan masyarakat akan perumahan masih cukup tinggi.

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, kredit masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan yang mencapai 23,75% dari total kredit atau sebesar Rp5,71 triliun, mengalami peningkatan 4,40% dibandingkan triwulan sebelumnya. Sebagian besar kredit tersebut yaitu Rp3,72 triliun (66,13%) merupakan kredit yang disalurkan kepada subsektor perdagangan eceran.

Tabel 3.4. Kredit Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Riau (Rp juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09	Pertumbuhan (%)	
						qtq	yoy
1	Pertanian	3.828.840	4.158.900	4.374.625	4.459.132	1,93	13,40
2	Pertambangan	98.736	88.722	67.500	69.319	2,69	-28,28
3	Perindustrian	1.650.967	1.646.813	1.595.625	1.526.552	-4,33	-8,71
4	Listrik, Gas dan Air	11.748	9.203	38.932	54.190	39,19	370,64
5	Konstruksi	761.886	871.547	1.067.470	919.412	-13,87	12,44
6	Perdag., Resto. & Hotel	4.870.734	5.225.205	5.478.223	5.719.076	4,40	22,38
7	Pengangkutan, Pergud.	416.630	436.693	455.370	568.182	24,77	36,38
8	Jasa-jasa	1.534.564	1.649.491	1.781.217	2.151.359	20,78	33,54
9	Lain-lain	7.560.811	8.171.165	8.294.488	8.612.941	3,84	21,02
Jumlah		20.734.916	22.257.739	23.153.450	24.080.163	4,00	18,34

Sektor lain yang juga menyerap kredit cukup besar adalah pertanian yaitu sebesar Rp4,45 triliun atau mencapai 18,52% dari total kredit. Dari jumlah tersebut, sekitar 87,5% diserap oleh sub sektor tanaman perkebunan dengan angka mencapai Rp3,90 triliun atau naik Rp12 miliar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Besarnya penyaluran kredit kepada sub sektor tersebut sejalan dengan keunggulan komparatif pada tanaman perkebunan seperti kelapa, kelapa sawit dan karet yang berada di Provinsi Riau serta semakin prospektifnya peluang pengembangan tanaman perkebunan pasca penetapan Riau sebagai salah satu pusat kluster industri sawit di Indonesia. Permintaan kredit di sub sektor ini digunakan baik untuk kebutuhan pembukaan kebun baru maupun peremajaan (*replanting*).

Kredit kepada sektor industri dalam triwulan laporan tercatat mengalami penurunan sebesar 4,33% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari Rp1,59 triliun menjadi Rp1,52 triliun. Kondisi ini utamanya dipicu oleh menurunnya

penyaluran kredit kepada sub sektor industri kertas dari Rp640,82 miliar pada triwulan III-2009 menjadi Rp544,07 triliun pada triwulan IV-2009. Penyaluran kredit kepada sub sektor industri makanan juga mengalami penurunan sebesar 6,85% (qtq) dari Rp640,82 miliar menjadi Rp544,07 miliar.

Tabel 3.5. Distribusi Penyaluran Kredit Per Dati II di Provinsi Riau (Rp juta)

No	Kab./Kota	Lokasi Proyek di Provinsi Riau				
		Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09*)
1	Pekanbaru	14.512.072	14.467.568	14.606.825	14.612.889	14.788.634
2	Bengkalis	1.972.309	2.030.110	2.059.619	2.000.410	2.048.200
3	Dumai	3.022.535	2.584.773	2.442.175	3.120.486	3.477.519
4	Indragiri Hilir	1.761.130	1.659.432	1.643.492	1.653.851	1.668.547
5	Indragiri Hulu	1.409.197	1.257.370	1.343.483	1.617.013	2.010.072
6	Lainnya	9.329.665	9.245.006	10.227.809	10.573.240	10.787.977
Jumlah		32.006.908	31.244.259	32.323.403	33.577.889	34.780.949

*) data sampai dengan November 2009

Sementara itu, jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek², sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5 di atas, mencapai Rp34,78 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 3,58% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi kredit berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan posisi kredit berdasarkan lokasi bank, yang berarti sebagian kegiatan usaha di Riau yaitu sebesar Rp10,70 triliun dibiayai oleh perbankan di luar Provinsi Riau. Pemberian kredit ini utamanya terjadi pada kredit berskala besar, karena terkait dengan batasan kewenangan memutus kredit oleh pimpinan bank di Provinsi Riau. Pertumbuhan kredit lokasi proyek tertinggi dalam triwulan laporan berada di Kabupaten Indragiri Hulu yang mencapai 29,26% diikuti oleh Kota Dumai sebesar 11,44%.

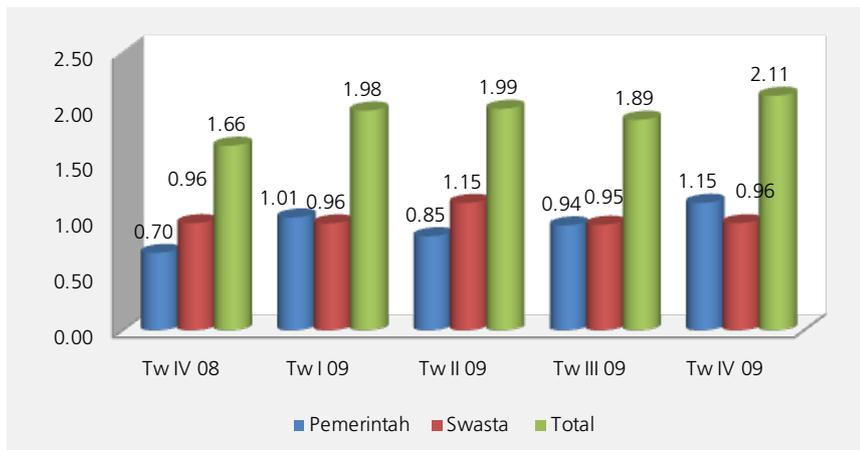
3.1.3.3. *Undisbursed Loan* dan Persetujuan Kredit Baru

Jumlah *undisbursed loan* (kredit yang belum ditarik) pada triwulan laporan mengalami kenaikan sebesar 11,42% dibandingkan triwulan sebelumnya dari Rp1,89 triliun menjadi Rp2,10 triliun. Kenaikan jumlah *undisbursed loan* terjadi pada seluruh kelompok bank baik milik pemerintah maupun swasta. Jumlah kredit yang belum ditarik pada kelompok bank milik pemerintah meningkat 23,44% dari

² Kredit yang persetujuannya berasal dari luar wilayah perbankan Riau, namun pelaksanaan proyek dari persetujuan tersebut dilaksanakan di wilayah Riau.

Rp943,50 miliar menjadi Rp1,14triliun, sedangkan jumlah kredit yang belum ditarik pada kelompok bank milik swasta meningkat 1,34% dari Rp949,58 miliar menjadi Rp962,85 miliar. Berdasarkan jenis penggunaannya, sebagian besar (81,79%) dari total kredit yang belum ditarik merupakan kredit modal kerja. Sedangkan porsi kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing mencapai 14,05% dan 4,16%.

Grafik 3.5. Jumlah *Undisbursed Loan* Perbankan Provinsi Riau (Rp triliun)



Sementara itu, posisi persetujuan kredit baru dalam triwulan laporan mencapai Rp3,61 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 9,89% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Persetujuan kredit baru pada triwulan laporan masih tetap didominasi oleh kredit konsumsi dengan jumlah mencapai Rp1,71 triliun atau mencakup sekitar 31,36% terhadap persetujuan kredit baru. Sedangkan persetujuan baru kredit modal kerja relatif menurun baik secara triwulanan maupun tahunan. Secara triwulanan, persetujuan baru kredit modal kerja menurun sebesar 8,97% (qtq) dari Rp1,18 triliun menjadi Rp1,07triliun, sedangkan secara tahunan jumlah ini tercatat mengalami penurunan sebesar 1,02%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha di provinsi Riau lebih cenderung untuk melakukan ekspansi usaha melalui investasi dibandingkan dengan menambah modal kerja.

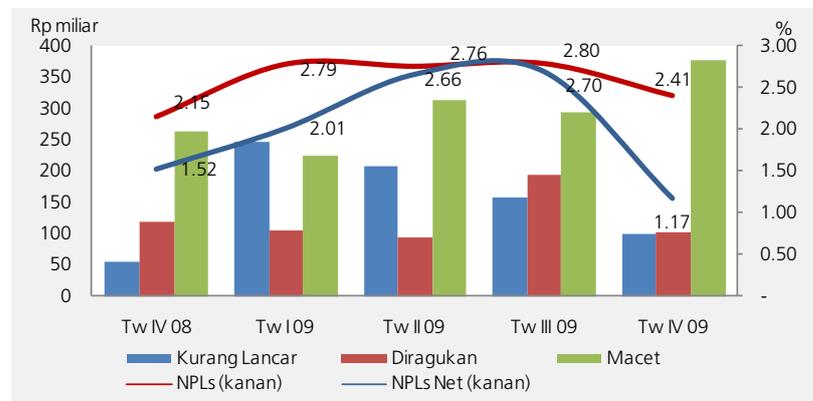
Tabel 3.6. Persetujuan Kredit Baru di Provinsi Riau (Rp Juta)

Jenis Penggunaan	Tw IV 08		Tw I 09		Tw II 09		Tw III 09		Tw IV 09	
	Jumlah	%								
1. Modal Kerja	1.087.244	38,57	862.065	34,09	1.075.409	35,92	1.182.294	35,95	1.076.207	29,78
2. Investasi	563.297	19,98	450.161	17,80	448.324	14,97	801.247	24,36	823.243	22,78
3. Konsumsi	1.168.539	41,45	1.216.468	48,11	1.470.403	49,11	1.305.427	39,69	1.714.822	47,45
Jumlah	2.819.080	100	2.528.694	100	2.994.136	100	3.288.968	100	3.614.272	100

3.1.3.4. Risiko Kredit

Pengelolaan Risiko kredit dalam triwulan laporan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercermin dari menurunnya *Non Performing Loans* (NPLs) dari 2,80% menjadi 2,41%. Dengan memperhitungkan pembentukan pencadangan aktiva produktif (PPAP), rasio NPLs *net* perbankan dalam triwulan laporan juga tetap mengalami penurunan risiko dari 2,70% menjadi 1,17%.

Grafik 3.6. Perkembangan NPLs Gross di Provinsi Riau



Berdasarkan Tabel 3.7, dapat diketahui sebaran NPLs untuk masing-masing sektor di Provinsi Riau. Sektor industri dan perdagangan tercatat memiliki NPLs tertinggi dalam triwulan laporan yaitu masing-masing mencapai 4,18% dan 3,49%, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 2,70%, sektor pertanian sebesar 2,51% dan sektor jasa dunia usaha sebesar 2,34%. Sementara itu, NPLs terendah dalam triwulan laporan berada pada sektor pertambangan yaitu sebesar 0,05%.

Tabel 3.7. NPLs Per Sektor Ekonomi Di Provinsi Riau (Rp Juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tw IV 08*)		Tw I 09		Tw II 09		Tw III 09		Tw IV 09	
		Jumlah	NPL								
1	Pertanian	3.932.236	2,29%	3.828.840	1,84%	4.158.900	3,32%	4.374.625	3,11%	4.459.132	2,51%
2	Pertambangan	96.653	0,04%	98.736	0,36%	88.722	0,37%	67.500	0,49%	69.319	0,05%
3	Perindustrian	1.672.153	6,71%	1.650.967	5,83%	1.646.813	4,12%	1.595.625	3,92%	1.526.552	4,18%
4	Listrik	11.514	0,00%	11.748	0,00%	9.203	4,97%	38.932	1,16%	54.190	0,07%
5	Konstruksi	817.718	2,31%	761.886	7,02%	871.547	4,81%	1.067.470	4,00%	919.412	2,70%
6	Perdagangan	4.673.397	1,58%	4.870.734	3,54%	5.225.205	3,27%	5.478.223	3,58%	5.719.076	3,49%
7	Pengangkutan	416.621	2,95%	416.630	3,75%	436.693	2,43%	455.370	2,47%	568.182	0,19%
8	Jasa Dunia Usaha	1.380.628	2,58%	1.307.612	3,71%	1.388.295	3,10%	1.527.307	2,93%	1.887.737	2,34%
9	Jasa Sosial Masy.	230.366	0,11%	226.952	0,23%	261.196	0,25%	253.910	0,49%	263.622	0,75%
10	Lain-lain	7.117.194	1,32%	7.560.811	1,60%	8.171.165	1,72%	8.294.488	1,89%	8.612.941	1,53%
Jumlah		20.348.480		20.734.916		22.257.739		23.153.450		24.080.163	

*) angka koreksi

Berdasarkan Kabupaten/Kota, rasio NPLs tertinggi terdapat pada Kota Pekanbaru, yaitu sebesar 3,51%, dan mengalami penurunan kualitas dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,47%, diikuti Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir masing-masing sebesar 2,09% dan 1,70%. Selanjutnya, NPLs Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hulu masing masing sebesar 1,35% dan 0,70%.

Tabel 3.8. NPLs Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09
1	Pekanbaru	2,64%	3,44%	3,47%	3,51%	3,08%
2	Dumai	2,08%	0,91%	2,55%	2,09%	1,37%
3	Bengkalis	1,07%	2,92%	1,32%	1,35%	0,93%
4	Indragiri Hulu	0,26%	1,32%	0,59%	0,70%	0,43%
5	Indragiri Hilir	0,92%	0,35%	1,25%	1,70%	1,45%
6	Lainnya	0,67%	1,04%	0,79%	0,96%	0,81%

3.1.4. Kondisi Likuiditas

Pada triwulan laporan, komponen giro dan deposito mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sementara komponen tabungan mengalami peningkatan. Namun secara keseluruhan, dana yang dihimpun mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, alat

likuid perbankan juga mengalami penurunan yang didorong oleh penurunan komponen SBI, sementara komponen kas mengalami peningkatan.

3.1.4.1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Struktur DPK dalam triwulan laporan masih didominasi oleh komponen tabungan (49,94%), diikuti oleh deposito dan giro masing sebesar 22,91% dan 27,14%. Dalam triwulan laporan, DPK di Provinsi Riau mencapai Rp30,87 triliun atau turun sebesar 2,38% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan jumlah giro dan deposito yang dihimpun perbankan Riau dalam triwulan laporan dengan penurunan (qtq) masing-masing sebesar 19,58% dan 8,58%. Berdasarkan Tabel 3.9, penurunan deposito utamanya didorong oleh penurunan pada komponen deposito berjangka waktu s.d 3 bulan yang tercatat menurun dari Rp7,53 triliun menjadi Rp7 triliun.

Tabel 3.9. Perkembangan Dana Pihak Ketiga di Provinsi Riau (Rp miliar)

Komponen DPK	Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09
1 Giro	10.385	9.979	10.925	8.798	7.075
2 Tabungan	13.258	12.567	13.166	13.665	15.422
3 Deposito	8.250	9.271	9.619	9.167	8.381
a. s.d 3 bln	6.585	7.779	7.960	7.532	7.005
b. > 3-6 bln	716	755	809	812	885
c. > 6-12 bln	441	497	470	460	415
d. > 12 bln	508	240	381	363	76
Total DPK	31.893	31.817	33.710	31.631	30.878

Meskipun dalam triwulan laporan komponen giro dan deposito mengalami penurunan, namun penghimpunan tabungan masih menunjukkan kenaikan sebagaimana yang terjadi dalam triwulan-triwulan sebelumnya. Nilai penghimpunan tabungan dalam triwulan laporan mencapai Rp15,42 triliun atau meningkat 12,85% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Struktur DPK di Provinsi Riau menurut kepemilikan cenderung tidak berubah dibandingkan periode-periode sebelumnya (Tabel 3.10). Dalam triwulan laporan, kepemilikan DPK masih didominasi oleh perorangan dengan nilai mencapai Rp22,33 triliun atau mencakup sekitar 72,34% terhadap total DPK perbankan di

Provinsi Riau dan mengalami kenaikan sebesar 8,59% dibandingkan triwulan sebelumnya. Disamping dana milik perseorangan, porsi kepemilikan dana milik Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta juga tercatat cukup besar dengan nilai masing-masing mencapai Rp6,27 triliun (10,44%) dan Rp3,26 triliun (10,59%).

Tabel 3.10. Sebaran DPK Menurut Kepemilikan di Provinsi Riau (Rp Juta)

Kepemilikan	Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09
Pemerintah Pusat	330.521	356.426	579.844	321.636	335.002
Pemerintah Daerah	7.293.375	7.855.734	8.400.682	6.269.753	3.222.936
Badan/ Lembaga Pemerintah	34.547	28.069	20.165	15.288	122.683
Badan Usaha Milik Negara	332.593	413.873	622.347	367.557	307.900
Badan Usaha Milik Daerah	119.088	75.320	70.956	50.666	58.450
Perusahaan Asuransi	199.754	204.994	217.774	225.598	240.119
Perusahaan Swasta	2.988.270	2.808.640	2.719.012	3.019.100	3.268.819
Yayasan dan Badan Sosial	221.073	214.370	238.211	252.088	274.321
Koperasi	203.259	196.007	200.280	191.596	269.518
Perorangan	19.704.384	19.402.295	20.257.079	20.569.058	22.336.306
Lainnya	455.901	248.823	371.849	343.133	436.688
Bukan Penduduk	9.999	12.864	11.549	5.259	5.300
Jumlah	31.892.764	31.817.415	33.709.748	31.630.732	30.878.042

Dana milik Pemerintah Daerah (Pemda) secara spesifik dalam triwulan laporan turun sebesar 48,60% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kondisi ini diperkirakan terkait dengan penyerapan belanja anggaran Pemda dan juga dipengaruhi oleh pembayaran proyek-proyek pemerintah yang jatuh pada akhir tahun. Meskipun demikian, dana milik perusahaan swasta tercatat mengalami kenaikan triwulanan sebesar 8,27% (qtq). Hal diindikasikan seiring dengan masa pemulihan (*recovery*) ekonomi global yang terjadi sejak triwulan III-2009 sehingga ikut memberikan pengaruh positif bagi pendapatan perusahaan swasta yang beroperasi di Provinsi Riau dan mendorong peningkatan penghimpunan dana. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.10, dana milik pemerintah swasta dalam triwulan III dan IV 2009 berada dalam kecenderungan meningkat. Hal tersebut terlihat kontras dengan perkembangan triwulan I dan II 2009 yang cenderung menurun akibat krisis global pada triwulan IV 2008.

Klasifikasi DPK perbankan Riau dalam triwulan laporan mengalami perubahan struktural dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya. Porsi DPK terbesar dalam

triwulan laporan terdapat pada kelompok dana Rp100 juta sampai < Rp250 juta dengan angka mencapai Rp6,29 triliun atau naik 11,27% (qtq). Kondisi ini relatif berbeda dari triwulan-triwulan sebelumnya, dimana kelompok dana \geq Rp10 triliun yang cenderung memiliki pangsa terbesar justru mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp7,89 triliun menjadi Rp4,77 triliun. Hal ini tentunya menyebabkan penghimpunan dana perbankan Riau secara umum menurun meskipun terdapat kenaikan pada kelompok dana lainnya (Tabel 3.11).

Sementara, jumlah rekening dana di perbankan Riau dalam triwulan IV-2009 tercatat mengalami kenaikan sebesar 6,38% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 3.11). Peningkatan jumlah rekening ini utamanya didorong oleh peningkatan pada kelompok rekening dana Rp1 juta s.d. < Rp10 juta, yaitu sebesar 15.965 rekening (28,94%).

Tabel 3.11. Penghimpunan DPK Berdasarkan Kelompok Nominal di Provinsi Riau

Klasifikasi DPK	Tw IV 08		Tw I 09		Tw II 09		Tw III 09		Tw IV 09	
	Jumlah	Jumlah								
	Rekening	DPK (Rp)								
< Rp.1 juta	1.152.696	707.586	1.084.786	680.841	1.088.541	699.968	1.119.544	704.955	1.108.909	677.483
Rp.1 juta s.d. < Rp.10 juta	281.490	846.320	320.633	861.937	342.004	921.834	357.969	1.038.189	461.555	1.254.093
Rp.10 juta s.d. < Rp.50 juta	240.191	5.185.639	246.267	5.268.116	252.607	5.361.002	250.759	5.376.183	267.382	5.950.256
Rp.50 juta s.d. < Rp.100 juta	32.486	2.176.981	25.539	1.777.137	25.626	1.752.360	25.648	1.835.150	26.769	1.881.010
Rp.100 juta s.d. < Rp.250 juta	29.855	5.428.292	29.367	5.211.195	32.148	5.708.569	32.860	5.655.391	35.881	6.292.850
Rp.250 juta s.d. < Rp.1.000 juta	10.779	4.562.287	10.233	4.422.438	9.847	4.228.414	9.946	4.256.871	10.933	4.678.369
Rp.1.000 juta s.d. < Rp.10.000 juta	2.138	4.546.185	2.043	4.182.109	2.239	5.027.855	2.307	4.871.216	2.460	5.367.172
\geq Rp.10.000 juta	190	8.439.474	184	9.413.642	211	10.009.746	172	7.892.777	138	4.776.809
Total	1.749.825	31.892.764	1.719.052	31.817.415	1.753.223	33.709.748	1.799.205	31.630.732	1.914.027	30.878.042

Di sisi lain, distribusi penghimpunan DPK menurut Kabupaten/Kota dalam triwulan laporan relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya dimana Kota Pekanbaru masih merupakan wilayah penghimpunan DPK terbesar dengan jumlah mencapai Rp20,42 triliun atau sekitar 66,14% dari total DPK (Tabel 3.12). Kabupaten dan kota lain yang tercatat memiliki porsi penghimpunan DPK cukup besar diantaranya adalah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai yaitu masing-masing sebesar 7,56% dan 7,48%.

Tabel 3.12. Penghimpunan DPK Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw IV 08		Tw I 09		Tw II 09		Tw III 09		Tw IV 09	
		Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%
1	Pekanbaru	18.905.421	59,278	19.136.165	60,14	20.389.837	60,49	19.941.959	63,05	20.422.559	66,14
2	Bengkalis	3.312.483	10,39	3.204.953	10,07	3.470.833	10,30	2.919.129	9,23	2.334.479	7,56
3	Dumai	2.107.987	6,61	2.150.957	6,76	2.144.671	6,36	2.151.634	6,80	2.310.695	7,48
4	Indragiri Hilir	1.027.731	3,22	1.075.275	3,38	1.056.587	3,13	955.178	3,02	943.145	3,05
5	Indragiri Hulu	1.394.986	4,37	1.037.360	3,26	1.133.827	3,36	1.084.702	3,43	1.094.964	3,55
6	Lainnya	5.144.156	16,13	5.212.705	16,38	5.513.993	16,36	4.578.130	14,47	3.772.200	12,22
Jumlah		31.892.764	100	31.817.415	100	33.709.748	100	31.630.732	100	30.878.042	100

3.1.4.2. Rasio Alat Likuid

Jumlah alat likuid perbankan Riau yang terdiri dari Kas dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam triwulan laporan tercatat sebesar Rp1,67 triliun atau menurun 48,91% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini terjadi akibat adanya penurunan komponen SBI yang cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu dari Rp1,41 triliun menjadi Rp348,74 miliar atau turun sekitar 75,27% (qto). Komponen kas dalam triwulan laporan juga tercatat mengalami penurunan sebesar 28,92% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu dari Rp1,85 triliun (triwulan III-2009) menjadi Rp1,32 triliun (triwulan IV-2009).

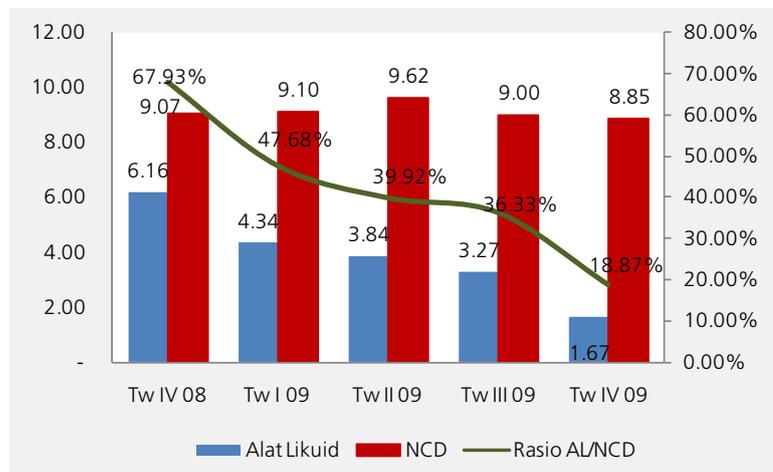
Sementara itu, jumlah *Non Core Deposit* (NCD)³ perbankan Riau pada triwulan IV-2009 mengalami penurunan sebesar 1,64% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp8,99 triliun menjadi Rp8,85 triliun (Tabel 3.13). Kondisi ini secara umum disebabkan oleh penurunan DPK perbankan. Penurunan NCD pada triwulan laporan utamanya disebabkan oleh penurunan pada komponen giro dan deposito sampai dengan 3 bulan yaitu masing-masing sebesar 19,58% dan 6,99%. Sedangkan komponen NCD yang berasal dari tabungan mengalami peningkatan sebesar 12,85% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

³ Non Core Deposit merupakan dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 30% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

Tabel 3.13. Perkembangan Alat Likuid dan *Non Core Deposit*

Alat Likuid	Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09
Kas	1.229.837	909.600	1.077.535	1.859.250	1.321.470
SBI	4.930.041	3.427.780	2.761.001	1.410.106	348.742
Jumlah	6.159.878	4.337.380	3.838.536	3.269.356	1.670.212
Non Core Deposit (NCD)	Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09
Giro (30%)	3.115.502	2.993.726	3.277.550	2.639.542	2.122.598
Tabungan (30%)	3.977.405	3.770.165	3.949.726	4.099.494	4.626.477
Dep 1-3 bln (30%)	1.975.521	2.333.684	2.387.878	2.259.543	2.101.578
NCD	9.068.427	9.097.574	9.615.153	8.998.579	8.850.653

Dengan perkembangan tersebut di atas, maka rasio alat likuid terhadap NCD dalam triwulan laporan mengalami penurunan, yaitu dari 36,33% (triwulan III-2009) menjadi 18,87% (triwulan IV-2009). Kondisi ini mencerminkan adanya penurunan kondisi likuiditas perbankan di Provinsi Riau terutama akibat menurunnya penghimpunan dana jangka panjang.

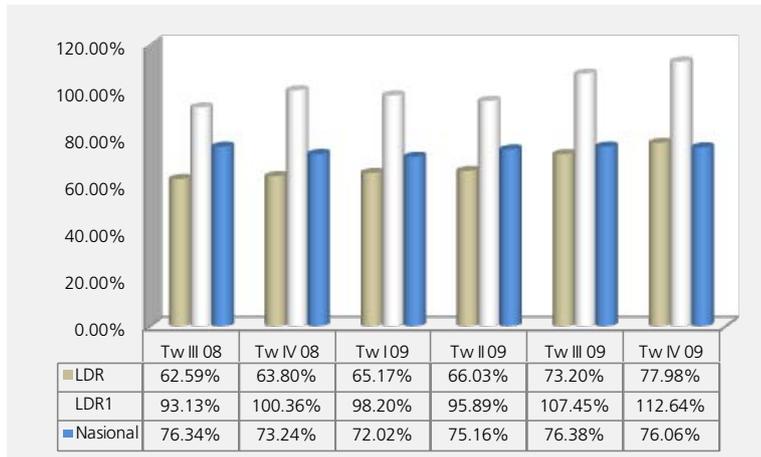
Grafik 3.7. Perkembangan Rasio Alat Likuid Terhadap *Non Core Deposit*

3.1.5. Intermediasi Perbankan

3.1.5.1. Perkembangan LDR

Penghimpunan dana perbankan di Provinsi Riau dalam triwulan laporan sebagaimana diketahui mengalami penurunan sebesar 2,38% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang didorong oleh penurunan dana milik pemerintah daerah. Sedangkan dana milik perorangan yang menguasai pangsa terbesar dan dana milik perusahaan swasta mengalami kenaikan masing-masing sebesar 8,59% (qtq) dan 8,27% (qtq).

Grafik 3.8. Perkembangan LDR Di Provinsi Riau



Dengan perkembangan tersebut, menurunnya jumlah DPK disertai dengan peningkatan jumlah penyaluran kredit menyebabkan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan Riau dalam triwulan laporan mengalami peningkatan dari 73,20% menjadi 77,98%. Sementara, dengan memperhitungkan kredit berdasarkan lokasi proyeknya⁴, LDR perbankan Riau dalam triwulan laporan mencapai 112,64%, atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 107,45% dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan LDR nasional⁵ yang tercatat sebesar 76,06%.

⁴ data November 2009

⁵ data November 2009

3.1.5.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM

Penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam triwulan laporan menunjukkan peningkatan. Jumlah kredit yang telah disalurkan kepada UMKM dalam triwulan mencapai Rp18,10 triliun, meningkat 4,26% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit skala menengah (> Rp500 juta – Rp5 miliar) yang tercatat meningkat sebesar 5,87% dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,54 triliun diikuti oleh kredit skala kecil (> Rp50 juta - Rp500 juta) yang memiliki pangsa terbesar dalam kredit UMKM dengan kenaikan sebesar 4,80%.

Tabel 3.14. Perkembangan Kredit UMKM di Provinsi Riau (Rp Juta)

Plafon	Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09
Kredit Mikro (Rp.0 - 50 jt)	4.218.941	4.437.546	4.582.529	4.724.321	4.811.833
Kredit Kecil (> Rp.50 jt - Rp. 500 jt)	6.647.201	7.051.797	7.868.187	8.350.552	8.751.073
Kredit Menengah (> Rp.500 jt - Rp.5 m)	3.940.897	3.803.852	4.138.815	4.291.223	4.543.305
Kredit Corporate (> Rp.5 m)	5.541.441	5.441.721	5.668.208	5.787.354	5.973.952
Total Kredit	20.348.480	20.734.916	22.257.739	23.153.450	24.080.163
Total Kredit UMKM	14.807.039	15.293.195	16.589.531	17.366.096	18.106.211
(% terhadap Total Kredit)	72,77%	73,76%	74,53%	75,00%	75,19%

Jumlah kredit UMKM di Provinsi Riau menurut jenis penggunaannya sebagian besar (52,62%) disalurkan kepada sektor produktif seperti kredit modal kerja dan investasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.15. Posisi penyaluran kredit kepada kedua sektor tersebut dalam triwulan laporan mencapai Rp9,52 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp50 miliar dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp9,02 triliun.

Tabel 3.15. Sebaran Kredit UMKM menurut Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	Tw IV 08		Tw I 09		Tw II 09		Tw III 09		Tw IV 09	
	Rp juta	%								
1. Modal Kerja	5.123.740	34,60	5.173.656	33,83	5.676.254	34,22	6.071.543	34,96	6.342.469	35,03
2. Investasi	2.600.240	17,56	2.593.566	16,96	2.768.623	16,69	3.023.396	17,41	3.185.765	17,59
3. Konsumsi	7.083.059	47,84	7.525.973	49,21	8.144.654	49,10	8.271.157	47,63	8.577.977	47,38
Jumlah	14.807.039	100	15.293.195	100	16.589.531	100	17.366.096	100	18.106.211	100

Secara sektoral, penyaluran kredit UMKM di Provinsi Riau dalam triwulan laporan terkonsentrasi pada sektor lain-lain dengan jumlah mencapai Rp8,61 triliun dan sektor perdagangan (Rp4,79 triliun). Pertumbuhan kredit UMKM kepada sektor perdagangan tercatat meningkat sebesar 3,6% dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan (qtq) kredit UMKM tertinggi dalam triwulan laporan berada pada sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 37,04% dari Rp224,42 miliar menjadi Rp307,56 miliar. Sebagian besar kredit ini disalurkan kepada sub sektor angkutan umum dengan jumlah mencapai Rp298,89 miliar. Kondisi ini diindikasikan terjadi seiring dengan mulai pulihnya iklim dunia usaha sehingga memicu permintaan kredit yang cukup tinggi pada sub sektor angkutan umum.

Tabel 3.16. Sebaran Kredit UMKM menurut Sektor Ekonomi (Rp juta)

No.	Sektor Ekonomi	Tw IV 08		Tw I 09		Tw II 09		Tw III 09		Tw IV 09	
		Jumlah	%								
1	Pertanian	1.963.008	13,24	1.987.008	12,99	2.138.879	12,89	2.192.489	12,63	2.327.586	12,86
2	Pertambangan	25.855	0,17	31.691	0,21	30.929	0,19	28.840	0,17	30.094	0,17
3	Perindustrian	174.351	1,18	177.623	1,16	190.674	1,15	188.210	1,08	205.404	1,13
4	Listrik, Gas dan Air	7.562	0,05	3.769	0,02	3.960	0,02	5.913	0,03	7.225	0,04
5	Konstruksi	594.623	4,01	421.814	2,76	469.030	2,83	616.855	3,55	589.196	3,25
6	Perdag., Resto. & Hotel	3.626.653	24,45	3.887.922	25,42	4.269.552	25,74	4.622.480	26,62	4.789.096	26,45
7	Pengangkutan, Pergud.	210.662	1,42	198.700	1,30	215.345	1,30	224.429	1,29	307.560	1,70
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	1.058.146	7,13	968.781	6,33	1.032.843	6,23	1.123.289	6,47	1.170.889	6,47
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	62.525	0,42	56.458	0,37	58.558	0,35	56.694	0,33	59.618	0,33
10	Lain-lain	7.108.526	47,93	7.559.429	49,43	8.179.761	49,31	8.306.897	47,83	8.619.543	47,61
Jumlah		14.831.911	100	15.293.195	100	16.589.531	100	17.366.096	100	18.106.211	100

Penyaluran kredit UMKM kepada sektor unggulan di Provinsi Riau seperti sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan juga tercatat mengalami kenaikan. Pertumbuhan triwulanan tertinggi (qtq) terjadi pada sektor industri pengolahan yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 9,14% dari Rp188,21 miliar menjadi Rp205,40 miliar. Sedangkan sektor pertanian dan pertambangan masing-masing mengalami pertumbuhan (qtq) sebesar 6,16% dan 4,35%.

Pengelolaan risiko kredit UMKM dalam triwulan laporan tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yang tercermin dari menurunnya NPLs kredit UMKM dari 2,61% menjadi 2,36%. Penurunan NPLs kredit UMKM secara sektoral terjadi pada sektor pertambangan dari 1,16%

menjadi 0,11%, sektor listrik (dari 7,71% menjadi 2,82%), sektor konstruksi (dari 5,47% menjadi 0,35%) dan sektor perdagangan (dari 3,36% menjadi 0,54%).

Tabel 3.17. Sebaran NPLs UMKM Menurut Sektor Ekonomi (Rp Juta)

No	Sektor Ekonomi	Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09
1	Pertanian	2,26%	3,52%	3,64%	3,44%	4,14%
2	Pertambangan	0,15%	1,12%	1,06%	1,16%	0,11%
3	Perindustrian	13,24%	11,01%	3,63%	2,95%	6,39%
4	Listrik, Gas dan Air	0,00%	0,00%	11,54%	7,71%	2,82%
5	Konstruksi	3,95%	10,54%	7,02%	5,47%	0,35%
6	Perdag., Resto. & Hotel	1,99%	2,87%	3,11%	3,36%	0,54%
7	Pengangkutan, Pergud.	1,39%	3,17%	0,62%	0,90%	1,54%
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	2,50%	3,72%	2,09%	2,37%	4,21%
9	Jasa-jasa Sosial Masy.	0,34%	0,30%	0,46%	1,58%	1,62%
10	Lain-lain	1,32%	1,61%	1,73%	1,83%	1,95%

Dilihat dari penyebarannya, penurunan NPLs UMKM terjadi pada semua kabupaten/kota. Penurunan NPLs UMKM tertinggi terdapat di Kota Dumai yang tercatat menurun dari 1,78% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,26% dalam triwulan laporan. NPLs UMKM tertinggi masih terdapat di Kota Pekanbaru dengan angka mencapai 3,24%. Sedangkan NPLs UMKM terendah terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu dengan angka mencapai 0,47%.

Tabel 3.18. Sebaran NPLs UMKM Menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Riau

No.	Kab./Kota	Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09
1	Pekanbaru	2,42%	3,48%	3,28%	3,44%	3,24%
3	Bengkalis	1,11%	0,96%	1,38%	1,42%	0,97%
2	Dumai	2,16%	2,25%	2,14%	1,78%	1,26%
5	Indragiri Hilir	1,58%	2,24%	2,03%	2,66%	2,20%
4	Indragiri Hulu	0,28%	0,38%	0,63%	0,75%	0,47%
6	Lainnya	0,68%	1,05%	0,80%	0,97%	0,82%

3.1.6. Profitabilitas

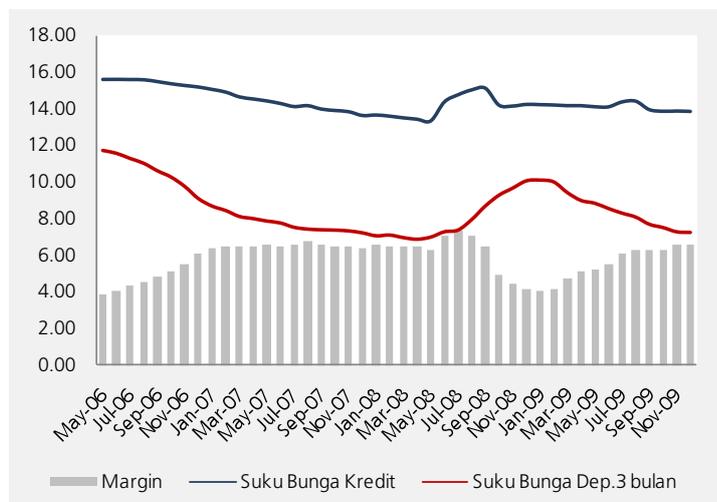
Kondisi profitabilitas perbankan Provinsi Riau dalam triwulan laporan masih mengalami peningkatan, namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

Penurunan suku bunga dana yang lebih besar dari suku bunga kredit telah meningkatkan margin yang diterima oleh perbankan dalam triwulan IV-2009.

3.1.6.1. Spread Bunga

Selama triwulan laporan, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada tingkat 6,50%. Adanya *trend* penurunan BI-Rate yang terjadi sejak awal tahun 2009 lalu telah direspon oleh kalangan perbankan Riau dengan menurunkan suku bunga deposito (*weighted average*) sebesar 45 bps dari 7,70% menjadi 7,25%. Sedangkan suku bunga kredit (*weighted average*) mengalami penurunan lebih kecil yaitu sebesar 10 bps dari 13,94% menjadi 13,85%. Dengan demikian, margin suku bunga perbankan di Provinsi Riau mengalami peningkatan dari 6,24% menjadi 6,59 dalam triwulan laporan.

Grafik 3.9. Perkembangan Suku Bunga Rata-rata Tertimbang Kredit dan Deposito (%)

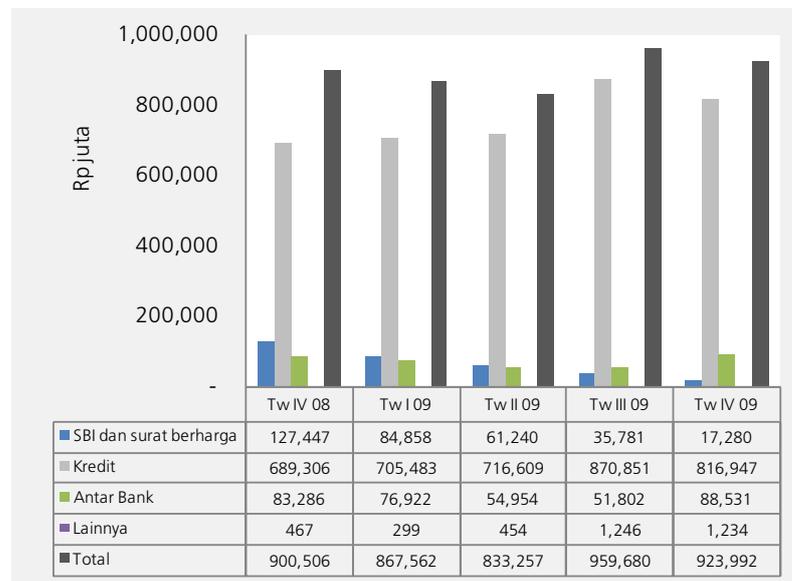


3.1.6.2. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga yang diperoleh perbankan Riau dalam triwulan laporan tercatat sebesar Rp923,99 miliar atau mengalami penurunan 3,72% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp959,68 miliar. Hal ini utamanya

disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga kredit yang menguasai pangsa terbesar dari Rp870,85 miliar menjadi Rp816,94 miliar atau turun 6,19% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selain itu, kondisi ini turut dipengaruhi oleh pendapatan bunga dari SBI dan surat berharga yang tercatat menurun sebesar 51,71% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari Rp35,78 miliar (triwulan III-2009) menjadi Rp17,28 miliar (triwulan IV-2009).

Grafik 3.10. Komposisi Pendapatan Bunga

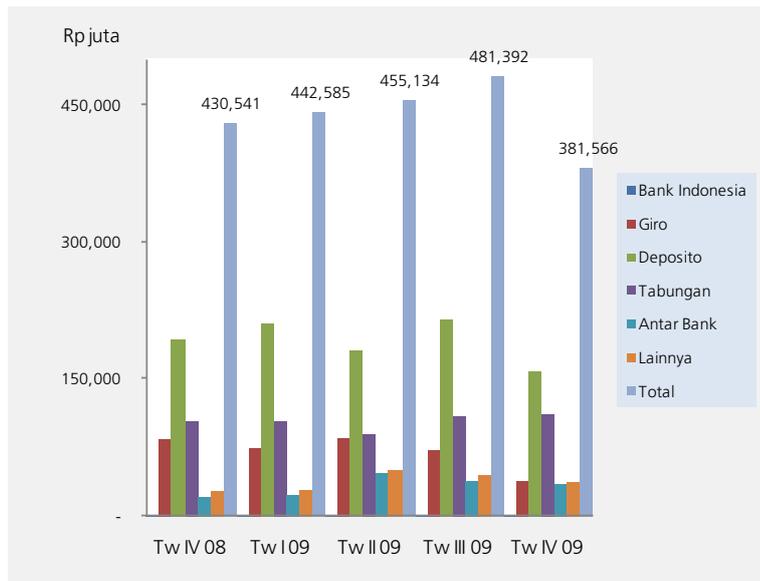


Sementara itu, beban bunga yang dikeluarkan perbankan dalam triwulan laporan tercatat sebesar Rp381,56 miliar atau mengalami penurunan sebesar 20,74% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pembayaran bunga sebagian besar ditujukan untuk dana pihak ketiga dengan nilai mencapai Rp307,95 miliar atau mencapai 82,33% dari total beban bunga. Secara umum, pembayaran beban bunga mengalami penurunan hampir di setiap komponen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini terjadi seiring dengan menurunnya suku bunga dana tertimbang (*weighted average*) yang menurun sebesar 45 bps.

Penurunan beban bunga terbesar terdapat pada beban bunga Bank Indonesia yang mencapai 71,83%. Pembayaran beban bunga deposito yang memiliki porsi terbesar menurun sebesar 26,52% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Komponen beban bunga yang tercatat mengalami kenaikan pembayaran adalah tabungan, yaitu dari Rp108,82 miliar menjadi Rp110,36 miliar atau naik 1,42% dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, maka *Net Interest Income* (NII) perbankan Riau pada triwulan laporan masih mengalami kenaikan sebesar 16,96% yaitu dari Rp478,29 miliar menjadi Rp542,42 miliar.

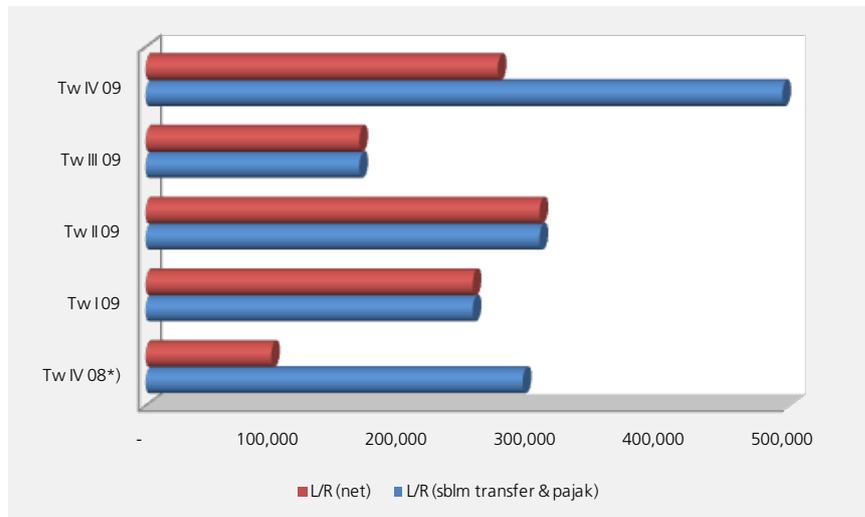
Grafik 3.11. Komposisi Beban Bunga



3.1.6.3. Perkembangan Laba Rugi

Perbankan Provinsi Riau dalam triwulan laporan memperoleh laba sebesar Rp494,48 miliar. Sementara dengan memperhitungkan transfer dan pajak maka jumlah perolehan laba bersih perbankan Riau dalam triwulan laporan mencapai Rp273,38 miliar, mengalami kenaikan dibandingkan triwulan III-2009 maupun periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp107,50 miliar dan Rp175,94 miliar. Perolehan laba ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2009 sehingga secara tidak langsung mencerminkan adanya pemulihan ekonomi yang cukup signifikan di Provinsi Riau.

Grafik 3.12. Perkembangan Laba Rugi (Triwulanan, Rp Juta)



3.1.7. Bank Syariah

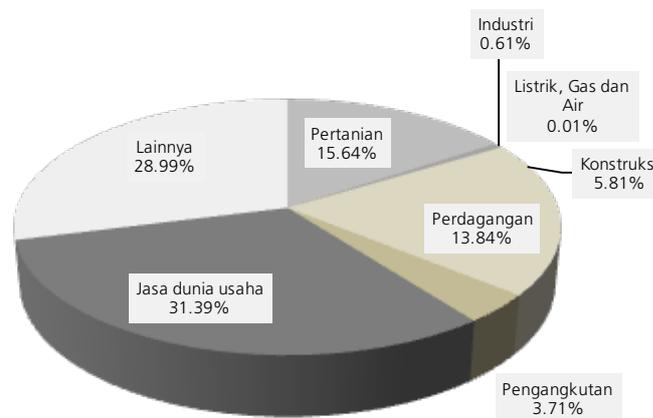
Sampai dengan triwulan laporan, terdapat 8 (delapan) perbankan Syariah yang terdiri dari empat (4) Bank Umum Syariah (BUS) dan empat (4) Unit Usaha Syariah (UUS). Pangsa aset Syariah mencapai 3,87% dari total aset perbankan secara umum. Pangsa perbankan Syariah ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, seiring dengan prospek peningkatan jumlah perbankan syariah di Provinsi Riau.

Total aset perbankan Syariah dalam triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 2,47% yaitu dari Rp1,48 triliun menjadi Rp1,51 triliun. Peningkatan aset ini seiring dengan meningkatnya DPK perbankan Syariah sebesar 8,53% yaitu dari Rp1,03 triliun menjadi Rp1,12 triliun. Disamping itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya pembiayaan perbankan syariah sebesar 6,59% menjadi Rp1,04 triliun dalam triwulan IV-2009. Peningkatan dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pembiayaan menyebabkan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) perbankan syariah relatif menurun yaitu dari 94,01% menjadi 92,33.

Secara sektoral, pada Grafik 3.13, sektor jasa dunia usaha memiliki porsi terbesar dalam hal pembiayaan oleh perbankan syariah di Riau dengan nilai mencapai

Rp326,97 miliar, diikuti oleh sektor lainnya yang mencapai Rp301,98 miliar. Pembiayaan ke sektor pertanian dalam triwulan laporan mencapai Rp162,93 miliar atau mencakup sekitar 15,64% dari total pembiayaan. Sementara, pembiayaan ke sektor industri mencapai Rp6,32 miliar mencakup sekitar 0,61% terhadap total pembiayaan perbankan syariah.

Grafik 3.13. Pembiayaan Syariah Menurut Sektor Ekonomi



Meskipun demikian, risiko pembiayaan yang tercermin dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada triwulan laporan mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 3,59% menjadi 7,03% (Tabel 3.19). Peningkatan NPF ini utamanya didorong oleh menurunnya kualitas kredit pada sub sektor perkebunan, dimana kredit non lancar mengalami kenaikan dari Rp103 juta pada triwulan III-2009 menjadi Rp32,18 miliar pada triwulan IV-2009. Hal diperkirakan terkait dengan upaya perbankan syariah Riau dalam memitigasi risiko di sektor perkebunan.⁶

Pangsa terbesar pembiayaan syariah sebagian besar disalurkan kepada pembiayaan modal kerja yang mencapai 42,94% terhadap total pembiayaan, diikuti pembiayaan investasi dan konsumsi masing-masing sebesar 31,39% dan 25,66%. Pembiayaan modal kerja dalam triwulan laporan mengalami kenaikan sebesar 11,38%

⁶ Berdasarkan informasi dari perbankan syariah di Provinsi Riau, sub sektor perkebunan dianggap masih memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi sebagai akibat dari krisis keuangan global yang terjadi pada akhir tahun 2008.

dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari Rp401,62 juta menjadi Rp447,62 juta. Sedangkan pembiayaan investasi mengalami penurunan sebesar 2,02% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 3.19. Indikator Kinerja Utama Perbankan Syariah di Provinsi Riau (Rp juta)

Keterangan	Periode				
	Tw IV 08*)	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09
Jumlah Bank	7	8	8	8	8
Asset	1.385.441	1.311.672	1.375.322	1.482.928	1.519.562
DPK	887.900	847.991	909.582	1.039.538	1.128.190
Pembiayaan	884.571	898.019	896.916	978.235	1.041.673
- Modal Kerja	372.880	379.021	362.644	401.626	447.345
- Investasi	319.758	316.842	311.000	333.723	326.997
- Konsumsi	191.933	202.156	223.272	242.886	267.331
Nominal NPF	24.850	46.326	34.195	35.090	73.222
NPF	3,25%	5,16%	3,81%	3,59%	7,03%
FDR	99,63%	105,90%	98,61%	94,10%	92,33%

3.3. Bank Perkreditan Rakyat

Secara umum kegiatan usaha BPR/S dalam triwulan laporan menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Kinerja BPR/S Riau masih menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Kondisi ini ditunjukkan dengan menurunnya risiko kredit macet yang diiringi dengan peningkatan aset, dana, dan kredit yang disalurkan. Meskipun demikian terdapat potensi peningkatan jumlah BPR/S, karena terdapat Sembilan (9) BPR/S yang sedang dalam proses perizinan, dan salah satunya merupakan BPR Syariah.

Tabel 3.20. Perkembangan Usaha BPR/BPRS di Provinsi Riau (Rp juta)

Keterangan	Periode				
	Tw IV 08	Tw I 09	Tw II 09	Tw III 09	Tw IV 09
1. Jumlah BPR/S	24	27	27	27	27
2. Asset	515.379	542.764	559.128	594.367	620.765
3. DPK	366.161	382.024	390.023	438.411	432.482
4. Kredit	335.122	353.333	375.327	382.767,99	397.101
5. NPL (nominal)	18.531	27.367	27.196	33.927	27.982
LDR (%)	91,52	92,49	96,23	87,31	91,82
NPLs (%)	5,53	7,75	7,25	8,86	7,05

Dalam triwulan laporan, aset BPR/S meningkat 4,44% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp594,36 miliar. Peningkatan aset ini utamanya didorong oleh peningkatan kredit dari Rp382,76 miliar menjadi Rp397,10 miliar, meskipun dana yang dihimpun mengalami penurunan sebesar 1,35% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Sementara itu, risiko kredit BPR yang tercermin dari NPLs ini tercatat masih melebihi tingkat toleransi yang diizinkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 5%, meskipun mengalami penurunan dari 8,86% pada triwulan III-2009 menjadi 7,05% pada triwulan IV-2009. Tingkat NPLs ini sepatutnya menjadi perhatian bagi BPR/S di Riau karena dapat mengakibatkan tingkat Kualitas Aktiva Produktif (KAP) memburuk yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kesehatan bank. Hal ini juga dapat mengganggu fungsi intermediasi bank.

Bab 4

KONDISI KEUANGAN

DAERAH

1. Kondisi Umum

Anggaran pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp3,08 triliun, sementara anggaran belanja daerah tercatat sebesar Rp4,27 triliun. Berdasarkan data realisasi belanja daerah per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sampai dengan akhir tahun 2009 total belanja daerah yang dihitung berdasarkan realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Kas Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah terealisasi sebesar Rp3,79 triliun atau 88,78% dari rencana awal. Persentase realisasi belanja terbesar terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad yaitu mencapai 96,68% sementara realisasi terkecil terdapat di Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah yaitu hanya mencapai 35,69%.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau telah ditetapkan besarnya APBD Provinsi Riau Tahun 2010 yaitu anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3,04 triliun, turun 1,46% dibandingkan dengan anggaran tahun 2009 dan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4,12 triliun, juga mengalami penurunan sebesar 3,39% dibandingkan dengan anggaran tahun 2009.

2. Realisasi APBD Riau Tahun 2009

Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp3,08 triliun, dengan porsi pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar Rp1,80 triliun, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,28 triliun. Dana Perimbangan Provinsi Riau pada tahun 2009 berasal dari *Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak* yang mencapai Rp1,62 triliun dan *Dana Alokasi Umum* sebesar Rp171,85 miliar. Pendapatan Asli Daerah Riau pada tahun 2009 dianggarkan berasal dari *pajak daerah* sebesar Rp1,06 triliun dan *hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan* sebesar Rp109,18 triliun. Bagian dari Pendapatan Asli Daerah lainnya yang juga akan memberikan tambahan pemasukan adalah *komponen lain-lain komponen daerah* yang mencapai Rp71,81 miliar dan komponen retribusi daerah sebesar Rp38,36 miliar.

Di sisi lain, Belanja Daerah Provinsi Riau pada tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp4,27 triliun dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp2,46 triliun dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1,81 triliun. Komponen terbesar dari Belanja Langsung berasal dari komponen *belanja modal* yaitu sebesar Rp1,29 triliun, diikuti oleh *belanja barang & jasa* sebesar Rp842,54 miliar dan *belanja pegawai* sebesar Rp329,36 miliar. Sementara, komponen terbesar dari Belanja Tidak Langsung adalah *belanja pegawai* yang mencapai Rp742,11 miliar diikuti oleh *belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan pemerintah desa* sebesar Rp544,25 miliar. Selanjutnya, *belanja bantuan sosial* sebesar Rp298,46 miliar, *belanja hibah* sebesar 157,25 miliar, *belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan* sebesar Rp37,04 miliar dan *belanja tidak terduga* sebesar Rp15 miliar.

Sampai dengan akhir tahun 2009, realisasi Belanja Daerah per SKPD berdasarkan realisasi SP2D yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Kas Daerah, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, tercatat sebesar Rp3,79 triliun atau 88,78% dari total anggaran tahun 2009. Namun demikian, jumlah dana yang telah disetujui untuk disediakan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Kepala Biro Keuangan, selaku Bendahara Umum Daerah telah mencapai Rp4,31 triliun, lebih besar dibandingkan dengan plafon awal. Kondisi ini terjadi karena adanya pembengkakan belanja pada 12 (dua belas) SKPD, antara lain Dinas Pendidikan, Badan Perpustakaan, Arsip& Dokumentasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain.

Tabel 4.1. Realisasi Belanja SKPD Provinsi Riau (Rp Juta)

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Plafon	Realisasi SPD		Realisasi SP2D	
		Rupiah	%	Rupiah	%
Belanja	4,269,474	4,314,996	101.07	3,790,523	88.78
Pengeluaran Pembiayaan	237,249	237,249	100	216,859	91.41

sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

Sementara itu, berdasarkan pembiayaan yang dilakukan oleh daerah, jumlah plafon pengeluaran pembiayaan Provinsi Riau pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp237,25 miliar. Berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh Kepala Biro Keuangan, sampai akhir tahun 2009 keseluruhan jumlah anggaran tersebut telah disetujui untuk disediakan. Namun demikian, berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Kas Daerah, jumlah yang terealisasi hanya mencapai Rp216,86 miliar atau 91,41% dari rencana pembiayaan awal.

Jika dilihat dari belanja yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, plafon belanja terbesar dialokasikan untuk Sekretariat Daerah yaitu mencapai Rp1,33 triliun atau 31,15% dari total Belanja Daerah. Dari jumlah tersebut Rp1,11 triliun (83,53%) merupakan Belanja Tidak Langsung dan Rp219,01 miliar (16,47%), sisanya merupakan Belanja Langsung. Selanjutnya, belanja untuk Dinas Pekerjaan Umum mencapai Rp832,80 miliar atau 19,51% dari total belanja daerah. Dari jumlah tersebut, Belanja Langsung mencapai Rp773,80 miliar (92,91%), dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp59,01 miliar (7,09%). Kondisi ini menunjukkan bahwa peruntukan belanja oleh Dinas Pekerjaan Umum utamanya adalah untuk belanja modal.

Dinas lain yang juga mempunyai porsi belanja yang cukup besar adalah Dinas Pendidikan yaitu sebesar Rp413,89 miliar (9,69%), dengan jumlah terbesar dialokasikan untuk komponen belanja langsung yaitu sebesar Rp378,43 miliar atau 91,43% dari total Belanja Daerah. Sementara itu, komponen Belanja Tidak Langsung tercatat sebesar Rp35,47 miliar atau 8,57% dari total belanja. Dari keseluruhan belanja tersebut, porsi terkecil dialokasikan untuk Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah yaitu sebesar Rp2,26 miliar atau hanya 0,05% dari total Belanja Daerah. Jumlah tersebut secara keseluruhan dialokasikan untuk komponen Belanja Tidak Langsung.

Tabel 4.2. Rincian Belanja SKPD Provinsi Riau (Rp Juta)

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Rincian Belanja			Satuan Kerja Perangkat Daerah	Rincian Belanja		
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
Dinas Pendidikan	35.471	378.425	413.895	Lanjutan....			
Bdn Perpustakaan Arsip & Dok	12.968	9.786	22.755	Kpl. Daerah & Wkl Kpl. Daerah	2.265	-	2.265
Dinas kesehatan	33.975	73.841	107.815	Sekretariat Daerah	1.110.929	219.014	1.329.942
RSUD Arifin Achmad	56.933	78.886	135.819	Sekretariat DPRD	12.634	66.572	79.206
RS Jiwa Tampan	14.662	10.616	25.278	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.536	7.968	21.505
Dinas Pekerjaan Umum	59.010	773.790	832.801	Inspektorat	7.379	8.899	16.278
BAPPEDA	13.199	19.295	32.494	Badan Penghubung	3.897	5.560	9.457
Dinas Perhubungan	22.391	44.227	66.618	Dinas Pendapatan	97.454	21.853	119.306
Badan Lingkungan Hidup	6.766	7.093	13.859	Badan Kepegawaian Daerah	12.307	13.526	25.833
Bdn Pemb. Perempuan, PA & KB	5.494	5.645	11.139	Badan Ketahanan pangan	8.884	6.180	15.064
Dinas Sosial	16.339	15.190	31.530	Bdn Pemb. Masy. & Pemb. Daerah	7.472	34.599	42.072
Disnakertrans	33.231	26.112	59.343	Dinas Korn., Informatikan & Peng. Data	5.577	7.396	12.974
Dinas Koperasi & UKM	7.626	7.999	15.625	Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura	24.323	38.655	62.978
BPMMPD	5.354	12.212	17.566	Dinas Perkebunan	18.088	41.599	59.687
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	7.611	3.231	10.842	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	10.845	24.081	34.926
Dinas Kebudayaan & Pariwisata	14.471	37.232	51.703	Sekretariat Bdn Koordinasi Penyuluhan	8.560	2.717	11.277
Dinas Pemuda dan Olahraga	7.313	373.279	380.591	Dinas Kehutanan	25.263	9.748	35.011
Satpol PP	20.076	9.117	29.194	Dinas Pertambangan dan Energi	8.954	12.969	21.922
Bdn Kest. Bgs, Pol. & Perid. Masy.	9.234	7.785	17.019	Dinas Perikanan dan Kelautan	11.067	37.889	48.956
DPRD	17.583	-	17.583	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.511	9.837	27.348
				JUMLAH	1.806.651	2.462.823	4.269.474

sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

Berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh Kepala Biro Keuangan, tercatat bahwa hampir semua anggaran SKPD telah disetujui untuk disediakan, bahkan terdapat beberapa SKPD yang persetujuan penyediaan dananya melebihi anggaran yang ditentukan. Beberapa SKPD yang realisasi SPD nya melebihi anggaran yang telah ditentukan, antara lain Dinas Pendidikan (109,40%), Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (100,44%), Dinas Kesehatan (100,64%), Dinas Pekerjaan Umum (100,06%), dan lain-lain.

Sementara itu, beberapa SKPD yang tidak meminta penyediaan anggarannya secara keseluruhan adalah Badan Lingkungan Hidup (99,56%), Satuan Polisi Pamong Praja (99,31%), Dinas Pendapatan (94,61%), Badan Ketahanan Pangan (99,54%), Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan (99,89%), dan Dinas Kehutanan (96,03%). Secara umum, rata-rata penyediaan dana untuk SKPD berdasarkan SPD nya tercatat sebesar 100,97%.

Namun demikian, jika dilihat dari realisasinya berdasarkan SP2D yang diterbitkan, jumlah dana yang telah disetujui untuk disediakan tersebut tidak direalisasikan semua. Hal ini terjadi karena permintaan pencairan dana berdasarkan SPD yang dikeluarkan tidak dapat terserap secara keseluruhan. Secara rata-rata realisasi berdasarkan SP2D dari tiap SKPD mencapai 83,63%.

Persentase realisasi terbesar berdasarkan SP2D adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad yaitu mencapai 96,68% dari 100% yang diminta, diikuti oleh pencairan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UKM yang mencapai 96,63%, dari 100,50% dari anggaran yang diminta. Sementara itu, realisasi terkecil yang terserap terjadi pada Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah yaitu sebesar 35,69% dari 100% anggaran yang telah disediakan diikuti realisasi pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan yang hanya mencapai 59,69%.

Tabel 4.3. Realisasi Belanja SKPD Provinsi Riau (Rp Juta)

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Total Belanja	Realisasi SPD	Realisasi SP2D	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Total belanja	Realisasi SPD	Realisasi SP2D
Dinas Pendidikan	413.895	452.820	363.977	Lanjutan.....			
Bdn Perpustakaan Arsip & Dok	22.755	22.854	17.653	Kpl. Daerah & Wkl Kpl. Daerah	2.265	2.265	2.175
Dinas kesehatan	107.815	108.510	86.485	Sekretariat Daerah	1.329.942	1.334.739	1.255.287
RSUD Arifin Achmad	135.819	135.819	131.311	Sekretariat DPRD	79.206	79.206	69.081
RS Jiwa Tampian	25.278	25.278	22.547	Badan Penelitian dan Pengembangan	21.505	21.505	16.959
Dinas Pekerjaan Umum	832.801	833.302	752.172	Inspektorat	16.278	16.278	14.142
BAPPEDA	32.494	32.494	25.301	Badan Penghubung	9.457	9.457	8.617
Dinas Perhubungan	66.618	66.618	47.746	Dinas Pendapatan	119.306	112.881	88.064
Badan Lingkungan Hidup	13.859	13.799	12.611	Badan Kepegawaian Daerah	25.833	27.460	20.796
Bdn Pemb. Perempuan, PA & KB	11.139	11.139	7.662	Badan Ketahanan Pangan	15.064	14.995	12.878
Dinas Sosial	31.530	31.530	28.316	Bdn Pemb. Masy. & Pemb. Daerah	42.072	42.072	35.399
Disnakertrans	59.343	59.910	50.515	Dinas Kom., Informatikan & Peng. Data	12.974	12.974	11.485
Dinas Koperasi & UKM	15.625	15.704	15.098	Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura	62.978	62.978	55.607
BPMPD	17.566	17.566	15.935	Dinas Perkebunan	59.687	59.687	21.301
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	10.842	10.917	7.772	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	34.926	34.886	29.119
Dinas Kebudayaan & Pariwisata	51.703	53.691	38.001	Sekretariat Bdn Koordinasi Penyuluhan	11.277	11.277	6.731
Dinas Pemuda dan Olahraga	380.591	380.591	346.645	Dinas Kehutanan	35.011	33.619	30.916
Satpol PP	29.194	28.991	19.807	Dinas Pertambangan dan Energi	21.922	21.922	20.369
Bdn Kest. Bgs, Pol.& Perld. Masy.	17.019	21.342	14.836	Dinas Perikanan dan Kelautan	48.956	48.956	44.491
DPRD	17.583	17.583	16.905	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.348	27.383	25.812
				Jumlah	4.269.474	4.314.996	3.790.523

sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

2.1. Realisasi Belanja Langsung

Belanja Langsung Provinsi Riau pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp2,46 triliun yang utamanya berasal dari belanja modal yang mencapai Rp1,29 triliun. Dari seluruh SKPD di Riau, Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum merupakan yang tertinggi yaitu mencapai Rp773,79 miliar atau 31,42% dari total belanja yang dianggarkan. Jumlah dana yang telah disetujui untuk disediakan kepada Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan SPD mencapai

100,06%, lebih besar daripada anggaran yang ditetapkan. Namun demikian, jumlah yang dapat diserap hanya sebesar Rp701,36 miliar atau 90,64%. Besarnya porsi anggaran Dinas Pekerjaan Umum tidak terlepas dari peranannya dalam pembangunan /perbaikan berbagai infrastruktur di Riau.

Selanjutnya, pangsa Belanja Langsung yang juga cukup besar terdapat di Dinas Pendidikan yaitu mencapai Rp378,42 miliar atau 15,37% dari total belanja. Sampai dengan akhir tahun anggaran, jumlah dana yang disetujui untuk disediakan kepada dinas dimaksud berdasarkan SPD yang diterbitkan mencapai Rp417,35 miliar, lebih besar dari jumlah yang dianggarkan pada periode sebelumnya. Namun demikian, jumlah yang dapat direalisasikan hanya mencapai Rp336,39 miliar, atau 88,89% dari total Belanja Langsung Dinas Pendidikan.

Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olahraga juga tercatat cukup besar yaitu mencapai Rp373,28 miliar atau 15,16% dari total Belanja Langsung. Secara keseluruhan berdasarkan SPD, anggaran dimaksud telah disetujui untuk disediakan namun jumlah yang dapat diserap hanya mencapai Rp339,68 miliar atau 91% dari total Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sementara itu, jumlah Belanja Langsung paling rendah terdapat pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, yaitu hanya sebesar Rp2,72 miliar atau 0,11% dari total Belanja Langsung. Dari jumlah tersebut yang terealisasi hanya sebesar Rp2,32 miliar atau 85,55% dari total belanja untuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan.

Tabel 4.4. Realisasi Belanja Langsung SKPD Provinsi Riau (Rp Juta)

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung	Realisasi SPD Belanja Langsung	Realisasi SP2D Belanja Langsung	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung	Realisasi SPD Belanja Langsung	Realisasi SP2D Belanja Langsung
Dinas Pendidikan	378.425	417.349	336.390	Lanjutan.....			
Bdn Perpustakaan Arsip & Dok	9.786	9.886	8.005	Kpl. Daerah & Wkl Kpl. Daerah	-	-	1.950
Dinas Kesehatan	73.841	74.535	59.863	Sekretariat Daerah	219.014	223.951	405.447
RSUD Arifin Achmad	78.886	78.886	76.620	Sekretariat DPRD	66.572	66.572	58.920
RS Jiwa Tampan	10.616	10.616	9.418	Badan Penelitian dan Pengembangan	7.968	7.968	6.875
Dinas Pekerjaan Umum	773.790	774.292	701.362	Inspektorat	8.899	8.899	7.650
BAPPEDA	19.295	19.295	16.158	Badan Penghubung	5.560	5.560	4.961
Dinas Perhubungan	44.227	44.227	30.908	Dinas Pendapatan	21.853	22.687	17.551
Badan Lingkungan Hidup	7.093	7.093	6.341	Badan Kepegawaian Daerah	13.526	15.154	10.884
Bdn Pemb. Perempuan, PA & KB	5.645	5.645	5.052	Badan Ketahanan Pangan	6.180	6.110	5.288
Dinas Sosial	15.190	15.190	14.033	Bdn Pemb. Masy. & Pemb. Daerah	34.599	34.599	29.481
Disnakertrans	26.112	26.679	20.975	Dinas Kom., Informatikan & Peng. Data	7.396	7.396	6.730
Dinas Koperasi & UKM	7.999	8.078	7.574	Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura	38.655	38.655	32.110
BPMPD	12.212	12.212	10.885	Dinas Perkebunan	41.599	41.599	5.908
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	3.231	3.306	2.932	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	24.081	24.041	21.278
Dinas Kebudayaan & Pariwisata	37.232	39.220	26.860	Sekretariat Bdn Koordinasi Penyuluhan	2.717	2.717	2.324
Dinas Pemuda dan Olahraga	373.279	373.279	339.697	Dinas Kehutanan	9.748	9.749	7.936
Satpol PP	9.117	8.915	6.703	Dinas Pertambangan dan Energi	12.969	12.969	11.678
Bdn Kest. Bgs, Pol. & Perld. Masy.	7.785	7.772	6.553	Dinas Perikanan dan Kelautan	37.889	37.889	34.535
DPRD	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.837	9.872	8.948
				JUMLAH	2.462.823	2.512.863	2.366.778

sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

Secara umum, anggaran Belanja Langsung didominasi oleh belanja modal yang utamanya dialokasikan untuk pembangunan/perbaikan berbagai sarana infrastruktur baik fisik maupun non fisik yang akan menimbulkan *multiplier effect* terhadap perekonomian Riau baik dalam mengurangi angka kemiskinan maupun menurunkan jumlah pengangguran. Selain itu, pembangunan/perbaikan berbagai sarana infrastruktur akan menarik investor untuk menanamkan dananya di Provinsi Riau yang pada akhirnya juga akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Riau.

2.2. Realisasi Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Kas Daerah, Belanja Tidak Langsung APBD Provinsi Riau Tahun 2009 terealisasi sebesar Rp1,42 triliun atau mencapai 78,81%. Sementara itu SPD yang diterbitkan oleh Kepala Biro Keuangan untuk penyediaan dana bagi Belanja Tidak Langsung tahun 2009 tercatat sebesar Rp1,80 triliun atau 99,75% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.

Anggaran Belanja Tidak Langsung terbesar dialokasikan untuk Sekretariat Daerah yaitu mencapai Rp1,11 triliun atau 61,49% dari total anggaran Belanja Tidak Langsung. Selanjutnya adalah anggaran untuk Dinas Pendapatan yaitu sebesar Rp97,45 miliar atau 5,39% dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp59,01 miliar atau 3,27% dari total Belanja Tidak Langsung.

Namun, dilihat dari realisasinya Sekretariat Daerah hanya merealisasikan sebesar Rp849,84 miliar atau 76,50% dari plafon anggaran berdasarkan SP2D walaupun dana yang telah disetujui untuk disediakan berdasarkan SPD mencapai 99,99% dari plafon anggaran. Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pendapatan tercatat sebesar Rp70,51 miliar (72,36%), dari Rp90,19 miliar (92,55%) anggaran yang telah disetujui untuk disediakan dan realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp50,81 miliar (86,10%) dari keseluruhan anggaran yang telah disetujui untuk disediakan yaitu sebesar Rp50,01 miliar.

Jika dilihat dari persentase realisasinya berdasarkan SP2D, realisasi tertinggi terjadi pada Dinas Koperasi & UKM yaitu mencapai 98,66% atau Rp7,52 miliar dari Rp7,63 miliar dari anggaran yang telah disetujui untuk disediakan. Selanjutnya, realisasi dari Dinas Pertambangan dan Energi mencapai 97,07% atau Rp8,70 miliar dari anggaran yang telah disetujui untuk disediakan yaitu sebesar Rp8,95 miliar.

Di sisi lain, persentase realisasi Belanja Tidak Langsung terkecil terjadi pada anggaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu hanya sebesar 9,93% atau Rp225 juta dari Rp2,27 miliar yang telah disetujui untuk disediakan. Jumlah plafon belanja tidak langsung untuk SKPD ini juga tercatat memiliki pangsa terkecil yaitu hanya 0,13% dari total Belanja Tidak Langsung.

Tabel 4.5. Realisasi Belanja Tidak Langsung SKPD Provinsi Riau (Rp Juta)

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Total Belanja Tdk Langsung	Realisasi SP2D Belanja Tdk Langsung	Realisasi SP2D Belanja TdkLangsung	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Total Belanja Tdk Langsung	Realisasi SP2D Belanja Tdk Langsung	Realisasi SP2D Belanja TdkLangsung
Dinas Pendidikan	35.471	35.471	27.587	Lanjutan.....			
Bdn Perpustakaan Arsip & Dok	12.968	12.968	9.647	Kpl. Daerah & Wkl Kpl. Daerah	2.265	2.265	225
Dinas kesehatan	33.975	33.975	26.622	Sekretariat Daerah	1.110.929	1.110.788	849.840
RSUD Arief Achmad	56.933	56.933	54.691	Sekretariat DPRD	12.634	12.634	10.161
RS Jiwa Tampan	14.662	14.662	13.129	Badan penelitian dan Pengembangan	13.536	13.536	10.084
Dinas Pekerjaan Umum	59.010	59.010	50.811	Inspektorat	7.379	7.379	6.491
BAPPEDA	13.199	13.199	9.143	Badan Penghubung	3.897	3.897	3.656
Dinas Perhubungan	22.391	22.391	16.838	Dinas Pendapatan	97.454	90.194	70.513
Badan Lingkungan Hidup	6.766	6.705	6.270	Badan Kepegawaian Daerah	12.307	12.307	9.912
Bdn Pemb. Perempuan, PA & KB	5.494	5.494	2.610	Badan Ketahanan pangan	8.884	8.884	7.590
Dinas Sosial	16.339	16.339	14.284	Bdn Pemb. Masy. & Pemb. Daerah	7.472	7.472	5.918
Disnakertrans	33.231	33.231	29.541	Dinas Kom., Informatikan & Peng. Data	5.577	5.577	4.755
Dinas Koperasi & UKM	7.626	7.626	7.524	Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura	24.323	24.323	23.497
BPMPD	5.354	5.354	5.050	Dinas Perkebunan	18.088	18.088	15.394
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	7.611	7.611	4.840	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	10.845	10.845	7.841
Dinas Kebudayaan & Pariwisata	14.471	14.471	11.142	Sekretariat Bdn Koordinasi Penyuluhan	8.560	8.560	4.407
Dinas Pemuda dan Olahraga	7.313	7.313	6.949	Dinas Kehutanan	25.263	23.870	22.980
Satpol PP	20.076	20.076	13.104	Dinas Pertambangan dan Energi	8.954	8.954	8.691
Bdn Kest. Bgs, Pol & Perid. Masy.	9.234	13.570	8.283	Dinas Perikanan dan Kelautan	11.067	11.067	9.956
DPRD	17.583	17.583	16.905	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.511	17.511	16.864
					1.806.651	1.802.133	1.423.745

sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

Belanja Tidak Langsung baik di SKPD namun secara keseluruhan sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji maupun honor pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, anggaran Belanja Tidak Langsung yang juga cukup besar adalah anggaran untuk belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa. Belanja ini disesuaikan dengan besarnya peran Sumber Daya Alam (SDA) masing-masing daerah.

3. Rencana APBD Riau Tahun 2010

Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp3,04 triliun, turun 1,46% dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan tahun 2009 yang mencapai Rp3,08 triliun.

Penurunan Anggaran Pendapatan tahun 2010 didorong oleh penurunan pada anggaran Dana Perimbangan sebesar 5,04% dari 1,80 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp1,71 triliun pada tahun 2010. Sementara Anggaran Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 3,55% dari Rp1,28 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp1,33 triliun pada tahun 2010.

Di sisi lain, Anggaran Belanja ditetapkan sebesar Rp4,12 triliun, turun 3,39% dibandingkan dengan tahun 2009 yang jumlahnya mencapai Rp4,27 triliun. Penurunan ini utamanya didorong oleh menurunnya Belanja Tidak Langsung sebesar 10,10% yaitu dari Rp1,81 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp1,62 triliun pada tahun 2010. Sementara, Belanja Langsung meningkat 1,54%, yaitu dari Rp2,46 triliun menjadi Rp2,50 triliun pada tahun 2010. Meningkatnya anggaran untuk Belanja Langsung ini memberikan indikasi positif terhadap perekonomian Riau secara umum.

Tabel 4.6. Rincian APBD Provinsi Riau Tahun 2010 (Rp Juta)

Rincian	2009	2010
PENDAPATAN DAERAH		
- Pendapatan Asli Daerah	1,284.50	1,330.05
- Dana Perimbangan	1,796.71	1,706.10
Jumlah Pendapatan	3,081.21	3,036.15
BELANJA DAERAH		
- Belanja Tidak Langsung	1,806.65	1,624.12
- Belanja Langsung	2,462.82	2,500.79
Jumlah Belanja	4,269.47	4,124.90
SURPLUS (DEFISIT)	(1,188.26)	(1,088.75)
PEMBIAYAAN DAERAH		
- Penerimaan Pembiayaan Daerah	1,425.51	1,075.61
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah	237.25	184.00
Pembiayaan Netto	1,188.26	891.61
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	(197.14)

sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

Berdasarkan data tersebut di atas, maka pada tahun 2010 Provinsi Riau diperkirakan kembali akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp1,09 triliun. Jumlah defisit ini turun 8,37% dibandingkan tahun 2009 yang mencapai Rp1,19 triliun. Penerimaan untuk pembiayaan daerah diperkirakan berkurang sebesar 24,55% dari Rp1,43 triliun menjadi Rp1,08 triliun. Demikian juga dengan pengeluaran untuk pembiayaan daerah akan berkurang sebesar 22,44% dari Rp237,25 miliar menjadi Rp184 miliar. Dengan kondisi tersebut, maka pembiayaan netto diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 24,97% yaitu dari Rp1,19 triliun menjadi Rp891,61 miliar. Jumlah pembiayaan netto ini akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran ditambah dengan SILPA dan sisa anggaran kegiatan pada tahun 2009.

3.1. Rencana Anggaran Pendapatan

Penurunan Anggaran Pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2010 sangat erat kaitannya dengan tren penurunan Dana Perimbangan terutama dari pos *Dana Alokasi Umum (DAU)* yang berkurang hingga 65,74% yaitu dari Rp171,85 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp58,87 miliar pada tahun 2010. Sementara, untuk *Dana Alokasi Khusus (DAK)* setelah beberapa tahun terakhir tidak ada alokasi DAK yang diterima oleh Provinsi Riau, pada tahun 2010 diperkirakan diperoleh dana sebesar Rp22,37 miliar. Namun demikian, peruntukan DAK ini sudah diatur oleh Pemerintah Pusat yaitu hanya untuk kegiatan irigasi sehingga tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan lain.

Bagi Provinsi Riau sendiri, pendapatan yang diterima dari DAK tidak banyak memberikan pengaruh layaknya DAU, karena peruntukannya yang berbeda. Penurunan DAU yang cukup besar diperkirakan akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kondisi keuangan Provinsi Riau. Sementara itu, formulasi penerimaan DAU ke depan juga diperkirakan akan mendorong penurunan DAU Riau pada tingkat yang lebih tinggi, karena akan ditetapkan bahwa penerima DAU hanyalah daerah yang mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kapasitas fiskal yang lebih rendah dari nasional, sementara secara rata-rata IPM dan kapasitas fiskal Riau tercatat lebih tinggi dari nasional.

Disisi lain Dana Perimbangan yang berasal dari *bagi hasil/pajak/bukan pajak* tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp1,62 triliun.

Tabel 4.7. Rincian Anggaran Pendapatan Provinsi Riau (Rp Juta)

Rincian	2009	2010
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.284,50	1.330,05
- Pajak Daerah	1.065,15	1.098,65
- Retribusi Daerah	38,36	46,78
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	109,18	108,48
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	71,81	76,15
DANA PERIMBANGAN	1.796,71	1.706,10
- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	1.624,86	1.624,86
- Dana Alokasi Umum	171,85	58,87
- Dana Alokasi Khusus	-	22,37
Jumlah Pendapatan	3.081,21	3.036,15

sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

Kondisi sedikit berbeda terdapat pada Anggaran Pendapatan Provinsi Riau yang berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana semua pos mengalami peningkatan kecuali komponen *hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan* yang diperkirakan akan turun sebesar 0,64% yaitu dari Rp109,18 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp108,48 miliar pada tahun 2010. Pangsa terbesar dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari komponen *pajak daerah* yaitu sebesar Rp1,10 triliun, meningkat 3,15% dibandingkan dengan tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp1,07 triliun.

Selanjutnya, anggaran *komponen lain-lain pendapatan asli daerah* diperkirakan sebesar Rp76,15 miliar meningkat 6,04% dibandingkan tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp71,81 miliar. Komponen *retribusi daerah* memiliki pangsa terendah yaitu hanya Rp46,78 miliar, namun mengalami peningkatan tertinggi hingga 21,94% dari Rp38,36 miliar pada tahun 2009.

Sementara itu, Departemen Keuangan berjanji akan membayar sisa Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Riau dari anggaran tahun 2008 dan 2009 yang belum dibayarkan yaitu berjumlah Rp4,8 triliun¹. Pembayaranannya akan dilakukan secara bertahap dan untuk tahap pertama akan dibayarkan dalam waktu dekat sebesar Rp1 triliun. Keterlambatan pembayaran sisa DBH Migas Riau tahun 2008 dan 2009 ini disebabkan pembengkakan subsidi BBM karena terjadi peningkatan harga minyak dari 60\$US/barrel menjadi 124\$US/barrel.

¹ Berita Riau Pos, Kamis tanggal 28 Januari 2010

3.2. Rencana Anggaran Belanja

Anggaran terbesar pada pos belanja Provinsi Riau adalah Belanja Langsung yang jumlahnya mencapai Rp2,5 triliun. Komponen terbesar dari pos ini adalah komponen *belanja modal* yaitu mencapai Rp1,39 triliun meningkat 7,60% dari Rp1,29 triliun pada tahun 2009. Selanjutnya, *belanja pegawai* meningkat 0,33% dari Rp329,36 miliar menjadi Rp330,46 miliar. Sementara *belanja barang dan jasa* mengalami penurunan sebesar 7,27% yaitu dari Rp842,54 miliar menjadi Rp781,33 miliar.

Di sisi lain, Belanja Tidak Langsung tercatat sebesar Rp1,62 triliun dari Rp1,81 triliun pada tahun 2009 atau mengalami penurunan sebesar 10,10%. Sebagian besar komponen Belanja Langsung mengalami penurunan, kecuali komponen *belanja subsidi* dan komponen *belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintahan*. Komponen *belanja subsidi* meningkat 43,78% yaitu dari Rp12,53 miliar menjadi Rp18,02 miliar. Selanjutnya, komponen *belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintahan* meningkat 16,63% dari Rp37,04 miliar menjadi Rp43,20 miliar.

Komponen Belanja Tidak Langsung yang mempunyai pangsa terbesar adalah komponen *belanja pegawai* yaitu sebesar Rp734,03 miliar dari Rp742,11 miliar atau menurun 1,09% dibandingkan dengan tahun 2009. Selanjutnya, komponen *belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa* yaitu sebesar Rp459,87 miliar, mengalami penurunan 15,51% dari Rp544,26 miliar pada tahun 2009. Komponen *belanja bantuan sosial* sebesar Rp215 miliar mengalami penurunan sebesar Rp27,96% dari Rp298,46 miliar pada tahun 2009 dan merupakan persentase penurunan tertinggi dari komponen Belanja Tidak Langsung.

Tabel 4.8. Rencana Anggaran Belanja Provinsi Riau (Rp Juta)

Rincian	2009	2010
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.806,65	1.624,12
- Belanja Pegawai	742,11	734,03
- Belanja Subsidi	12,53	18,02
- Belanja Hibah	157,25	139,00
- Belanja Bantuan Sosial	298,46	215,00
- Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kab./Kota & Pem. Desa	544,26	459,87
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kab./Kota & Pem. Desa	37,04	43,20
- Belanja tidak Terduga	15,00	15,00
BELANJA LANGSUNG	2.462,82	2.500,79
- Belanja Pegawai	329,36	330,46
- Belanja Barang dan Jasa	842,54	781,33
- Belanja Modal	1.290,92	1.389,00
Jumlah Belanja	4.269,47	4.124,90

sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu dari Rp1,19 triliun menjadi Rp891,61 miliar atau turun 24,97%. Penurunan ini utamanya didorong oleh lebih tingginya penurunan komponen penerimaan pembiayaan daerah dibandingkan dengan penurunan komponen pengeluaran pembiayaan daerah. Komposisi terbesar dari penerimaan pembiayaan daerah berasal dari komponen *Penerimaan Piutang Daerah* yaitu sebesar Rp751,02 miliar dari Rp556,01 miliar pada tahun 2009 atau meningkat 35,07%. Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari *Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)* mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 62,67% dari Rp869,50 miliar menjadi Rp324,59 miliar pada tahun 2010.

Tabel 4.9. Rencana Anggaran Belanja Provinsi Riau (Rp Juta)

Rincian	2009	2010
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.425,51	1.075,61
- Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	869,50	324,59
- Penerimaan Piutang Daerah	556,01	751,02
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	237,25	184,00
- Pembentukan Dana Cadangan	100,00	100,00
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	76,90	77,00
- Pembayaran Pokok Utang	60,35	7,00
Pembiayaan Netto	1.188,26	891,61

sumber : Biro Keuangan Provinsi Riau

Sementara itu, komponen pengeluaran pembiayaan daerah yang mengalami penurunan adalah komponen *pembayaran pokok utang* yaitu dari Rp60,35 miliar menjadi Rp7 miliar atau turun drastis 88,40%. Sementara komponen *penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah* meningkat sebesar 0,13% yaitu dari Rp76,90 miliar menjadi Rp77 miliar. Komponen *pembentukan dana cadangan* jumlahnya masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp100 miliar.

Bab 5

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Kondisi Umum

Peredaran transaksi tunai uang kartal di Provinsi Riau selama triwulan laporan tercatat mengalami *net outflow*, yaitu aliran uang keluar (*outflow*) lebih besar dari aliran uang masuk (*inflow*). Aliran uang masuk (*inflow*) ke Bank Indonesia Pekanbaru sampai dengan akhir Desember 2009 tercatat sebesar Rp634 miliar, sedangkan permintaan uang kartal yang mencerminkan aliran uang keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia Pekanbaru menurun sebesar 29,85% menjadi Rp2,32 triliun. Dengan perkembangan tersebut, maka terjadi *net outflow* sebesar Rp1,69 triliun atau turun 45,35% dibandingkan triwulan III-2009.

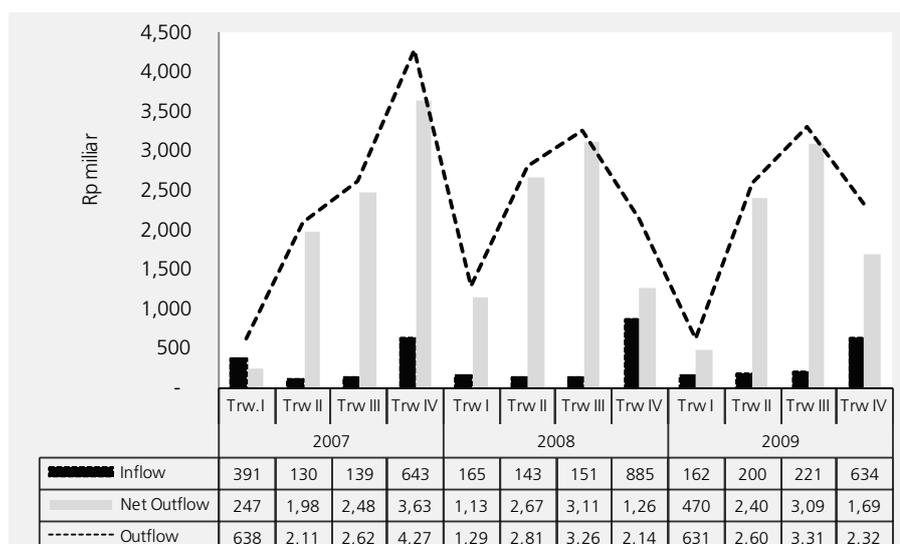
Dalam kaitannya dengan transaksi non tunai, sistem BI-RTGS masih mendominasi dengan nilai transaksi rata-rata mencapai Rp16.812 miliar atau mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4.035 miliar. Sementara itu, nilai nominal kliring dalam triwulan laporan juga meningkat 10,05% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu dari Rp5,61 triliun menjadi Rp6,18 triliun.

2. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

2.1. Aliran Uang Masuk dan Keluar (*Inflow – Outflow*)

Aliran uang masuk ke Bank Indonesia Pekanbaru (*inflow*) periode triwulan IV-2009 tercatat mengalami kenaikan dari Rp221 miliar pada triwulan III-2009 menjadi Rp634 miliar. Sebagaimana kita ketahui, momentum hari raya keagamaan Idul Fitri yang jatuh pada triwulan III-2009 mengakibatkan kenaikan pendapatan dan konsumsi masyarakat melalui 'gaji ke-13' yang berakibat pada melonjaknya penerimaan (omzet) sebagian besar pelaku usaha. Kondisi tersebut memberikan efek domino bagi penyetoran uang kartal pada sektor perbankan dan secara agregat meningkatkan aliran uang masuk di Provinsi Riau. Hal ini tercermin pada jumlah inflow bulan Oktober 2009 di Provinsi Riau yang tercatat mengalami kenaikan cukup tinggi dari Rp60,45 miliar pada bulan September 2009 menjadi Rp580,88 miliar.

Grafik 5.1. Perkembangan *Inflow* dan *Outflow*



sumber : Bank Indonesia

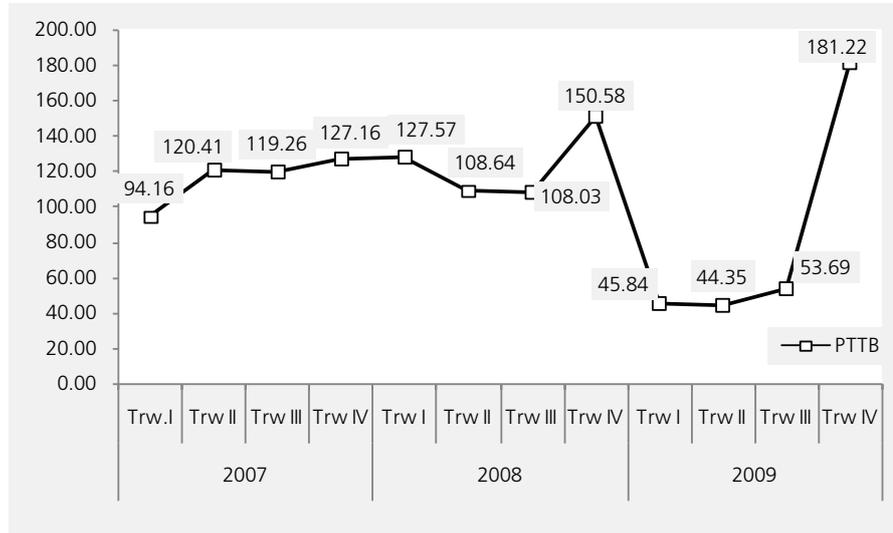
Sementara itu, aliran uang keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia Pekanbaru dalam triwulan IV-2009 mengalami penurunan sebesar 29,85% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp2,32 triliun. Penurunan ini berkaitan dengan telah berakhirnya efek musiman (*seasonal effect*) pada triwulan III-2009, yaitu bulan Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri yang mengakibatkan permintaan uang kartal relatif tinggi¹. Posisi *outflow* tertinggi dalam triwulan laporan terjadi pada bulan Desember dengan jumlah mencapai Rp1,37 triliun, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan uang kartal dalam menghadapi hari keagamaan natal, tahun baru serta masa libur yang cukup panjang. Dengan perkembangan tersebut, siklus aliran uang kartal di Provinsi Riau tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp1,69 triliun atau turun sebesar 45,35% dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 5.1).

2.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal menurut jenis pecahan dan dalam kondisi layak edar (*Clean Money Policy*), Bank Indonesia secara rutin melakukan kegiatan pemusnahan uang yang sudah Tidak Layak Edar (UTLE) baik yang berasal dari setoran bank maupun penukaran uang dari masyarakat, dan menggantinya dengan uang yang layak edar (*fit for circulation*). Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) yang menandakan pemusnahan UTLE dalam triwulan laporan mencapai Rp181,22 miliar atau meningkat dibandingkan triwulan III-2009 maupun periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar Rp53,69 miliar dan Rp150,58 miliar.

¹ Pada bulan September 2009, tercatat jumlah uang keluar meningkat sebesar 210% dibandingkan bulan Agustus 2009.

Grafik 5.2. Perkembangan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) di Bank Indonesia Pekanbaru (Rp miliar)



sumber : Bank Indonesia

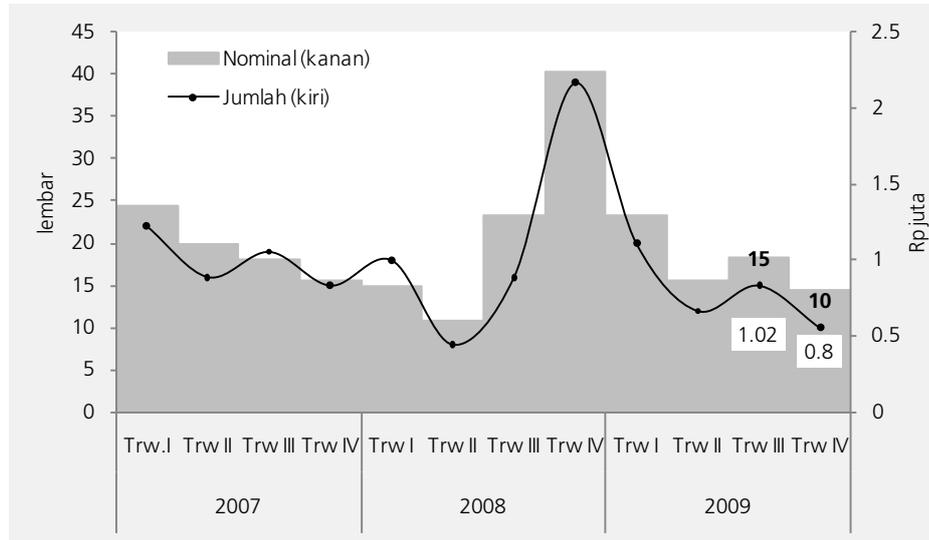
Relatif tingginya nilai PTTB triwulan IV-2009 berkaitan dengan adanya kebijakan Bank Indonesia untuk tidak melakukan pemusnahan uang pecahan besar (terutama Rp20.000 keatas) selama triwulan I-2009 sampai dengan triwulan III-2009. Kondisi ini mengakibatkan *trend* PTTB terhadap uang kertas selama periode tersebut relatif rendah. Pada triwulan IV-2009 kebijakan tersebut dilonggarkan, sehingga PTTB yang seharusnya diberikan pada triwulan I sampai dengan triwulan III-2009 dikompensasi ke triwulan IV-2009 yang pada akhirnya mengakibatkan angka PTTB pada triwulan IV-2009 cukup tinggi. Nilai PTTB tertinggi dalam triwulan laporan terjadi pada bulan Oktober 2009 dengan angka mencapai Rp 157,49 miliar.

2.3. Uang Palsu

Jumlah dan nilai nominal uang palsu yang ditemukan dalam triwulan IV-2009 di Bank Indonesia Pekanbaru merupakan yang terendah selama tahun 2009 yaitu sebanyak 10 lembar dengan nilai mencapai Rp800 ribu atau sekitar 0,00013% dari aliran uang masuk. Angka ini juga lebih kecil dibandingkan dengan triwulan IV-2008 dimana ditemukan uang palsu sebanyak 39 lembar dengan nominal mencapai Rp2,24 juta. Sebagian besar uang palsu yang

ditemukan pada triwulan laporan merupakan pecahan Rp100 ribu yaitu sebanyak 6 lembar sedangkan sisanya merupakan pecahan Rp50.000.

Grafik 5.3. Perkembangan Peredaran Uang Palsu di Riau



sumber : Bank Indonesia

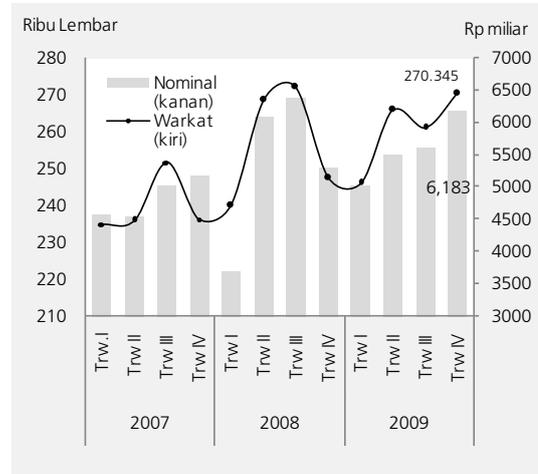
Kondisi tersebut merupakan dampak positif dari upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia Pekanbaru dalam menekan peredaran uang palsu melalui edukasi dan sosialisasi secara rutin mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah serta cara memperlakukan uang kepada *stakeholders*.

3. Perkembangan Transaksi Pembayaran Non Tunai

3.1. Transaksi Kliring

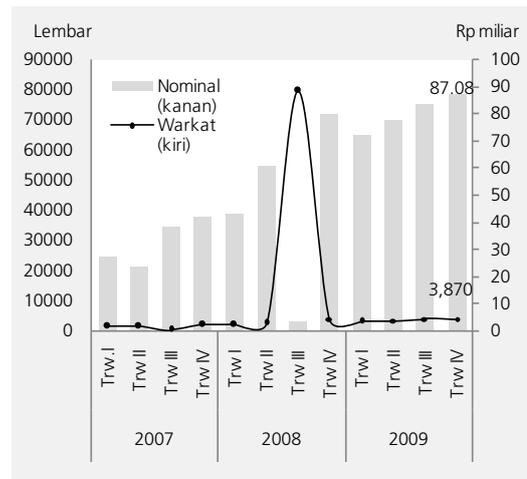
Transaksi pembayaran non tunai melalui kliring dalam triwulan laporan mencatat kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya baik dari sisi nilai nominal maupun jumlah warkat. Nominal transaksi kliring periode triwulan IV-2009 meningkat 10,05% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp5,61 triliun menjadi Rp6,18 triliun. Sedangkan jumlah warkat yang dikliringkan tercatat mengalami peningkatan dari 261.254 lembar menjadi 270.345 lembar atau naik 3,48%.

Grifik 5.4. Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Riau Tahun 2007-2009



sumber : Bank Indonesia

Grifik 5.5. Perkembangan Penolakan Cek/BG di Provinsi Riau Tahun 2007-2009



sumber : Bank Indonesia

Sementara itu, penolakan cek/BG kosong dalam triwulan laporan juga mengalami kenaikan baik jumlah warkat maupun nilai nominalnya. Nilai nominal cek/BG kosong yang ditolak meningkat 4,20%, yaitu dari Rp83,65 miliar (triwulan III-2009) menjadi Rp87,08 miliar (triwulan IV-2009), sedangkan jumlah warkat cek/BG kosong naik 1,690%, yaitu dari 4.023 lembar (triwulan III-2009) menjadi 4.091 lembar (triwulan IV-2009).

3.2. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Transaksi non tunai melalui sistem Bank Indonesia RTGS (BI-RTGS) dalam triwulan IV-2009 tercatat mengalami kenaikan baik volume maupun nilainya. Nilai rata-rata transaksi secara kumulatif mengalami kenaikan dari Rp 4.035 miliar (triwulan III-2009) menjadi Rp16.812 miliar dalam triwulan IV-2009. Sementara itu, dari sisi volume mengalami kenaikan dari 4.807 lembar (triwulan III-2009) menjadi 19.833 lembar (triwulan IV-2009). Hal ini erat kaitannya dengan realisasi belanja Pemerintah Daerah maupun swasta seperti pembayaran proyek infrastruktur pada akhir tahun 2009. Sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1, transaksi BI-RTGS tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan nilai transaksi dan volume masing-masing mencapai Rp22,33 triliun dan 23.825 lembar.

Tabel 5.1. Perkembangan BI-RTGS di Provinsi Riau Tahun 2009

Periode	Dari		Ke		Kumulatif	
	Nilai (Rp miliar)	Volume	Nilai (Rp miliar)	Volume	Nilai (Rp miliar)	Volume
Jan	12.468	7.410	7.170	8.524	19.639	15.934
Feb	10.388	7.084	5.617	8.929	16.005	16.013
mar	14.049	-	7.946	9.336	21.995	9.336
<i>Total</i>	<i>36.905</i>	<i>14.494</i>	<i>20.733</i>	<i>26.789</i>	<i>57.639</i>	<i>41.283</i>
<i>Rata-rata</i>	<i>12.302</i>	<i>4.831</i>	<i>6.911</i>	<i>8.930</i>	<i>19.213</i>	<i>13.761</i>
Apr	14.232	7.518	7.261	9.629	21.493	17.147
Mei	10.758	7.786	5.786	9.413	16.544	17.199
Jun	12.589	-	6.467	10.499	19.056	10.499
<i>Total</i>	<i>37.579</i>	<i>15.304</i>	<i>19.514</i>	<i>29.541</i>	<i>57.093</i>	<i>44.845</i>
<i>Rata-rata</i>	<i>12.526</i>	<i>5.101</i>	<i>6.505</i>	<i>9.847</i>	<i>19.031</i>	<i>14.948</i>
Jul	5.886	4.352	3.294	5.389	9.180	9.741
Ags	380	1.156	681	999	1.062	2.155
Sep	1.241	1.370	622	1.155	1.863	2.525
<i>Total</i>	<i>7.508</i>	<i>6.878</i>	<i>4.597</i>	<i>7.543</i>	<i>12.105</i>	<i>14.421</i>
<i>Rata-rata</i>	<i>2.503</i>	<i>2.293</i>	<i>1.532</i>	<i>2.514</i>	<i>4.035</i>	<i>4.807</i>
Okt	8.968	7.237	4.908	9.452	13.876	16.689
Nov	8.782	8.287	5.440	10.698	14.222	18.985
Des	12.704	10.175	9.632	13.650	22.336	23.825
<i>Total</i>	<i>30.455</i>	<i>25.699</i>	<i>19.980</i>	<i>33.800</i>	<i>50.435</i>	<i>59.499</i>
<i>Rata-rata</i>	<i>10.152</i>	<i>8.566</i>	<i>6.660</i>	<i>11.267</i>	<i>16.812</i>	<i>19.833</i>

sumber : Bank Indonesia

*Bab 6***PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
& TINGKAT KESEJAHTERAAN DAERAH****1. Kondisi Umum**

Situasi ketenagakerjaan Provinsi Riau pada tahun 2009 belum menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, bahkan cenderung menurun. Hal ini tercermin dari meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Memburuknya kondisi ekonomi global yang berdampak pada pemburukan kondisi ekonomi Riau sejak akhir tahun 2008 yang lalu merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka pengangguran di Riau pada tahun 2009. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau, namun pangsaanya mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal tersebut seiring dengan memburuknya kondisi sektor pertanian sampai dengan pertengahan tahun 2009 yang lalu.

Survey Ekspektasi Konsumen (SEK) triwulan IV-2009 yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa masyarakat pesimis akan adanya penurunan angka pengangguran di Provinsi Riau. Persepsi konsumen menyatakan bahwa jumlah pengangguran saat ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan periode 6-12 bulan yang lalu. Secara umum hal ini menyebabkan penurunan optimisme masyarakat akan adanya peningkatan penghasilan dibandingkan 6-12 bulan yang lalu. Namun demikian peningkatan angka UMP (Upah Minimum Provinsi) di tahun 2010 diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Riau ke depan. Disamping itu Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan cerminan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang/jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi selama tahun 2009 menunjukkan kecenderungan terus meningkat.

2. Ketenagakerjaan Daerah

Jumlah penduduk Provinsi Riau pada tahun 2009 yang merupakan penduduk usia kerja¹ tercatat sebanyak 3,64 juta jiwa, mengalami peningkatan 2,18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk usia kerja ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bukan angkatan kerja yaitu mencapai 1,38 juta jiwa atau meningkat 4,25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penduduk angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 0,96%, sehingga jumlahnya menjadi 2,26 juta jiwa. Dari jumlah angkatan kerja dimaksud, jumlah penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) mengalami peningkatan sebesar 5,44% yaitu dari 183,93 ribu jiwa menjadi 193,51 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang bekerja² juga meningkat sebesar 0,56% yaitu dari 2,06 juta jiwa menjadi 2,07 juta jiwa.

¹ Penduduk berusia 15 tahun ke atas

² Penduduk angkatan kerja yang bekerja

Tabel 6.1. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama (Jiwa)

Kegiatan Utama	Feb-07	Aug-07	Feb-08	Aug-08	Feb-09	Aug-09
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Jiwa)	3,344,238	3,381,689	3,575,840	3,564,090	3,599,336	3,641,877
Angkatan Kerja						
Bekerja	1,693,968	1,907,946	2,025,384	2,055,863	2,097,955	2,067,357
Pengangguran	196,308	207,138	208,931	183,522	206,471	193,505
Total Angkatan Kerja	1,890,276	2,115,084	2,234,315	2,239,385	2,304,426	2,260,862
Bekerja Tidak Penuh						
Sukarela	342,344	338,595	343,511	303,011	482,782	405,856
Terpaksa	284,666	359,959	280,299	407,415	292,393	294,143
Total Bekerja Tidak Penuh	627,010	698,554	623,810	710,426	775,175	699,999
Bukan Angkatan Kerja	1,453,962	1,266,605	1,341,525	1,324,705	1,294,910	1,381,015
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK,%)	56.52	62.55	62.48	62.83	64.02	62.08
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT,%)	10.39	9.79	9.35	8.20	8.96	8.56

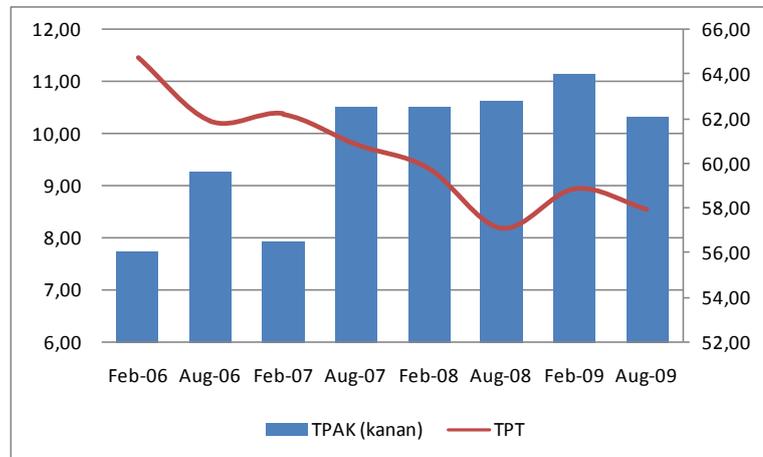
sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah

Dengan perkembangan tersebut di atas, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja³ (TPAK) Provinsi Riau mengalami penurunan menjadi 62,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 63,83%. Namun demikian, pada periode penghitungan bulan Februari 2009 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sempat meningkat menjadi 64,02%, namun selanjutnya mengalami penurunan pada periode penghitungan bulan Agustus 2009. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka⁴ (TPT) mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 8,20% menjadi 8,56%. Namun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan periode Februari 2009, yang tercatat sebesar 8,96%.

Tingginya angka TPT berdasarkan perhitungan bulan Februari 2009 masih merupakan dampak dari krisis keuangan global yang terjadi pada akhir 2008 yang lalu. Kondisi tersebut telah menyebabkan banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaan kepada karyawannya. Selanjutnya, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi sejak pertengahan tahun 2009, angka TPT di Provinsi Riau juga ikut terdorong. Namun demikian, menurunnya angka TPAK dan meningkatnya angka TPT pada Agustus 2009 dibandingkan dengan Agustus 2008 menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau masih belum sepenuhnya pulih.

³ Ratio antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja⁴ Ratio antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

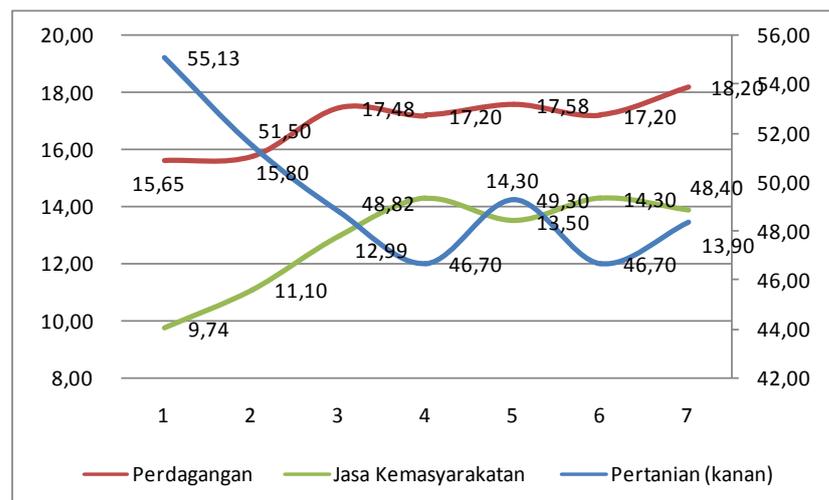
Grafik 6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran (%)



sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah

Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada bulan Agustus 2009 didorong oleh lebih tingginya pertumbuhan penduduk usia kerja dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Disisi lain, ditemukan kondisi bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pendidikan oleh perusahaan terhadap para karyawannya, menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi agar dapat memperoleh pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih baik.

Grafik 6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran (%)



sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah

Secara sektoral, terdapat 3 (tiga) sektor yang mendominasi pangsa penduduk yang bekerja di Provinsi Riau, yaitu sektor pertanian (48,40%), sektor perdagangan (18,20%), dan sektor jasa kemasyarakatan (13,90%). Sementara pangsa terkecil adalah penduduk yang bekerja pada sektor listrik, gas, dan air yaitu hanya sebesar 0,50%. Besarnya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian tidak terlepas dari besarnya prospek sektor pertanian di Riau terutama subsektor perkebunan yaitu komoditas kelapa sawit yang sampai saat ini masih menjadi komoditas primadona.

Jika dilihat dari perkembangannya, pada periode Agustus 2006 sampai dengan Februari 2009 pangsa penduduk yang bekerja pada sektor pertanian cenderung menurun dari 55,13% menjadi 46,70%. Namun setelah periode tersebut, pangsa jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini mulai menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terjadi karena kecenderungan turunnya harga TBS pada periode tersebut diikuti dengan berkurangnya ekspor CPO karena melemahnya kondisi ekonomi global dan munculnya *black campaign* terhadap produk olahan sawit. Kondisi ini telah mendorong menurunnya jumlah yang bekerja pada sektor ini berdasarkan pencacahan pada bulan Februari 2009 yang lalu.

Namun seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi global, permintaan terhadap komoditas sawit juga mulai menunjukkan peningkatan dan mendorong kenaikan harga CPO dunia. Kondisi ini menjadi stimulus bagi bergairahnya kembali subsektor perkebunan di tanah air dan mendorong peningkatan pangsa jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian.

Tabel 6.2. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama

Lapangan Pekerjaan Utama	Agust-06 (%)	Feb-07 (%)	Agust-07 (%)	Feb-08 (%)	Agust-08 (%)	Feb-09 (%)	Agust-09 (%)
Pertanian	55,13	51,50	48,82	46,70	49,30	46,70	48,40
Pertambangan	2,12	2,80	2,21	2,90	2,36	2,90	2,10
Industri	5,35	4,00	6,47	5,40	5,28	5,40	5,80
Listrik, Gas & Air	0,10	0,40	0,22	0,20	0,35	0,20	0,50
Bangunan	5,51	6,20	5,14	5,90	5,18	5,90	4,80
Perdagangan	15,65	15,80	17,48	17,20	17,58	17,20	18,20
Angkutan & Perdagangan	5,59	7,20	5,82	5,90	5,60	5,90	4,80
Keuangan & Jasa Perusahaan	0,81	1,00	0,85	1,40	0,86	1,40	1,50
Jasa Kemasyarakatan	9,74	11,10	12,99	14,30	13,50	14,30	13,90
Total	100	100	100	100	100	100	100

sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah

Selanjutnya, sektor perdagangan juga memberikan kontribusi sebagai lapangan usaha utama penduduk yang bekerja di Provinsi Riau yaitu dengan pangsa sebesar 18,20%. Secara umum, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan di Riau terus meningkat. Hal ini sejalan dengan visi misi Riau 2020 antara lain yaitu "Menjadikan Riau sebagai Pusat Perdagangan Asia Tenggara". Selain itu, sektor jasa kemasyarakatan juga menjadi pilihan penduduk Riau untuk bekerja, dengan pangsa mencapai 13,90% dengan *trend* yang terus meningkat, walaupun mengalami sedikit penurunan pada periode penghitungan bulan Februari 2009.

Jika dilihat dari jenis pekerjaan utamanya, maka 31,90% penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 33,33% dari jumlah penduduk usia kerja. Penurunan ini diperkirakan sangat terkait dengan adanya PHK pada beberapa perusahaan besar di Riau sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Selanjutnya, penurunan juga terjadi pada penduduk yang berusaha sendiri dan penduduk berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, yaitu masing-masing menjadi sebesar 27,60% dan 4,20%.

Tabel 6.3. Penduduk Usia Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	Agust-06 %	Feb-07 (%)	Agust-07 %	Feb-08 (%)	Agust-08 %	Feb-08 (%)	Agust-09 %
Berusaha Sendiri	33,20	28,00	27,90	25,60	28,17	28,30	27,60
Berusaha Dibantu Buruh Tdk Tetap/Buruh Tdk Dibayar	12,36	12,04	12,63	13,1	14,20	11,70	14,40
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	3,20	2,70	3,80	3,9	4,73	3,30	4,20
Buruh/Karyawan	34,83	33,10	34,67	34,4	33,33	38,00	31,90
Pekerja Bebas Pertanian	4,12	10,70	5,56	7,9	5,82	4,80	6,00
Pekerja bebas Non Petani	2,02	2,50	2,01	4,8	2,71	2,30	3,00
Pekerja Tdk Dibayar	10,26	10,50	13,43	10,3	11,21	11,60	12,90
Total	100,00						

sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah

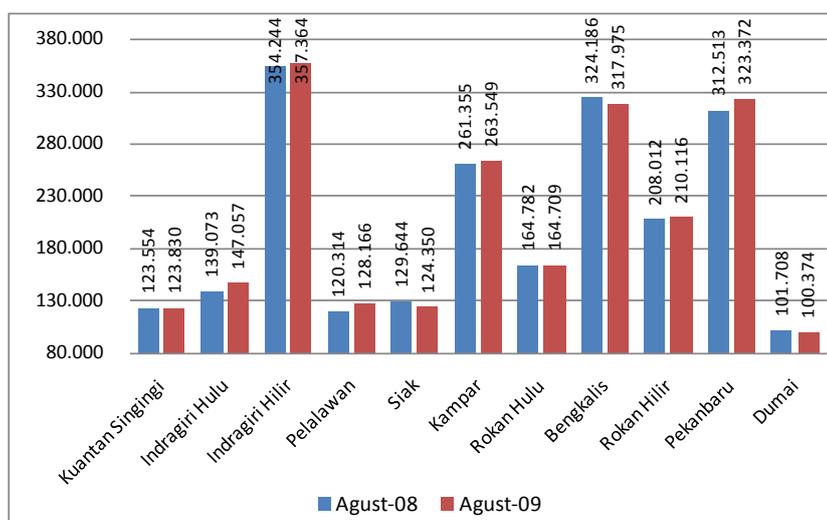
Sementara itu, terjadi peningkatan yang cukup berarti pada pangsa penduduk usia kerja yang bekerja sebagai pekerja bebas pertanian dari 5,82% menjadi 6%, pekerja bebas non pertanian dari 2,71% menjadi 3%, dan pekerja tidak dibayar dari 11,21% menjadi 12,90%. Peningkatan tersebut diperkirakan berasal dari penduduk yang awalnya bekerja sebagai buruh/karyawan dan penduduk yang berusaha

sendiri. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan permasalahan pada permodalan diperkirakan menjadi alasan terjadinya alih profesi tersebut.

2.1. Penduduk Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota

Berdasarkan sebaran daerah, jumlah angkatan kerja tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu mencapai 357,36 ribu jiwa, meningkat 0,88% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan besarnya populasi penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir, yang pada tahun 2008 mencapai 670,81 ribu jiwa, tertinggi se-Provinsi Riau. Selanjutnya, diikuti oleh jumlah angkatan kerja di Kota Pekanbaru yang mencapai 323,37 ribu, meningkat 3,47% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 317,97 ribu jiwa, mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 1,92%.

Grafik 6.3. Angkatan Kerja masing-masing Kabupaten/Kota (Jiwa)



sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah

Jumlah angkatan kerja pada Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis tercatat lebih rendah dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada Kabupaten Indragiri Hilir, meskipun jumlah penduduk pada kedua kab/kota dimaksud tercatat lebih besar daripada Kabupaten Indragiri Hilir. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja terkecil berada

di Kota Dumai yaitu sebesar 100,37 juta jiwa, turun 1,31% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Jika dilihat berdasarkan pertumbuhannya, maka pertumbuhan angkatan kerja tertinggi terjadi pada Kabupaten Pelalawan yaitu sebesar 6,53%, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 5,74%, dan Kota Pekanbaru sebesar 3,47%. Sementara itu, Kabupaten Siak Sri Indrapura mengalami penurunan jumlah angkatan kerja tertinggi yaitu sebesar 4,08%, diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebesar 1,92%, dan Kota Dumai sebesar 1,31%. Berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan angkatan kerja di Provinsi Riau utamanya didorong oleh peningkatan angkatan kerja di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru.

2.2. Penduduk Bekerja di Kabupaten/Kota

Dari 2,26 juta jiwa jumlah penduduk angkatan kerja di Provinsi Riau terdapat 91,44% angkatan kerja yang bekerja, namun mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 91,80%. Secara umum, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir pertumbuhan penduduk usia kerja yang bekerja juga relatif rendah yaitu hanya mencapai 0,56%. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena kondisi ekonomi yang belum membaik, sehingga pelaku ekonomi belum dapat berproduksi dengan kapasitas penuh, sehingga belum dapat memberikan peningkatan kesempatan kerja yang berarti.

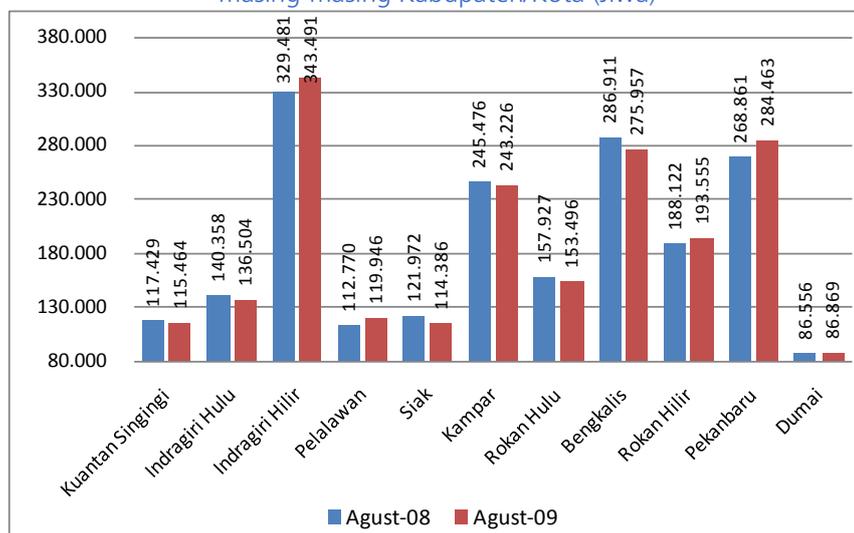
Berdasarkan sebarannya, jumlah penduduk usia kerja yang bekerja paling banyak terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu mencapai 16,61%, meningkat 4,25% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ini diperkirakan terkait dengan banyaknya industri berbasis perkebunan berskala besar di wilayah ini yang menyerap banyak tenaga kerja.

Selanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja di Kota Pekanbaru tercatat sebesar 13,76% meningkat sebesar 5,80% dari periode sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Bengkalis tercatat 13,35%, namun mengalami penurunan 3,82% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dilihat dari pertumbuhannya, maka jumlah penduduk bekerja yang mengalami

pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Pelalawan yaitu 6,36%, diikuti oleh Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan angkatan kerja di wilayah tersebut sebagai dampak dari pertumbuhan sektor usaha yang membuka lapangan pekerjaan baru bagi angkatan kerja. Sementara itu, penurunan jumlah penduduk bekerja utamanya terjadi pada Kabupaten Siak Sri Indrapura (6,22%), Kabupaten Bengkalis (3,82%), dan Kabupaten Rokan Hulu (2,81%).

Grafik 6.4. Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja masing-masing Kabupaten/Kota (Jiwa)



sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah

2.3. Pengangguran dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota

Berdasarkan data tingkat pengangguran per daerah, diketahui bahwa tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Kota Dumai yaitu sebesar 13,45% atau 13,51 ribu jiwa. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 14,90% atau 15,15 ribu jiwa. Selanjutnya, tingkat pengangguran pada Kabupaten Bengkalis tercatat sebesar 13,21% atau 42,02 ribu jiwa yang secara nominal merupakan jumlah penduduk menganggur yang tertinggi di Provinsi Riau. Tingkat pengangguran di Kabupaten Bengkalis ini meningkat 11,85% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan angka pengangguran

tersebut disebabkan percepatan penurunan jumlah orang bekerja yang lebih tinggi dibandingkan percepatan penurunan penduduk angkatan kerja.

Tabel 6.4. Penduduk Angkatan Kerja menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja		Bekerja		Pengangguran		Tingkat Pengangguran	
	Agust-08	Agust-09	Agust-08	Agust-09	Agust-08	Agust-09	Agust-08	Agust-09
Kuantan Singingi	123.554	123.830	117.429	115.464	6.125	8.366	4,96%	6,76%
Indragiri Hulu	139.073	147.057	140.358	136.504	5.715	10.553	4,11%	7,18%
Indragiri Hilir	354.244	357.364	329.481	343.491	15.763	13.873	4,45%	3,88%
Pelalawan	120.314	128.166	112.770	119.946	7.544	8.220	6,27%	6,41%
Siak	129.644	124.350	121.972	114.386	7.672	9.964	5,92%	8,01%
Kampar	261.355	263.549	245.476	243.226	15.879	20.323	6,08%	7,71%
Rokan Hulu	164.782	164.709	157.927	153.496	6.855	11.213	4,16%	6,81%
Bengkalis	325.186	317.975	286.911	275.957	38.275	42.018	11,77%	13,21%
Rokan Hilir	208.012	210.116	188.122	193.555	19.890	16.561	9,56%	7,88%
Pekanbaru	312.513	323.372	268.861	284.463	44.652	38.909	14,29%	12,03%
Dumai	101.708	100.374	86.556	86.869	15.152	13.505	14,90%	13,45%
Total	2.240.385	2.260.862	2.055.863	2.067.357	183.522	193.505	8,19%	8,56%

sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah

Tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru berada pada urutan ketiga yaitu sebesar 12,03% atau 38,91 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 14,24% atau 44,65 ribu jiwa. Beberapa proyek besar pada Kota Pekanbaru dalam 1 (satu) tahun terakhir diperkirakan banyak memberikan pengaruh terhadap penurunan angka pengangguran dimaksud.

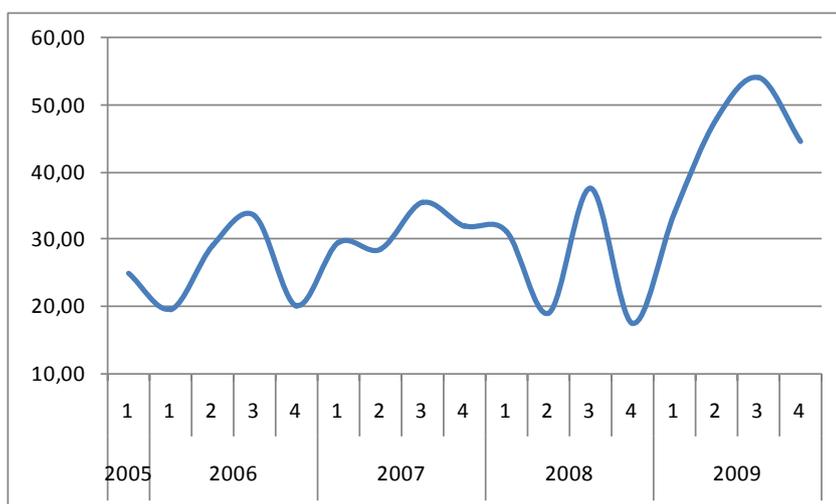
Sementara itu, tingkat pengangguran terendah terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 3,88% atau 13,87 ribu jiwa, turun dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 4,45% atau 15,76 ribu jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya terutama pada subsektor perkebunan.

Selanjutnya, tingkat pengangguran pada Kabupaten Pelalawan tercatat sebesar 6,41% atau 8,22 ribu jiwa, meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 6,27% atau 7,5 juta jiwa. Tingkat pengangguran pada Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu masing-masing tercatat sebesar 6,76% dan 6,81%, meningkat signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 4,96% dan 4,16%. Dengan perkembangan tersebut di atas, maka secara umum tingkat pengangguran di

Provinsi Riau mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 8,20% menjadi 8,56%.

Survey Ekspektasi Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan IV-2009 juga menunjukkan bahwa masyarakat pesimis akan adanya pengurangan jumlah pengangguran di Provinsi Riau. Persepsi konsumen menunjukkan bahwa jumlah pengangguran saat ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 6-12 bulan yang lalu. Hal ini juga menjadi salah satu faktor pendorong menurunnya optimisme masyarakat terhadap adanya peningkatan penghasilan dibandingkan 6-12 bulan yang lalu.

Grafik 6.5. Ekspektasi Masyarakat terhadap Pengangguran (Indeks)



sumber : Bank Indonesia, diolah

3. Kesejahteraan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No.94 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2010 di Provinsi Riau, Upah Minimum Provinsi Riau ditetapkan sebesar Rp1.016.000,00/bulan atau meningkat sebesar 12,69%. Disamping itu berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 95 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2010, juga telah ditetapkan besaran upah minimum untuk setiap kabupaten/kota dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,45%.

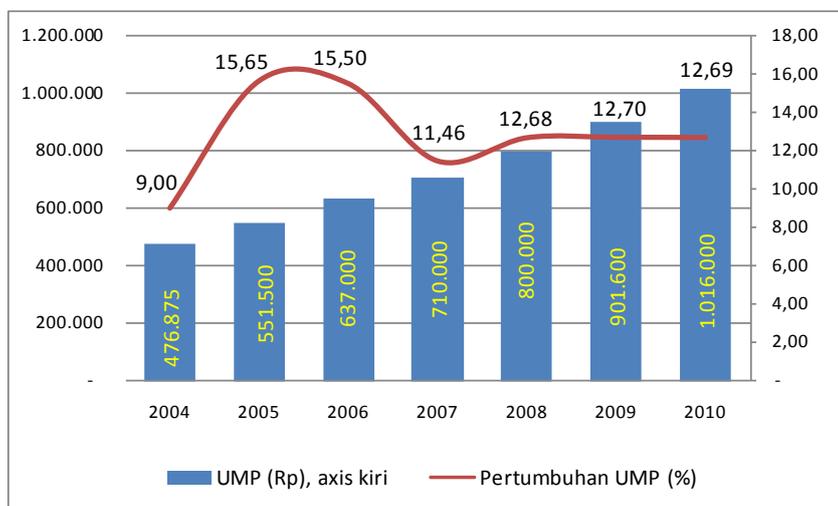
Mengingat masih dominannya sektor pertanian pada pembentukan PDRB Provinsi Riau, maka faktor Nilai Tukar Petani (NTP) sangat relevan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2009, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan terus meningkat, setelah mengalami penurunan yang cukup dalam pada bulan Oktober 2008 yang lalu. Secara tahunan, NTP pada bulan November 2009 tercatat mengalami peningkatan sebesar 7,76% yang mengindikasikan lebih tingginya pertumbuhan indeks yang diterima petani dibandingkan dengan indeks yang harus dibayar oleh petani. Kondisi ini mencerminkan bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir harga produk/barang pertanian yang dihasilkan oleh rumah tangga pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani maupun untuk keperluan produksi pertanian.

3.1. Penghasilan Masyarakat

Pada tahun 2009 Gubernur Riau telah menetapkan besarnya UMP untuk Provinsi Riau sebesar Rp901.600,00/bulan, dan untuk tahun 2010 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, UMP kembali dinaikkan sebesar 12,69% menjadi Rp1.016.000,00/bulan.

Penetapan Upah Minimum (UMP) tersebut juga menetapkan bahwa pekerja yang mempunyai masa kerja kerja lebih dari 1 (satu) tahun berhak mendapatkan upah lebih tinggi dari ketentuan dimaksud. Selain itu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum pasal 17 juga menyebutkan bahwa perusahaan yang telah menetapkan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Provinsi Riau tidak dibenarkan untuk mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.

Grafik 6.6. Perkembangan Upah di Provinsi Riau



Selanjutnya, Kabupaten/Kota yang ingin menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara tersendiri dapat mengusulkan kepada Gubernur Riau melalui Dewan Pengupahan Provinsi Riau setelah dibahas dan disepakati terlebih dahulu oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan penetapan UMK tersebut harus di atas UMP. Maka terkait dengan hal tersebut telah disepakati untuk menetapkan UMK masing-masing kabupaten/kota yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau No.95 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2010.

Atas dasar Peraturan Gubernur Riau tersebut telah ditetapkan upah minimum masing-masing kabupaten/kota (tabel 6.6). Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi ditetapkan di Kabupaten Kampar yaitu mencapai Rp1.122.000,00/bulan atau meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan UMK tahun sebelumnya. Sementara, UMK paling rendah terdapat di Kabupaten Meranti yaitu sebesar Rp1.016.000,00/bulan, dan Kabupaten Meranti ini merupakan Kabupaten yang baru disetujui pembentukannya pada tahun 2009.

Jika dilihat dari pertumbuhannya maka, peningkatan UMK tertinggi terjadi pada Kota Pekanbaru yaitu meningkat sebesar 14,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara peningkatan terendah dialami oleh Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebesar 5,17%. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota didasarkan

pada biaya hidup pada daerah dimaksud. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya hidup di Kabupaten Kampar dianggap cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Riau, sementara Kabupaten Meranti sebagai daerah yang baru disetujui pembentukannya dianggap memiliki biaya hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Riau.

Tabel 6.5. Perkembangan Upah se Provinsi Riau (Rp)

Kabupaten/Kota	2009	2010	Δ (%)
Kampar	1.020.000	1.122.000	10,00
Indragiri Hulu	1.054.000	1.108.500	5,17
Dumai	967.500	1.070.000	10,59
Rokan Hulu	959.200	1.060.000	10,51
Pekanbaru	925.000	1.055.000	14,05
Bengkalis	960.000	1.050.000	9,38
Siak	938.000	1.048.500	11,78
Rokan Hilir	929.000	1.040.000	11,95
Indragiri Hilir	933.800	1.030.000	10,30
Pelalawan	930.000	1.020.000	9,68
Kuantan Singingi	912.240	1.017.500	11,54
Meranti *)	n/a	1.016.000	n/a

*) Kabupaten baru

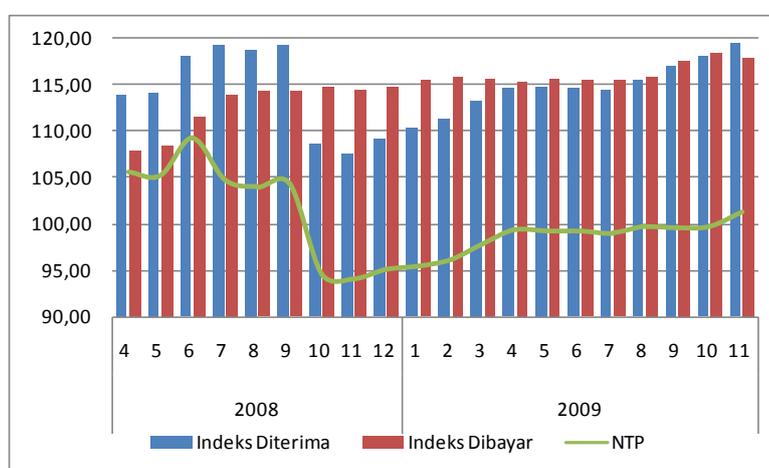
3.2. NTP

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks yang diterima petani dengan indeks yang dibayar oleh petani, dan merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang/jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Semakin tinggi NTP maka akan relatif semakin baik tingkat kehidupan petani.

Sampai dengan bulan November 2009, Nilai Tukar Petani mulai menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara tahunan, NTP pada bulan November 2009 tercatat mengalami peningkatan sebesar 7,76% yaitu dari 94,08% pada bulan November 2008 menjadi 101,38%. Peningkatan ini didorong oleh lebih tingginya pertumbuhan indeks yang diterima petani (11,01%) dibandingkan dengan indeks yang harus dibayar oleh petani (3,02%).

Selama tahun 2009, NTP tertinggi terjadi pada bulan November 2009 yaitu mencapai 101,38%. Indeks yang diterima oleh petani pada bulan tersebut juga merupakan yang tertinggi selama tahun 2009 yaitu mencapai 119,48%, sementara indeks yang dibayar oleh petani paling tinggi terjadi pada bulan Oktober 2009 yaitu mencapai 118,36%. Secara umum, pada tahun 2009 rata-rata peningkatan pada indeks yang diterima oleh petani (0,83%) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata peningkatan indeks yang dibayar oleh petani (0,24%), bahkan lebih tinggi juga dibandingkan dengan rata-rata peningkatan NTP secara umum (0,58%).

Grafik 6.7. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Riau



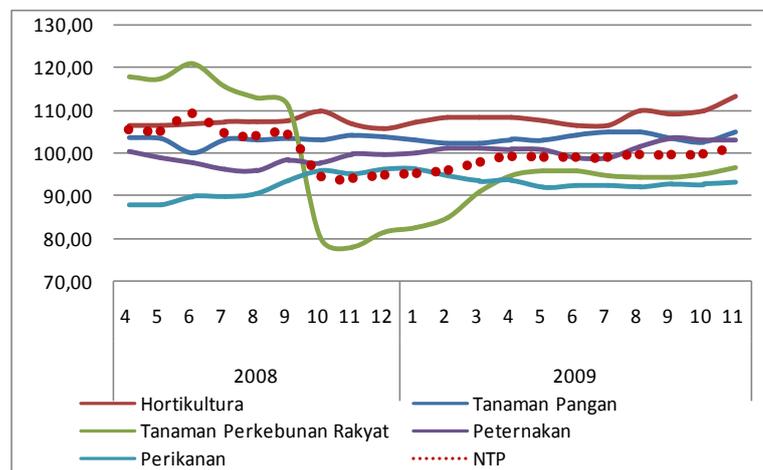
sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

Jika dilihat secara subsektor, maka selama tahun 2009 subsektor hortikultura tercatat memiliki rata-rata NTP tertinggi (108,68%). Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan sebesar 6,08%. Peningkatan ini utamanya terjadi pada kelompok buah-buahan dengan indeks yang diterima pada bulan November 2008 sebesar 114,24% menjadi sebesar 130,28% pada bulan November 2009 atau meningkat sebesar 14,13%, antara lain terjadi pada komoditas mangga, pepaya, nangka, rambutan, pisang, dan lain-lain. Sementara itu, indeks yang diterima oleh petani pada kelompok sayur-sayuran mengalami peningkatan sebesar 1,79% yaitu dari 130,98% menjadi 133,33%, antara lain terjadi pada komoditas ketimun, cabe rawit, kacang panjang, dan lain-lain.

Di sisi lain, subsektor tanaman perkebunan rakyat tercatat memiliki rata-rata NTP paling rendah selama tahun 2009 (92,74%), namun telah mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu mencapai 23,73%. Peningkatan ini terjadi seiring dengan mulai membaiknya harga kelapa sawit setelah mengalami kejatuhan yang cukup dalam pada akhir tahun 2008 yang lalu. Peningkatan harga kelapa sawit di pasaran internasional telah menyebabkan meningkatnya indeks yang diterima oleh petani dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu dari 89,58% menjadi 114,63% atau mengalami peningkatan sebesar 27,96%, sementara indeks yang dibayar oleh petani hanya mengalami peningkatan sebesar 3,42%.

Secara umum, semua subsektor mengalami peningkatan kecuali subsektor perikanan yang mengalami penurunan sebesar 1,99% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan NTP subsektor perikanan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya indeks yang dibayar oleh petani/nelayan sebesar 1,36%, khususnya untuk kelompok Indeks Konsumsi Rumah Tangga (2,95%), sementara indeks yang diterima oleh petani/nelayan mengalami penurunan sebesar 0,66%, yang didorong penurunan pada kelompok penangkapan (-1,06%).

Grafik 6.8. Perkembangan NTP menurut Subsektor Provinsi Riau



Sumber : BPS Provinsi Riau, diolah

*Bab 7***PROSPEK PEREKONOMIAN
DAERAH****1. Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2010 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2009. Meningkatnya kebutuhan CPO sebagai sumber energi alternatif sebagai dampak dari peningkatan harga minyak mentah dunia diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Riau selama tahun 2010 yang diperkirakan akan berada pada kisaran 4%-4,5% dengan migas dan 7,5% - 8,5% tanpa migas.

Pada triwulan I-2010 pertumbuhan ekonomi Riau juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV-2009, yaitu akan berada pada kisaran **4,75% - 5,22%** dengan migas dan **7,83% - 8,35%** tanpa migas. Membaiknya harga-harga komoditas pertanian seperti kelapa sawit, CPO serta karet di pasaran internasional diperkirakan akan menjadi faktor utama meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan I-2010.

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur PDRB Riau akan memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Riau pada tingkat yang lebih tinggi. Namun demikian, kita tetap patut waspada terhadap efek badai el-nino yang dapat memberikan pengaruh negatif bagi sektor pertanian. Selain itu, peranan sektor industri pengolahan dan pertambangan diperkirakan masih akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Riau ke depan.

Tabel 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Riau (yoy,%)

Pertumbuhan	2008		2009				2010
	III	IV	I	II	III	IV	(*)
Dengan Migas	6.97	5.37	4.42	3.07	2.52	3.91	4.75 - 5.22
Tanpa Migas	8.54	7.38	6.55	6.43	5.57	7.25	7.83 - 8.35

*) angka perkiraan

Pertumbuhan ekonomi Riau masih sangat ditentukan oleh tingkat pemulihan perekonomian dunia, semakin kondusifnya pasar keuangan dan perbankan serta dengan terjaganya kondisi fundamental domestik. Namun, pemulihan ekonomi global ini bergantung pada kesuksesan *exit policy* di negara-negara maju dan mitra dagang Indonesia.

Dari sisi permintaan, membaiknya daya beli masyarakat seiring dengan peningkatan penghasilan yang tercermin dari peningkatan UMP Riau 2010 juga akan memberikan dorongan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Riau karena besarnya porsi komponen ini. Selain itu, kebijakan Pemerintah untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras sampai dengan 10% juga akan berdampak pada peningkatan penghasilan petani dan akan mendorong peningkatan konsumsi.

Kenaikan HPP beras ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) No.7/2009 tentang Kebijakan Perberasan 2010 yang akan mulai berlaku mulai 1 Januari 2010. Dengan kenaikan harga HPP tersebut, Harga Gabah Kering Panen (GKP) di petani berubah dari Rp 2.400 per kg menjadi Rp2.640 per kg, GKP di penggilingan naik menjadi Rp2.685 per kg, sedangkan GKG di gudang Bulog menjadi Rp3.345. Sementara harga beras di gudang naik dari Rp 4.600 per kg jadi Rp5.060 per kg. Meningkatnya aktivitas neraca perdagangan Riau seiring dengan peningkatan permintaan komoditas unggulan Riau di pasaran internasional juga diperkirakan akan memberikan dorongan yang besar terhadap kinerja ekspor Riau yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi Riau secara umum.

Peningkatan realisasi belanja modal oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2010 diperkirakan masih memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan I-2010. Peningkatan realisasi belanja modal pada tahun 2010 diperkirakan akan memberikan momentum yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Riau selama tahun 2010.

Sementara itu, beberapa faktor lain yang diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2010 dan triwulan I-2010 pada khususnya adalah : (i) Penetapan Riau sebagai salah satu pusat klaster industri hilir kelapa sawit dengan nilai investasi untuk infrastruktur diperkirakan mencapai Rp30,52 triliun dan investasi untuk modal kerja pembangunan industri sebesar Rp5,14 triliun, sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor terkait dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, (ii) Pembangunan PLTU 2x100 MW yang pembiayaannya berasal dari sindikasi Asbanda, (iii) Pembangunan berbagai infrastruktur menjelang pelaksanaan PON tahun 2012 di Provinsi Riau.

Sementara itu, beberapa permasalahan di Riau seperti infrastruktur listrik dan air bersih, distribusi dan spekulasi harga bahan makanan, serta ketergantungan Provinsi Riau terhadap *supply* dari daerah lain dapat menyebabkan momentum pertumbuhan tersebut kembali melemah apabila tidak segera dibenahi.

2. Inflasi

Membbaiknya daya beli masyarakat seiring dengan membaiknya perekonomian diperkirakan akan memberikan tekanan terhadap tingkat harga di Kota Pekanbaru. Survey Ekspektasi Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan persepsi masyarakat terhadap harga pada 6-12 bulan yang akan datang. Selain itu, peningkatan UMP pada tahun 2009 dan peningkatan harga pada kelompok *administered price* (TDL dan LPG) juga akan memberikan tekanan terhadap pembentukan inflasi tahun 2010. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut pada tahun 2010 diperkirakan inflasi Kota Pekanbaru akan berada pada kisaran $4,5\% \pm 1\%$.

Secara triwulanan, tingkat inflasi Kota Pekanbaru pada triwulan I-2010 juga akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan inflasi triwulan IV-2009. Pada triwulan I-2010, tingkat inflasi Kota Pekanbaru diperkirakan akan berada pada kisaran **1,25%-1,5%**.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras juga akan berdampak pada peningkatan harga jual beras di gudang dari Rp 4.600 per kg jadi Rp5.060 per kg. Kondisi ini juga akan mendorong peningkatan harga beras secara umum. Kontribusi komoditas beras yang cukup besar dalam pembentukan tingkat inflasi di Kota Pekanbaru akan memberikan tekanan yang cukup besar terhadap tingkat harga di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan kelompoknya, pada triwulan I-2010 inflasi tertinggi diperkirakan akan terjadi pada kelompok makanan jadi diikuti oleh kelompok bahan makanan. Perayaan Imlek yang jatuh pada triwulan I-2010 diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat terhadap berbagai macam jenis makanan.

3. Perbankan

Dari sisi perbankan, penyaluran kredit pada triwulan I-2010 diperkirakan akan mengalami peningkatan, bahkan lebih tinggi dari peningkatan di triwulan IV-2009, sebagai dampak dari *trend* penurunan BI-Rate. Sementara itu, penghimpunan DPK diperkirakan akan mulai mengalami peningkatan meskipun masih akan berada pada tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah akan mulai melakukan saving, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian dan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Selain itu, *trend* penurunan BI-Rate diperkirakan sudah akan direspon perbankan pada triwulan I-2010 dengan menurunkan suku bunga dana maupun kredit. Penurunan suku bunga kredit akan mendorong peningkatan ekspansi kredit. Dari sisi jaringan kantor, pada triwulan I-2010 diperkirakan akan ada penambahan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengingat saat ini terdapat 9 (tiga) BPR yang sedang dalam proses izin, dan juga akan terdapat peningkatan jumlah jaringan kantor bank umum. Penambahan jumlah kantor tersebut akan memperluas jaringan pelayanan dan meningkatkan kemampuan perbankan baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan kredit.

Peranan perbankan dalam mendukung pemberdayaan sektor riil dan UMKM, diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini seiring dengan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Bank Indonesia Pekanbaru antara lain (1) mengoptimalkan peran KKMB, (2) meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Peternakan, (3) melakukan program *klastering* di sektor perikanan (4) melakukan pemetaan UMKM di Provinsi Riau melalui penelitian BLS (5) Melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan dan perbankan untuk mendorong realisasi Program Revitalisasi Perkebunan, dan (6) Menghimbau dan mendorong perbankan untuk dapat merealisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Aktiva Produktif

Adalah penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

Adalah pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan.

Kualitas Kredit

Adalah penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Adalah rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Adalah dana yang diterima perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Inflasi *Administered Price*

Inflasi yang terjadi pergerakan harga barang-barang yang termasuk dalam kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (misalnya bahan bakar).

Inflasi Inti

Inflasi yang terjadi karena adanya gap penawaran agregat and permintaan agregat dalam perekonomian, serta kenaikan harga barang impor dan ekspektasi masyarakat.

Inflasi *Volatile Food*

Inflasi yang terjadi karena pergerakan harga barang-barang yang termasuk dalam kelompok barang yang harganya bergerak sangat volatile (misalnya beras).

Kliring

Adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kliring Debet

Adalah kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggara kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional.

Kliring Kredit

Adalah kegiatan kliring untuk transfer kredit antar bank yang dikirim langsung oleh bank peserta ke Sistem Sentral Kliring di KP Bank Indonesia tanpa menyampaikan fisik warkat (*paperless*).

Loan to Deposit Ratio (LDR)

Adalah rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang diterima (giro, tabungan dan deposito).

Net Interest Income (NII)

Adalah antara pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga.

Non Core Deposit (NCD)

Adalah dana masyarakat yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Dalam laporan ini, NCD diasumsikan terdiri dari 30% giro, 30% tabungan dan 10% deposito berjangka waktu 1-3 bulan.

Non Performing Loans/Financing (NPLs/Ls)

Adalah kredit/pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Adalah suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk. Misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15% dari jumlah kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan).

Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)

Adalah rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ysb.

Rasio Non Performing Loans (NPLs) – Net

Adalah rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit

Sistem Bank Indonesia Real Time Settlement (BI RTGS)

Adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (*real time*) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)

Adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.